

371.2  
F45  
s c

**STUDI PERSIAPAN PELAKSANAAN MANAJEMEN BERBASIS  
SEKOLAH DI KABUPATEN BANJARNEGARA**

**TESIS**

Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan  
Guna Menempuh Derajat Sarjana S - 2

Program Pasca Sarjana Universitas Diponegoro  
Program Studi Magister Ilmu Administrasi  
Konsentrasi Magister Administrasi Publik



Oleh :  
**ALI HANAN FATAH**  
**D4 E000007**

**PROGRAM PASCA SARJANA**  
**UNIVERSITAS DIPONEGORO SEMARANG**  
**2003**

**UPT-PUSTAK-UNDIP**

UPT-FUSIK-UNIP	
No. Daft.	2090 / T / MAP / C-1
Tgl.	01 sept 2003

## **ABSTRACT**

**ALI HANAN FATAH, 2003, The Readiness Implementation of School Based Management on Banjarnegara Regency: Study of Magister Program in Public Administration, Magister Program of Diponegoro University.**

**Keyword : Regulation, Responsibility, Organization, School Based Management.**

The purpose of the research in the thesis are for discribing the job performance, regulation understanding, the level of responsibility, and the condition of management organization of basic elementary schools in Banjarnegara regency, besides, for examining the relation between job performance education variable and regulation understanding variable, the level of responsibility and the education of management organization in the basic elementary schools in Banjarnegara regency. The research population were from 698 schools sample gained were 106 person. The data of the research were collected by using questioner for all variable and by using indepth interview, and also using documentation methode for collecting secondair data. The data analysis used was the discriptive analysis by using the creteria for quantitafife data and interactife analysis used for qualitatife data. Based on discriptive analysis it was gained that most of the variable of job performance of elementary education, regulation understanding, the level of responsibility, the level of responsibility and the condition of organization and the management of elementary school in Banjarnegara regency were in the low category.



## **ABSTRAKSI**

**ALI HANAN FATAH, 2003,** Studi Persiapan Pelaksanaan Manajemen Berbasis Sekolah Di Kabupaten Banjarnegara; Program Studi Magister Administrasi Publik, Pascasarjana Universitas Diponegoro.

Kata kunci : Regulasi, Responsibilitas, Organisasi, Manajemen Bebas Sekolah.

Tujuan penelitian dalam tesis ini adalah untuk mendiskripsikan kinerja pendidikan, pemanahaman regulasi, tingkat responsibilitas, serta kondisi organisasi manajemen sekolah dasar dan menengah di Kabupaten Banjarnegara. Selain itu untuk menguji keterkaitan variabel kinerja pendidikan dengan variabel pemahaman regulasi, tingkat responsibilitas, dan kondisi organisasi manajemen sekolah dasar dan menengah di kaupaten Banjarnegara. Pupulasi penelitia ini 698 sekolah dan sampel diambil dari 106 orang. Data penelitian ini dikumpulkan dengan menggunakan kuesioner untuk semua variabel dan diperdalam dengan menggunakan wawancara mendalam, serta dengan metode dokumentasi untuk mengumpulkan data skunder. Analisis data yang digunakan adalah analisis diskriptif dengan menggunakan analisis tabel silang untuk data kualitatif dan analisis interaktif digunakan untuk data kualitatif. Berdasarkan analisis diskriptif diperoleh variabel kinerja pendidikan, pemahaman regulasi, tingkat responsibilitas, dan kondisi organisasi manajemen sekolah dasar dan menengah di Kabupaten Banjarnegara sebagian besar berada pada kategori rendah.



## RINGKASAN

ALI HANAN FATAH. Studi Persiapan Penerapan Manajemen Berbasis sekolah di Kabupaten banjarnegara : Program Studi Magister Administrasi Publik, Pascasarjana Universitas Diponegoro, 2003.

Tujuan penelitian dalam tesis ini adalah untuk mendiskripsikan kinerja pendidikan, pemahaman regulasi, tingkat responsibilitas, serta kondisi organisasi manajemen sekolah dasar dan menengah di Kabupaten Banjarnegara. Selain itu untuk mendeskripsikan keterkaitan variabel kinerja pendidikan dengan variabel pemahaman regulasi, tingkat responsibilitas, dan kondisi organisasi manajemen sekolah dasar dan menengah di Kabupaten Banjarnegara. Populasi penelitian ini adalah 698 sekolah dan sampel ditentukan 15%, sehingga diperoleh sampel sebesar 80 orang. Data Penelitian ini dikumpulkan dengan menggunakan kuesioner untuk semua variabel dan diperbalam dengan menggunakan Indept Interview (Wawancara mendalam), serta dengan metode dokumentasi untuk mengumpulkan data sekunder. Instrumen kuesioner telah diujicobakan dan dianalisis validitas serta reliabilitasnya sangat baik. Analisis data digunakan adalah analisis deskriptif dengan menggunakan kriteria dan pengujian hubungan dengan menggunakan analisis tabel silang untuk data kuantitatif dan analisis interaktif digunakan untuk data kualitatif.

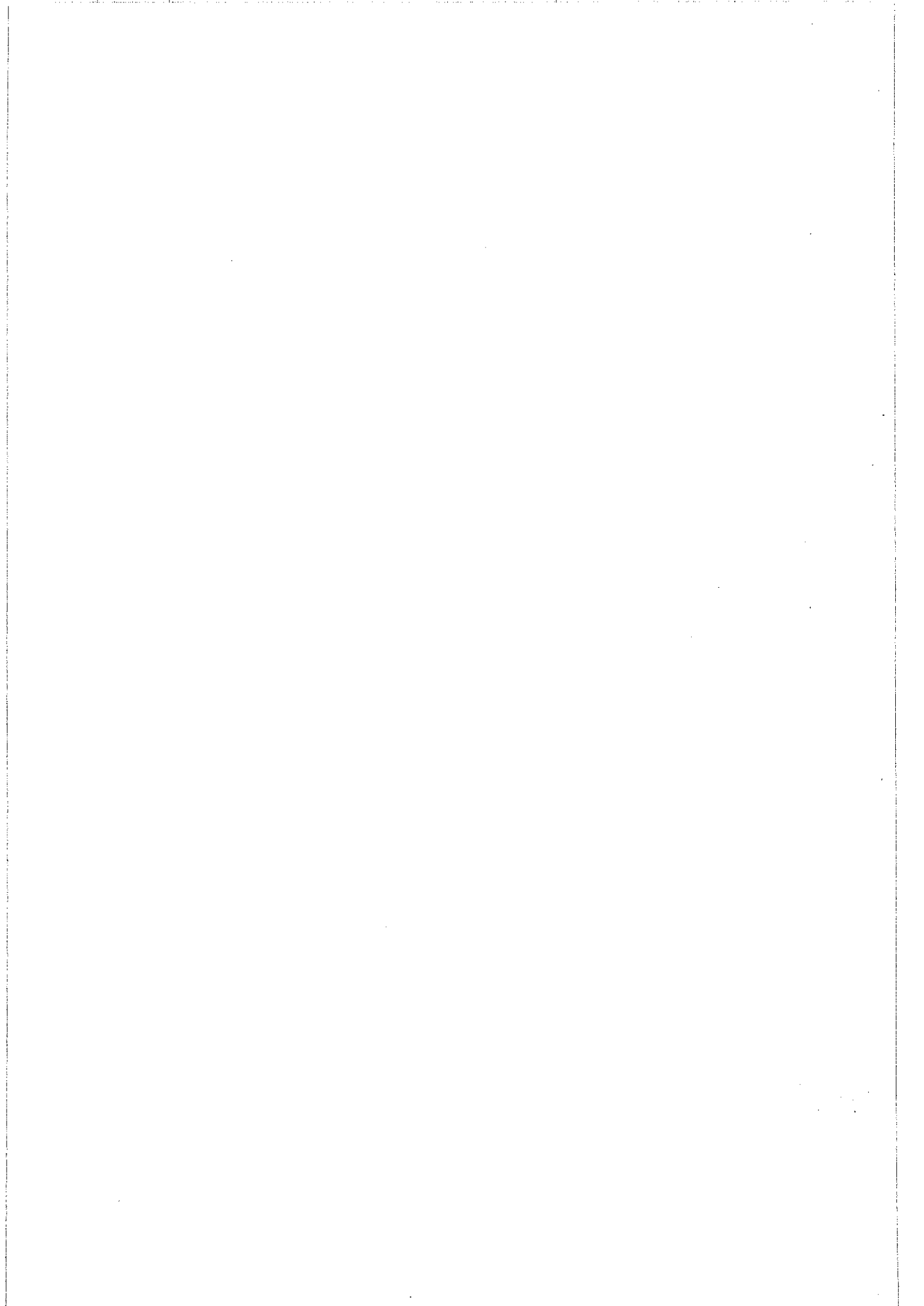
Berdasarkan analisis deskriptif diperoleh variabel kinerja pendidikan, pemahaman regulasi, tingkat responsibilitas, dan kondisi organisasi dan manajemen sekolah dasar dan menengah di Kabupaten Banjarnegara sebagian besar berada pada kategori rendah. Hasil analisis dengan tabel silang variabel pemahaman regulasi, variabel organisasi dan manajemen, dan variabel responsibilitas memiliki kecenderungan kterkaitan searah dengan kinerja pendidikan sekolah dasar dan menengah di Kabupaten Banjarnegara.

Berdasarkan hasil penelitian ini memiliki implikasi yang dengan menunjuk kualitas kinerja pendidikan berada rendah pada kategori terutama yang berkaitan dengan aktivitas guru dalam melaksanakan model PAKEM berada pada kategori rendah yang disebabkan oleh kendala kurikulum yang diberlakukan, maka perlu segera diadakan perubahan kurikulum yang dapat menunjang peningkatan kinerja pendidikan terutama dalam penerapan Manajemen Berbasis Sekolah. Hasil penelitian ini juga menemukan bahwa aktivitas siswa dalam pelaksanaan model pembelajaran PAKEM berada kategori rendah yang menurut hasil penelitian lebih disebabkan oleh kebiasaan anak didik supaya menjadi penurut, maka perlu kerjasama dan penyuluhan kepada orangtua murid mengenai proses pendidikan anak yang demokratis, agar





dapat menunjang pelaksanaan pembelajaran model PAKEM. Implikasi lain dari hasil penelitian lain yang diperoleh dalam penelitian adalah tentang pemahaman regulasi para penyelenggara pendidikan dan guru-guru berada pada kategori rendah, maka diperlukan adanya sosialisasi tentang kebijakan-kebijakan baru tentang otonomi pendidikan dengan menyelenggarakan pelatihan-pelatihan atau penataran-penataran yang berkaitan dengan Manajemen Berbasis Sekolah dan hal-hal lain yang berkaitan dengan otonomi di bidang pendidikan. Organisasi manajemen pendidikan yang terdiri dari sumber daya manusia, sarana dan prasarana, serta pendanaan dan keterlibatan masyarakat yang masih berada pada kategori rendah, maka perlu adanya peningkatan sarana dan prasarana, serta perlu ada penyuluhan pada masyarakat mengenai peran masyarakat dalam peningkatan kualitas pendidikan.



## LEMBAR PERNYATAAN

Dengan rasa penuh tanggung jawab, saya menyatakan bahwa dalam tesis ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan atau diujikan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi, juga tidak terdapat hasil karya atau pendapat orang lain yang pernah ditulis dan diterbitkan, kecuali secara tertulis penulis mengutip sebagai referensi dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Semarang, Januari 2003

  
**ALI HANAN FATAH**

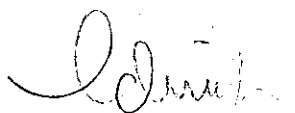


**LEMBAR PENGESAHAN  
TESIS**

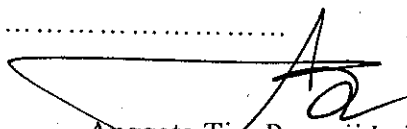
**STUDI PERSIAPAN  
PENERAPAN MANAJEMEN BERBASIS SEKOLAH  
DI KABUPATEN BANJARNEGARA**

**NAMA : ALI HANAN FATAH**  
**NIM : D.4E000007**

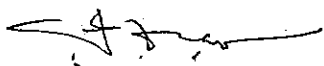
TESIS TELAH DISYAHKAN  
TANGGAL: .....



Drs. Edi Santoso, SU  
Pembimbing I



Anggota Tim Penguji Lain  
Drs. Ali Mufiz, MPA  
Penguji I



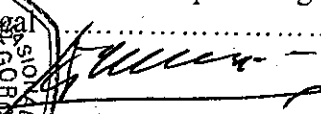
Drs. Hardi Warsono, MTP  
Pembimbing II

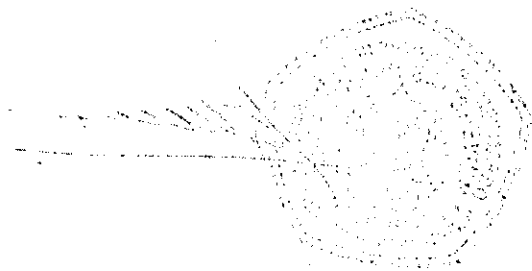


Drs. Fathurachman, M.Si  
Penguji II

Tesis ini telah diterima sebagai salah satu  
persyaratan untuk memperoleh gelar Magister  
Tanggal .....



  
Drs. Y. Warella, MPA, Ph.D  
Ketua Program Studi MAP



## DAFTAR ISI

ABSTRACT.....	i
ABSTRAKSI.....	ii
RINGKASAN .....	iii
LEMBAR PERSETUJUAN .....	iv
LEMBAR PENGESAHAN .....	v
KATA PENGANTAR .....	viii
DAFTAR ISI .....	ix
DAFTAR TABEL .....	xiii

### **BAB I PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang .....	1
B. Identifikasi dan Perumusan Masalah .....	12
C. Tujuan Penelitian .....	19
D. Kegunaan Penelitian .....	20

### **BAB II KAJIAN PUSTAKA**

A. Landasan Reori .....	23
1. Kinerja Pendidikan Dasar Menengah .....	24
2. Pemahaman Regulasi .....	33
3. Organisasi dan Manajemen .....	37
4. Responsibilitas .....	39
B. Hipotesis .....	41

### **BAB III METODE PENELITIAN**

A. Rancangan Penelitian .....	42
B. Ruang Lingkup .....	42
C. Lokasi Penelitian .....	43
D. Variabel Penelitian .....	43
E. Populasi dan Sampel .....	49
F. Metode Pengumpulan Data .....	50
G. Teknik Analisis Data .....	64

### **BAB IV HASIL PENELITIAN**

A. Deskripsi Objek Penelitian .....	66
B. Deskripsi Variabel Penelitian .....	72
D. Diskusi / Pembahasan .....	122





## **BAB V KESIMPULAN DAN SARAN**

A. Kesimpulan .....	128
B. Saran .....	131

## **LAMPIRAN**



## DAFTAR TABEL

1. Kewenangan Kewenangan Pendidikan .....	8
2. Sebaran Populasi dan Sampel Penelitian .....	49
3. Validitas Instrumen Kinerja Pendidikan .....	54
4. Validitas Instrumen Pelaksanaan PAKEM oleh Guru .....	55
5. Validitas Instrumen Pelaksanaan PAKEM oleh Siswa .....	56
6. Validitas Instrumen Pemahaman Regulasi .....	58
7. Validitas Instrumen Organisasi dan Manajemen .....	59
8. Validitas Instrumen Responsibilitas .....	61
9. Kriteria Reliabilitas Instrumen .....	62
10. Jumlah Sekolah Dasar dan Madrasah Ibtidaiyah .....	67
11. Jumlah Kelas Sekolah Dasar dan Madrasah Ibtidaiyah.....	68
12. Jumlah Guru Sekolah Dasar dan Madrasah Ibtidaiyah .....	69
13. Jumlah SLTP dan Madrasah Tsanawiyah .....	70
14. Jumlah Kelas SLTP dan Madrasah Tsanawiyah .....	71
15. Deskripsi Upaya Sekolah Dalam Pencapaian Visi dan Misi .....	73
16. Deskripsi Sinergi Komponen Sekolah .....	75
17. Deskripsi Sosialisasi Tujuan Sekolah .....	76
18. Deskripsi Operasional Tujuan Sekolah .....	77
19. Deskripsi Keseimbangan Kegiatan Sekolah .....	79
20. Deskripsi Tingkat Efisiensi Sekolah .....	80
21. Deskripsi Relevansi Kegiatan Sekolah Dengan Tuntutan Masyarakat .....	81
22. Kriteria Analisis Sub Variabel Penyelenggaraan Pendidikan .....	82
23. Deskripsi Sub Variabel Penyelenggaraan Pendidikan .....	83
24. Deskripsi Aktivitas Guru Dalam Pembelajaran .....	86
25. Deskripsi Indikator Aktivitas Guru Pelaksanaan PAKEM .....	87
26. Deskripsi Kreativitas Guru Dalam Pembelajaran .....	88
27. Deskripsi Efektivitas Guru Dalam Pembelajaran .....	89
28. Deskripsi Pengembangan Pembelajaran Menyenangkan .....	91
29. Kriteria Analisis Sub Variabel Pelaksanaan PAKEM Oleh Guru .....	92
30. Deskripsi Sub Variabel Pelaksanaan PAKEM Oleh Guru .....	92
31. Deskripsi Aktivitas Pembelajaran Siswa .....	96
32. Deskripsi Kreativitas Pembelajaran Siswa .....	98
33. Deskripsi Pembelajaran Siswa Yang Menyenangkan .....	99
34. Deskripsi Efektivitas Pembelajaran Siswa .....	100
35. Deskripsi Keseluruhan Sub Variabel Pelaksanaan PAKEM Siswa .....	101
36. Deskripsi Sub Variabel Pelaksanaan PAKEM Oleh Siswa .....	102
37. Deskripsi Persepsi Dampak Otda Terhadap Pengembangan Sekolah .....	104
38. Deskripsi Persepsi Dampak Otda Terhadap Kepegawaian .....	105



39. Deskripsi Persepsi Dampak Otda Terhadap Standar Pendidikan .....	106
40. Kriteria Variabel Pemahaman Regulasi .....	108
41. Deskripsi Variabel Pemahaman Regulasi .....	108
42. Kriteria Analisis Variabel Organisasi Manajemen Pendidikan .....	111
43. Deskripsi Variabel Organisasi Manajemen Pendidikan .....	111
44. Kriteria Analisis Variabel Sumber Daya Manusia .....	112
45. Deskripsi Variabel Kualitas SDM .....	113
46. Kriteria Analisis Variabel Sarana Prasarana .....	114
47. Deskripsi Variabel Sarana Prasarana .....	114
48. Kriteria Analisis Variabel Pendanaan Dan Keterlibatan Masyarakat.....	115
49. Deskripsi Variabel Pendanaan Dan Keterlibatan Masyarakat .....	116
50. Kriteria Analisis Variabel Responsibilitas .....	117
51. Deskripsi Variabel Responsibilitas .....	117
52. Hasil Analisis Silang Pemahaman Regulasi Dengan Kinerja Pendidikan ...	118
53. Hasil Analisis Silang Organisasi Manajemen Dengan Kinerja Pendidikan ..	120



## KATA PENGANTAR

Rasa syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas segala rahmat dan hidayahNya, sehingga penelitian ini dapat terselesaikan.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa penyelesaian karya ilmiah ini karena dukungan dan bantuan dari berbagai pihak, oleh karena itu penulis mengucapkan terima kasih.

Pertama, Bapak Drs. Edi Santoso, S.U. dan Bapak Drs. Hardi Warsono, MTP yang telah memberikan bimbingan dengan penuh kesabaran sampai terselesaikannya karya ilmiah ini.

Kedua, Pimpinan dan seluruh staf yang ada di lingkungan Program Adiministrasi Publik Pasca Sarjana Universitas Diponegoro yang telah memberikan pelayanan dan bantuan selama studi dan penyelesaian karya ilmiah ini.

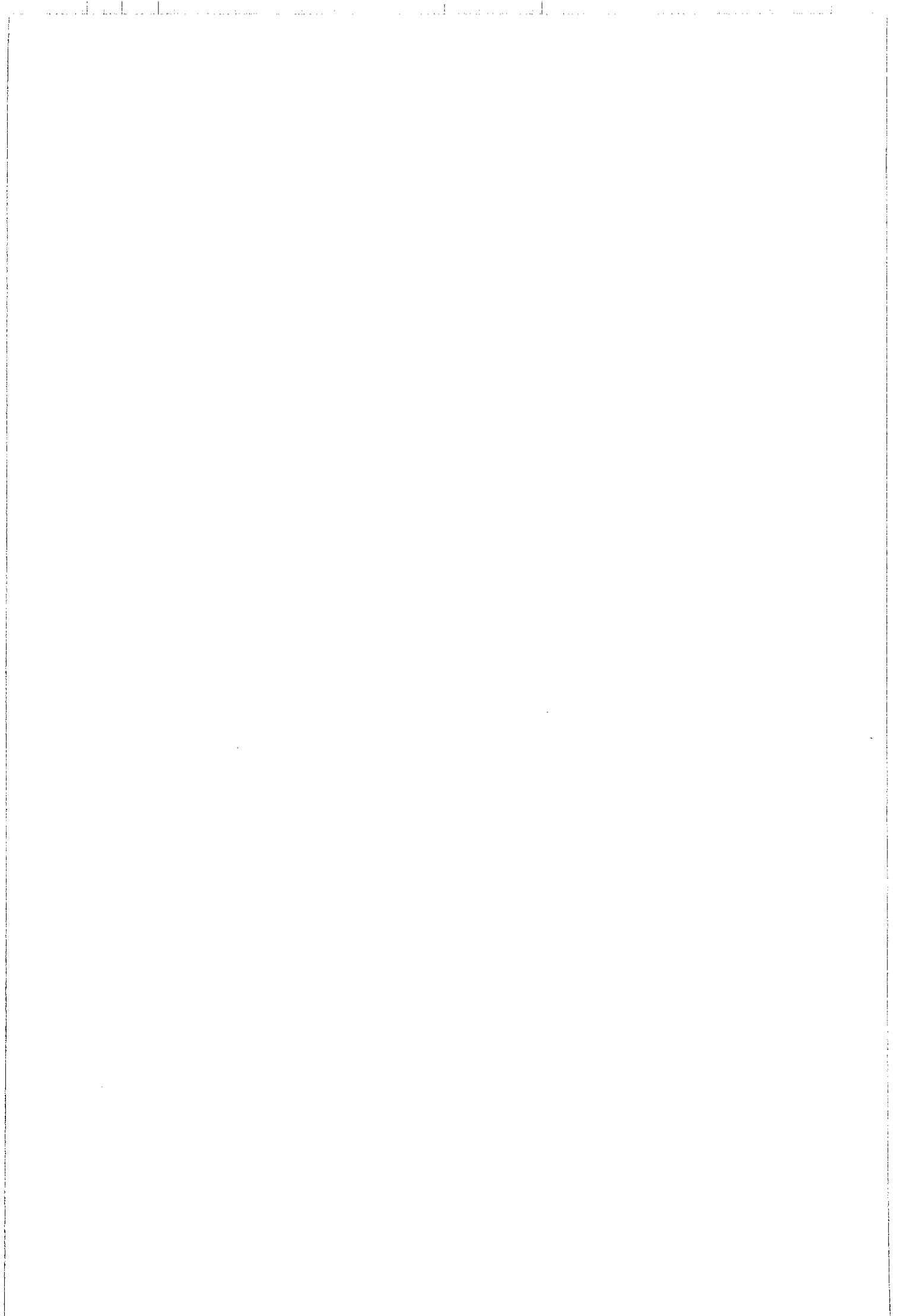
Ketiga, Seluruh Responden dan Informan di kalangan dunia pendidikan Kabupaten Banjarnegara yang telah memberikan bantuan dalam pengumpulan data penelitian.

Keempat, secara khusus kepada isteri dan anak tercinta yang telah memberikan dorongan, sehingga dapat terselesaikan penelitian ini.

Penulis berharap agar semua kebaikan yang telah diberikan mendapat imbalan yang setimpal.

Semarang, Desember 2002

Penulis





## DAFTAR ISI

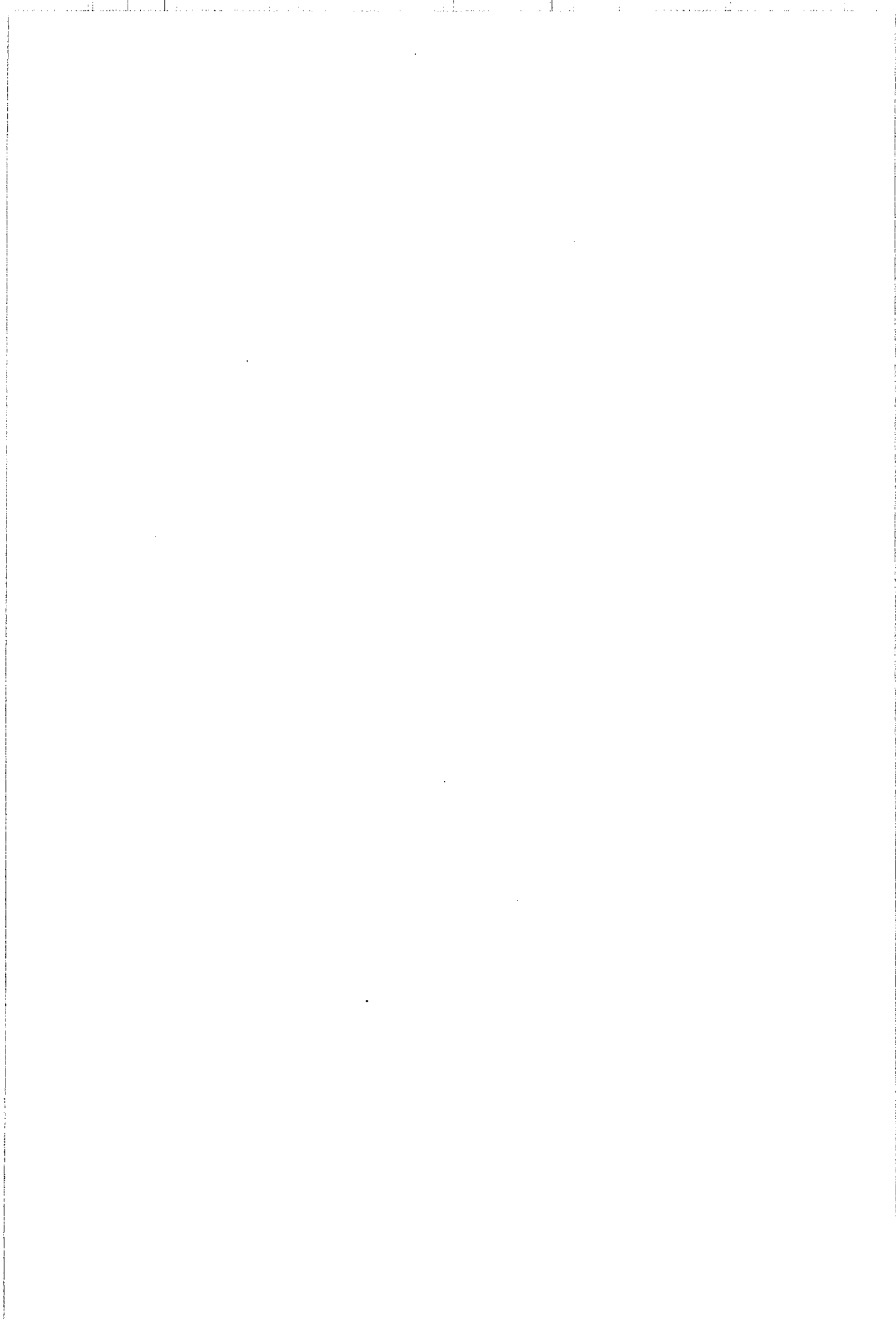
ABSTRACT.....	i
RINGKASAN .....	ii
LEMBAR PERSETUJUAN .....	iv
LEMBAR PENGESAHAN .....	v
KATA PENGANTAR .....	viii
DAFTAR ISI .....	ix
DAFTAR TABEL .....	xiii
 <b>BAB I    PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Identifikasi dan Perumusan Masalah .....	12
C. Tujuan Penelitian .....	19
D. Kegunaan Penelitian .....	20
 <b>BAB II   KAJIAN PUSTAKA</b>	
A. Landasan Reori .....	23
1. Kinerja Pendidikan Dasar Menengah .....	24
2. Pemahaman Regulasi .....	33
3. Organisasi dan Manajemen .....	37
4. Responsibilitas .....	39
B. Hipotesis .....	41
 <b>BAB III   METODE PENELITIAN</b>	
A. Rancangan Penelitian .....	42
B. Ruang Lingkup .....	42
C. Lokasi Penelitian .....	43
D. Variabel Penelitian .....	43
E. Populasi dan Sampel .....	49
F. Metode Pengumpulan Data .....	50
G. Teknik Analisis Data .....	64
 <b>BAB IV   HASIL PENELITIAN</b>	
A. Deskripsi Objek Penelitian .....	66
B. Deskripsi Variabel Penelitian .....	72
D. Diskusi / Pembahasan .....	122



## **BAB V KESIMPULAN DAN SARAN**

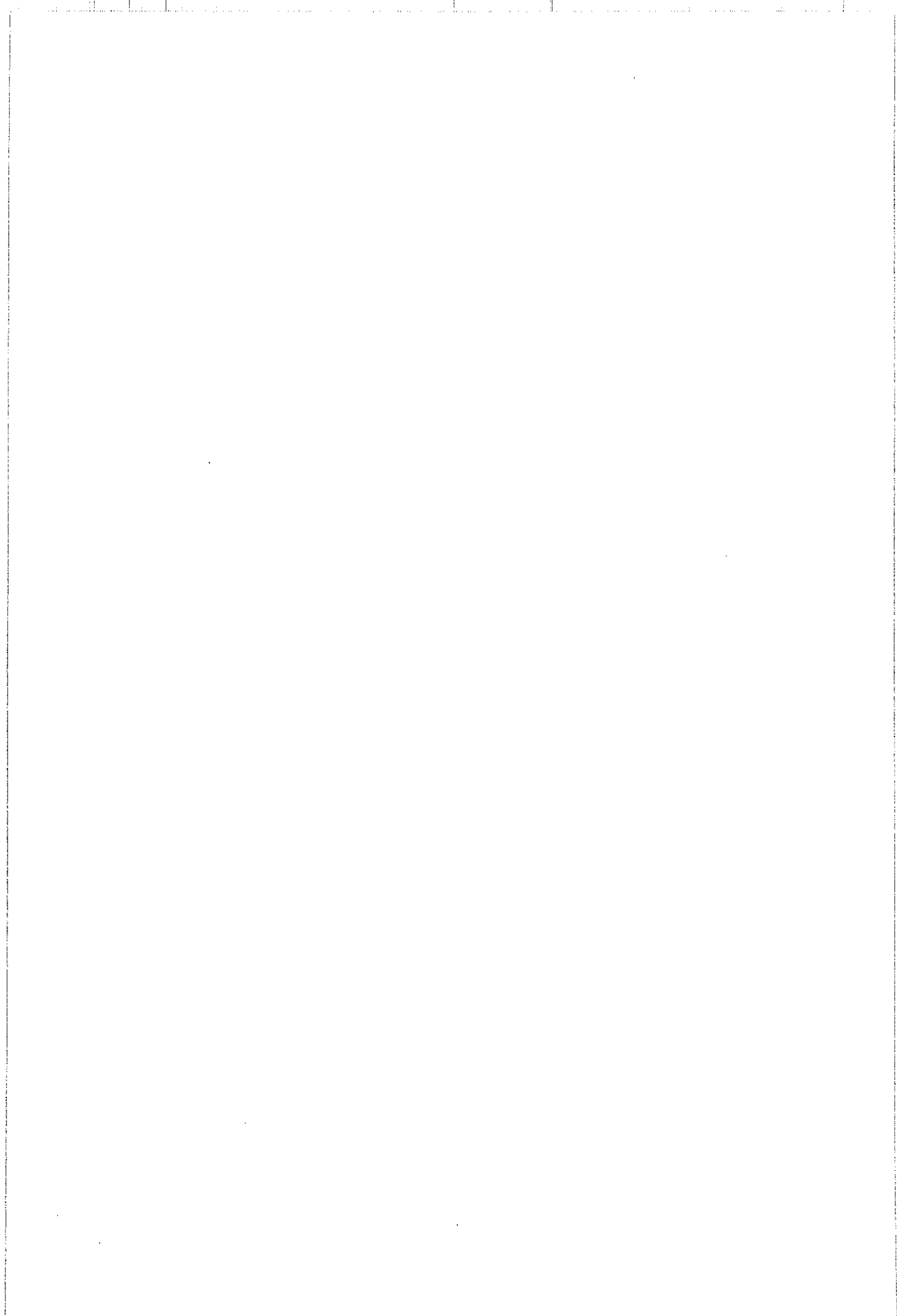
A. Kesimpulan .....	129
B. Saran .....	132

## **LAMPIRAN**

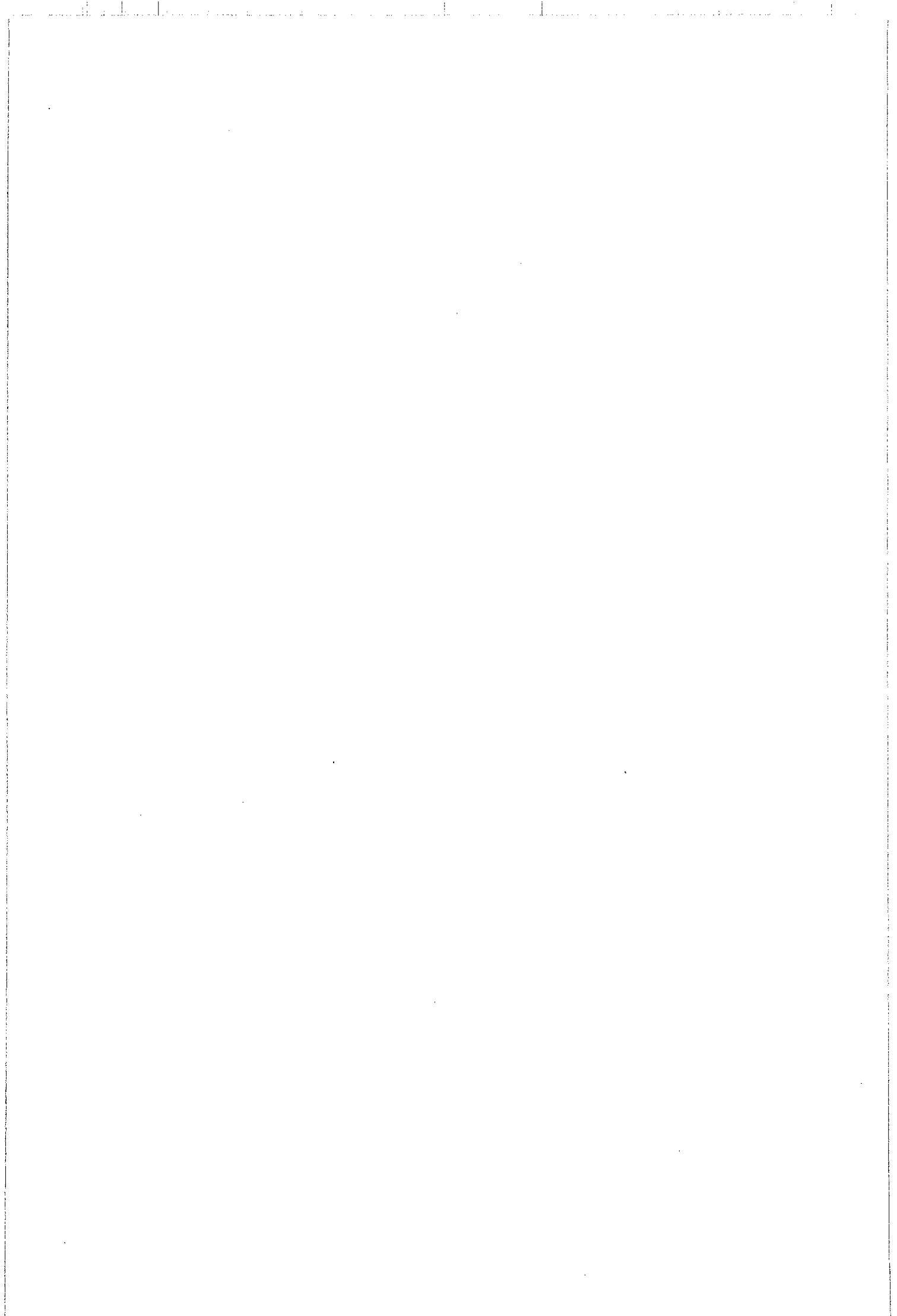


## DAFTAR TABEL

1. Kewenangan Kewenangan Pendidikan .....	8
2. Sebaran Populasi dan Sampel Penelitian .....	49
3. Validitas Instrumen Kinerja Pendidikan.....	54
4. Validitas Instrumen Pelaksanaan PAKEM oleh Guru .....	55
5. Validitas Instrumen Pelaksanaan PAKEM oleh Siswa .....	56
6. Validitas Instrumen Pemahaman Regulasi .....	58
7. Validitas Instrumen Organisasi dan Manajemen .....	59
8. Validitas Instrumen Responsibilitas .....	61
9. Kriteria Reliabilitas Instrumen .....	62
10. Jumlah Sekolah Dasar dan Madrasah Ibtidaiyah .....	67
11. Jumlah Kelas Sekolah Dasar dan Madrasah Ibtidaiyah.....	68
12. Jumlah Guru Sekolah Dasar dan Madrasah Ibtidaiyah .....	69
13. Jumlah SLTP dan Madrasah Tsanawiyah .....	70
14. Jumlah Kelas SLTP dan Madrasah Tsanawiyah .....	71
15. Deskripsi Upaya Sekolah Dalam Pencapaian Visi dan Misi .....	73
16. Deskripsi Sinergi Komponen Sekolah .....	75
17. Deskripsi Sosialisasi Tujuan Sekolah .....	76
18. Deskripsi Operasional Tujuan Sekolah .....	77
19. Deskripsi Keseimbangan Kegiatan Sekolah .....	79
20. Deskripsi Tingkat Efisiensi Sekolah .....	80
21. Deskripsi Relevansi Kegiatan Sekolah Dengan Tuntutan Masyarakat .....	81
22. Kriteria Analisis Sub Variabel Penyelenggaraan Pendidikan .....	82
23. Deskripsi Sub Variabel Penyelenggaraan Pendidikan .....	83
24. Deskripsi Aktivitas Guru Dalam Pembelajaran .....	86
25. Deskripsi Indikator Aktivitas Guru Pelaksanaan PAKEM .....	87
26. Deskripsi Kreativitas Guru Dalam Pembelajaran .....	88
27. Deskripsi Efektivitas Guru Dalam Pembelajaran .....	89
28. Deskripsi Pengembangan Pembelajaran Menyenangkan .....	91
29. Kriteria Analisis Sub Variabel Pelaksanaan PAKEM Oleh Guru .....	92
30. Deskripsi Sub Variabel Pelaksanaan PAKEM Oleh Guru .....	92
31. Deskripsi Aktivitas Pembelajaran Siswa .....	96
32. Deskripsi Kreativitas Pembelajaran Siswa .....	98
33. Deskripsi Pembelajaran Siswa Yang Menyenangkan .....	99
34. Deskripsi Efektivitas Pembelajaran Siswa .....	100
35. Deskripsi Keseluruhan Sub Variabel Pelaksanaan PAKEM Siswa .....	101
36. Deskripsi Sub Variabel Pelaksanaan PAKEM Oleh Siswa .....	102
37. Deskripsi Persepsi Dampak Otda Terhadap Pengembangan Sekolah .....	104
38. Deskripsi Persepsi Dampak Otda Terhadap Kepegawaian .....	105
39. Deskripsi Persepsi Dampak Otda Terhadap Standar Pendidikan .....	106



40. Kriteria Variabel Pemahaman Regulasi .....	108
41. Deskripsi Variabel Pemahaman Regulasi .....	108
42. Kriteria Analisis Variabel Organisasi Manajemen Pendidikan .....	111
43. Deskripsi Variabel Organisasi Manajemen Pendidikan .....	111
44. Kriteria Analisis Variabel Sumber Daya Manusia .....	112
45. Deskripsi Variabel Kualitas SDM .....	113
46. Kriteria Analisis Variabel Sarana Prasarana .....	114
47. Deskripsi Variabel Sarana Prasarana .....	114
48. Kriteria Analisis Variabel Pendanaan Dan Keterlibatan Masyarakat.....	115
49. Deskripsi Variabel Pendanaan Dan Keterlibatan Masyarakat .....	116
50. Kriteria Analisis Variabel Responsibilitas .....	117
51. Deskripsi Variabel Responsibilitas .....	117
52. Hasil Analisis Silang Pemahaman Regulasi Dengan Kinerja Pendidikan ...	118
53. Hasil Analisis Silang Organisasi Manajemen Dengan Kinerja Pendidikan ..	120





40. Kriteria Variabel Pemahaman Regulasi .....	108
41. Deskripsi Variabel Pemahaman Regulasi .....	108
42. Kriteria Analisis Variabel Organisasi Manajemen Pendidikan .....	111
43. Deskripsi Variabel Organisasi Manajemen Pendidikan .....	111
44. Kriteria Analisis Variabel Sumber Daya Manusia .....	112
45. Deskripsi Variabel Kualitas SDM .....	113
46. Kriteria Analisis Variabel Sarana Prasarana .....	114
47. Deskripsi Variabel Sarana Prasarana .....	114
48. Kriteria Analisis Variabel Pendanaan Dan Keterlibatan Masyarakat.....	115
49. Deskripsi Variabel Pendanaan Dan Keterlibatan Masyarakat .....	116
50. Kriteria Analisis Variabel Responsibilitas .....	117
51. Deskripsi Variabel Responsibilitas .....	117
52. Hasil Analisis Silang Pemahaman Regulasi Dengan Kinerja Pendidikan ...	118
53. Hasil Analisis Silang Organisasi Manajemen Dengan Kinerja Pendidikan ..	120

58

## DAFTAR LAMPIRAN

Nomor

1. Instrumen Penelitian .....
2. Uji Validitas .....
3. Uji Reliabilitas .....
4. Uji Deskriptif .....
5. Uji Tabel Silang .....



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. LATAR BELAKANG

Diakui atau tidak, implementasi Undang - Undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah telah dan akan senantiasa, memicu perubahan dalam tubuh birokrasi pemerintahan di Indonesia. Apalagi kemudian ditambah dengan faktor sosial, dimana, masyarakat telah semakin cerdas, untuk menuntut kerja - kerja *state aparatur* yang lebih berkualitas, efektif dan efisien dalam berbagai bidang, termasuk di dalamnya bidang pendidikan.

Secara konseptual, wacana, tersebut kemudian dikonstruksi dalam bentuk *good government* dan *clean governmance*. Berbicara dalam konteks *good governance* -- sebagai manifesto birokrasi kontemporer, cita ideal tersebut hanya dapat direalisasikan dengan adanya dukungan yang kuat, berupa kuatnya sumber daya dan hubungan sinergis antar institusi birokrasi. Seperti kita ketahui, paradigma *good governance* menekankan arti penting kesejajaran hubungan antara institusi negara dengan masyarakat.<sup>1</sup> Selama, relasi antar lembaga masih bersifat politis sub ordinatif, bisa dipastikan akan tercipta stagnasi fungsi lembaga, yang berujung pada lemahnya pemberdayaan rakyat secara umum.

---

<sup>1</sup> Rochman Achwan, *Good Governance, Manifesto Politik Abad ke - 21*, Artikel pada HARIAN KOMPAS, Hari Rabu, Tanggal 28 Juni 2000 hal 39.

Arti *good* dalam *good governance* sendiri mengandung dua pengertian, pertama nilai - nilai yang menjunjung tinggi keinginan atau kehendak rakyat dan nilai - nilai yang dapat meningkatkan kemampuan rakyat dalam pencapaian tujuan nasional. Sedangkan pengertian kedua adalah aspek fungsional dari pemerintahan yang efektif dan efisien dalam melaksanakan tugasnya guna mencapai tujuan tersebut. Berdasar pengertian ini, *good governance*, berorientasi pada ; pertama : orientasi ideal negara yang diarahkan pada pencapaian tujuan nasional, kedua, pemerintahan yang berfungsi secara ideal dalam mencapai tujuan dan cita nasional.<sup>2</sup>

Jika kita gagas dalam wilayah birokrasi pemerintahan, realisasi dari konsep *good governance* tentunya bisa dicapai dengan mengoptimalkan kinerja para pelaku birokrasi.<sup>3</sup> Tanpa didukung oleh tenaga yang berkualitas, bisa dipastikan birokrasi pemerintahan tidak akan dapat menjalankan fungsinya secara maksimal, di tengah tuntutan problematika rakyat yang semakin multikompleks.

Jika kita analisis, implementasi UU Nomor 22 tahun 1999, PP Nomor 25 tahun 2000 dan konsep *School Based Management* khususnya bidang pendidikan sendiri masih menyisakan berbagai persoalan. Perubahan

<sup>2</sup> Lembaga Administrasi Negara dan BPKP, *Modul Akuntabilitas dan Good Governance*, tahun hal.6

<sup>3</sup> Seperti kita ketahui, pada saat berkuasa orde baru, birokrasi Indonesia telah mengalami pembusukan yang amat parah. Birokrasi tidak lagi bergerak pada wilayah netral melayani dan memberdayakan masyarakat, namun justru menjadi alat dan buldozer politik (bersama ABRI) untuk kepentingan regim penguasa. Monoloyalitas pada Golkar oleh pegawai negeri jelas menjadi awal bagi kehancuran birokrasi, dimana rekrutmen tidak didasar aspek profesionalisme kerja, namun justru berangkat dari pertimbangan politik mempertahankan kekuasaan. Kolusi, korupsi dan nepotisme merupakan implikasi riil dari paradigma kekuasaan birokrasi Indonesia.

paradigma boleh dan dapat terjadi dalam penyelenggaraan Tata Usaha Negara, tetapi perubahan itu harus dilaksanakan dengan konsep yang jelas, dengan kerangka waktu yang cukup dengan perhitungan akan konsekuensi dan resiko yang jelas. Mengubah paradigma pemerintahan daerah dengan asas desentralisasi, dekonsentrasi, *medebewind*, serta *Vrij Bestuur* yang sudah berlaku selama lebih dari 50 tahun, tentu tidak seperti membalik telapak tangan saja. Apalagi semua pedomannya belum selesai dikerjakan persektor atau departemen.

Berkenaan dengan keberadaan UU Nomor 22 tahun 1999, PP Nomor 25 tahun 2000 dan konsep *School Based Management* sendiri ada beberapa pihak yang menyatakan sebagai produk yang tergesa-gesa oleh pemerintahan Habibie, yang oleh pengamat dikatakan sebagai upaya meningkatkan dukungan politik pada waktu itu.<sup>4</sup>

Lebih jauh dikatakan bahwa ketidaksiapan perangkat operasional di tingkat bawah (misalnya Peraturan Pemerintah dll.) dalam kebijakan otonomi daerah membawa implikasi serius pada terseok-seoknya implementasi kebijakan otonomi daerah ini. Oleh karena kondisi ketergesa-gesaan ini, beberapa pertanyaan pokok dalam otonomi daerah dan implikasinya tidak terjawab secara tuntas, misalnya:

1. Apakah secara ilmiah konsep otonomi daerah sama dengan desentralisasi daerah atau apakah konsep otonomi pendidikan sama dengan desentralisasi pendidikan ?

2. Apakah otonomi daerah bagian dari desentralisasi daerah, atau justru desentralisasi bagian dari otonomi daerah ?
3. Apakah konsekuensi dan implikasi lebih jauh dari adopsi konsep otonomi daerah itu di bidang pendidikan ?
4. Apakah konsekuensi dan implikasi lebih jauh dari konsep desentralisasi daerah itu di bidang pendidikan ?

Sederet pertanyaan elementer tersebut belum dapat terjawab secara tuntas. Namun terlepas dari hal tersebut, otonomi daerah setidaknya telah menjadi titik harapan baru bagi pembukaan diskursus dan sekaligus praktek birokrasi yang mengandung paradigma baru, yakni paradigma yang lebih berorientasi pada pemerintahan desentralistik. Selanjutnya Muhammad Adnan (dalam Smith, Turner dan Hulme)<sup>5</sup> mengungkap adanya enam manfaat dan. keuntungan desentralisasi demokratik, yakni :

1. *pendidikan politik*, mengajarkan kepada masyarakat dan penduduk tentang peran debat politik, penyaringan anggota dewan, perwakilan rakyat dan hakekat kebijakan, perencanaan dan penganggaran dalam demokrasi.
2. *training kepemimpinan politik*, menciptakan persemaian bagi prospektus pemimpin politik untuk mengembangkan kemahiran dalam penentuan kebijakan, operasi dan anggaran partai politik, yang akan memberikan hasil meningkatnya kualitas politisi nasional

---

<sup>4</sup> Tequh Yuwono (Editor), *Manajemen Otonomi Daerah Berdasar Paradigma Baru*, Diponegoro University, Semarang, 2001 hal 20 – 21

<sup>5</sup> Idem hal 35 – 36



3. *stabilitas politik*, yang terpelihara dengan partisipasi dalam politik formal, melalui pemilu dan kegiatan. lainnya, sehingga memperkuat kepercayaan kepada pemerintah dan. menciptakan harmoni sosial serta spirit pada masyarakat. Hal ini juga berkait dengan terciptanya mekanisme yang bisa mempersiapkan masyarakat untuk menghadapi perubahan sosial dan ekonomi sebagai implikasi dari pembangunan.
4. *ekualitas politik*, meningkatnya partisipasi politik akan mengurangi kemungkinan konsentrasi kekuasaan. Kekuasaan politik akan terdistribusi secara luas sehingga menciptakan mekanisme desentralisasi dapat memenuhi kebutuhan masyarakat miskin dan kurang beruntung.
5. *akuntabilitas*, yang meningkat karena anggota DPRD memiliki akses yang lebih dekat kepada rakyat sehingga lebih mudah meminta pertanggungjawaban baik kebijakan maupun hasilnya dibandingkan dengan pemimpin politik nasional.
6. *respon* pemerintah dapat diperbaiki karena anggota DPRD berada di tempat paling pas untuk mengetahui pasti kebutuhan daerah sesungguhnya dan bagaimana dapat mewujudkannya dalam cara yang paling efektif

Lebih jauh Turner berpendapat bahwa keenam manfaat di atas masih dapat ditambah lagi dengan lima manfaat lainnya, yaitu :

1. perencanaan khusus secara lokal akan lebih mudah dilaksanakan dengan menggunakan informasi terkini dan detail yang hanya tersedia di tingkat lokal (*locally specific plans*)

2. koordinasi antar organisasi dapat dilakukan pada level daerah (*inter organizational coordination*)
3. eksperimentasi dan inovasi yang didorong oleh desentralisasi akan meningkatkan peluang strategi pembangunan yang lebih efektif (*experimentation and innovation*)
4. motivasi personel di daerah akan meningkat seiring dengan tanggungjawab yang dimiliki untuk mengembangkan program yang akan mereka kelola (*motivation offield - level personel*)
5. pengurangan beban pekerjaan pada, agen atau kantor cabang pemerintahan pusat di daerah akan melepaskan mereka dari rutinitas pengambilan keputusan dan memberi mereka waktu yang lebih untuk menentukan isu - isu strategis yang akan memperbaiki kualitas kebijakan.

Paparan di atas menunjukkan betapa kebijakan desentralisasi akan membawa implikasi yang sedemikian signifikan dan luas terhadap berbagai persoalan fungsi birokrasi pemerintahan, aparat pelaksana dan out put yang dihasilkan oleh proses tersebut. Implikasi ini tentu saja terjadipada berbagai bidang kewenangan. Salah satu focus bidang kewenangan dalam kajian ini adalah kewenangan bidang pendidikan. Eksplorasi wacana, tentunya akan menjadi asupan berharga dalam menilai kinerja birokrasi pendidikan sebagai organisasi pelayanan publik setelah diimplementasikannya UU Nomor 22 tahun 1999, PP 25 tahun 2000 dan penerapan konsep MBS (manajemen berbasis sekolah). Seperfi kita pahami bersama, peningkatan kualitas mutu

layanan tentunya menjadi agenda kedua utama otonomi daerah, jika dilihat dari perspektif fungsi birokrasi, pun demikian pula di bidang pendidikan. Terdapat banyak hal yang terkait dengan proses peningkatan kualitas, mutu layanan bidang pendidikan, diantaranya aspek **regulasi, responsibilitas**, serta aspek **organisasi dan manajemen (sarana prasarana, keuangan, kelibatan masyarakat)** dari para pelaksana pendidikan itu sendiri.

Kualitas mutu layanan sendiri saat ini tengah menjadi isu strategis di tengah merosotnya kepercayaan masyarakat terhadap birokrasi setelah sekian lama mengalami disfungsi. Seperti kita ketahui, birokrasi di Indonesia, hampir selama 30 tahun lebih telah menjadi alat politik para penguasa, bukan menjadi alat bagi negara untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Di **bidang pendidikan**, pelaksanaan otonomi dapat terlihat dari pelaksanaan kewenangan pendidikan antara pemerintah pusat, propinsi dan pemerintah Kabupaten - Kota. Dari PP nomor 25 tahun 2000 bidang pendidikan diketahui ada 10 (sepuluh) sub bidang kewenangan yang ditangani Pemerintah Pusat dan ada 6 (enam) sub bidang kewenangan yang ditangani Propinsi. Sisa dari 16 sub bidang kewenangan di bidang pendidikan inilah kemudian yang ditangani oleh Kabupaten dan Kota, Pembagian kewenangan tersebut nampak pada tabel berikut:

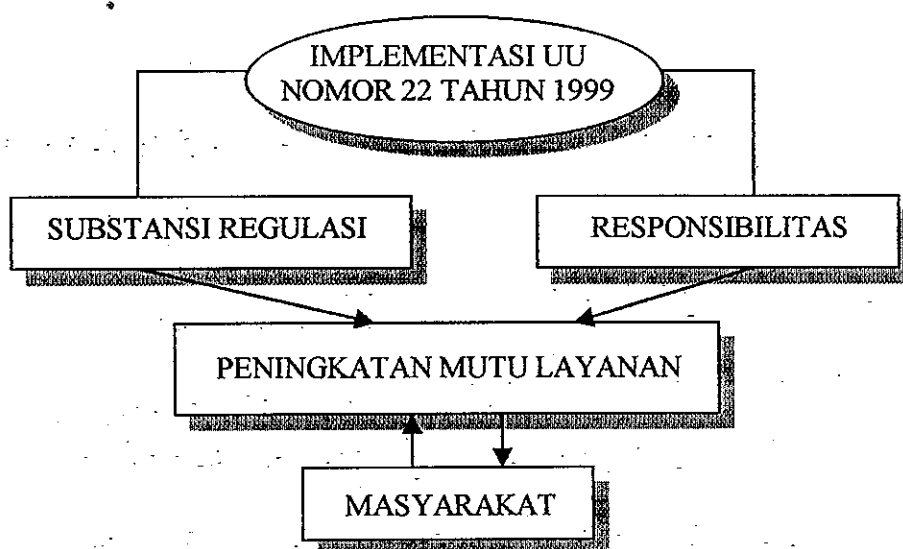
**Tabel: 1**  
**KEWENANGAN BIDANG PENDIDIKAN**  
**ANTARA PEMERITAH PUSAT DAN PEMERINTAH PROPINSI**

NO	KEWENANGAN PEMERINTAH PUSAT	NO	KEWENANGAN PEMERINTAH PROPINSI
1	Penetapan standar kompetensi siswa dan warga bekajar serta pengaturan	1	Penetapan tentang kebijakan tentang Penerimaan siswa dan mahasiswa dari masyarakat minoritas, terbelakang dan/ atau tidak mampu
2	Penetapan standar mata pelajaran pokok	2	Penyediaan bantuan pengadaan buku pelajaran pokok/ modul pendidikan untuk taman kanak-kanak pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan luar sekolah
3	Penetapan syarat perolehan dan penggunaan gelar akademik		
4	Penetapan pedoman Pembiayaan Penyelenggaraan pendidikan		
5	Penetapan persyaratan penerimaan, Perpindahan sertifikat siswa, warga Belajar dan mahasiswa	3	Mendukung/ membantu penyelenggaraan pendidikan tinggi selain pengaturan kurikulum, akreditasi dan pengangkatan tenaga akademis
6	Penetapan persyaratan permintaan/ zoning, pencarian, Pemanfaatan, pemindahan, Penggandaan, system pengamanan dan kepemilikan benda cagar budaya serta persyaratan penelitian arkeologi		
7	Pemanfaatan hasil penelitian Arkeologi nasional serta pengolahan Museum nasional, galeri nasional, Pemanfaatan naskah sumber arsip, dan monumen yang diakui secara Internasional	4	Penyelenggaraan museum propinsi, suaka peninggalan sejarah, kepurbakalaan, kajian sejarah dan nilai tradisional serta pengembangan bahasa dan budaya daerah
4	Penetapan kalender pendidikan dan Jumlah jam belajar efektif setiap Tahun bagi pendidikan dasar, Menengah dan luar sekolah	5	Penyelenggaraan sekolah luar biasa dan balai pelatihan dan/ atau Penataran guru
9	Pengaturan dan pengembangan Pendidikan tinggi, pendidikan jarak jauh serta pengaturan sekolah Internasional	6	Pertimbangan pembukaan dan Penutupan perguruan tinggi
10	Pembinaan dan pengembangan bahasa dan sastra Indonesia		

Sumber : PP Nomor 25 tahun 2000

Implementasi peraturan baru di bidang pendidikan diharapkan tersebut akan membawa perubahan baru bagi birokrasi pendidikan untuk mengubah citra dirinya, dan sekaligus mengoptimalkan fungsi elementernya. Pola hubungan antara peraturan dengan out put itu sendiri dapat dilihat pada bagan berikut :

**Gambar 01**  
**Pola Hubungan Implementasi Undang - Undang Nomor 22 tahun 1999, Variabel Pengaruh dengan Peningkatan Kualitas Mutu Layanan**



Bagan tersebut menunjukkan pola relasi Undang - Undang sebagai input perubahan dengan variabel isi peraturan dan responsibilitas aparat, dengan keluaran berupa peningkatan kualitas, mutu layanan birokrasi.

Masyarakat berfungsi sebagai variabel pengaruh lain, sebagai pengguna, dan sekaligus berfungsi sebagai umpan balik kebijakan. Di bidang pendidikan khususnya pendidikan dasar dan menengah pelaksanaan otonomi juga terlihat dari konsistensi pelaksanaan konsep MBS (management berbasis sekolah) atau *School Based Management*.

Dengan kata lain, jelas sudah bahwa implementasi Undang Undang Nomor 22 tahun 1999 bidang pendidikan ini dimaksudkan agar dapat meningkatkan pelayanan sekolah, karena pelaksanaannya didukung materi peraturan dan responsibilitas pelaksana pendidikan (*das sollen*). Namun kenyataan menunjukkan bahwa di Banjarnegara pelaksanaan kebijakan MBS tersebut masih terbentur pada berbagai persoalan seperti :

1. praktek budaya birokrasi pendidikan yang kurang mendukung. Hal ini terlihat dari belum ditemukan formula yang pas antara besarnya porsi kelibatan masyarakat dalam manajemen sekolah dengan pola dampingan instansi (Dinas Pendidikan) yang dulunya bersifat pembinaan dan kontrol.
2. terbatasnya dana, terlihat - dari minimnya dukungan dana pengembangan sekolah, baik yang berasal dari pemerintah maupun partisipasi masyarakat.
3. problem peraturan pelaksanaan, yang terlihat dari belum tertuangnya konsep MBS, selain implikasi penerapan Kebijakan otonomi Daerah di Bidang Pendidikan di Kabupaten Banjarnegara,

4. belum memadainya sarana prasarana terlihat dari sarana dan prasarana di beberapa sekolah di Kabupaten Banjarnegara yang masih terlihat sangat kurang memadai.
5. persoalan rendahnya kualitas SDM (baik pengelola maupun tenaga pendidik) sebagai pelaku kebijakan yang telah dirumuskan, serta
6. kecilnya pelibatan masyarakat dalam manajemen sekolah.

Variabel-variabel di atas senada dengan ungkapan Kaho (1997) bahwa untuk dapat melaksanakan tugas otonomi dengan sebaik-baiknya ada beberapa faktor yang perlu mendapat perhatian antara lain: faktor manusia pelaksana, faktor keuangan, faktor peralatan dan faktor organisasi dan manajemen.

Saat ini bisa terlihat beberapa akses negatif dari pelaksanaan kebijakan yang tidak dapat dipahami secara proporsional oleh aparatnya. Otonomi pendidikan kemudian dipaham sebagai kenaikan SPP, uang gedung sekolah favorit, dan sumbangan-sumbangan sekolah lainnya. Rakyat, sekalipun harus membayar biaya yang lebih tinggi, ternyata tidak mendapatkan imbalan pelayanan sekolah yang lebih memadai.

Pewacanaan dan sekaligus eksplorasi terhadap problem regulasi pendidikan dasar menengah pelaksana pendidikan, dan kualitas mutu layanan pendidikan merupakan sebuah langkah strategis untuk menemukan kebekuan terhadap semua persoalan pendidikan yang ada khususnya pendidikan dasar dan menengah di kabupaten Banjarnegara.

Berdasarkan latar belakang seperti telah terpapar di atas, penelitian yang berisi kaitan Aspek Organisasi Manajemen (Pemahaman Regulasi, Responsibilitas Pelaksana Pendidikan, SDK pelibatan masyarakat dalam manajemen sekolah, keuangan, dan sarana) dengan mutu layanan pendidikan dalam implementasi pelaksanaan kewenangan bidang pendidikan di Kabupaten Banjarnegara ini kami beri judul : **"Otonomi Pendidikan dan kaitannya dengan Kualitas Pendidikan Dasar Menengah (Studi Kasus Persiapan Pelaksanaan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS), di Kabupaten Banjarnegara"**.

## **B. IDENTIFIKASI DAN PERUMUSAN MASALAH**

### **1. IDENTIFIKASI MASALAH**

Masalah pada dasarnya merupakan kesenjangan antara kondisi yang senyatanya (*das Sein*) dengan kondisi yang diharapkan (*das Sollen*). Masalah juga dipahami sebagai kesenjangan antara sesuatu yang telah ada dengan sesuatu yang seharusnya ada. Identifikasi masalah merupakan daftar kendala atau hambatan dalam pelaksanaan sesuatu kegiatan. Adapun perumusan masalah itu sendiri dimaksudkan untuk mengungkapkan pokok - pokok pikiran secara jelas dan sistematis mengenai hakekat dari suatu masalah yang ada guna mempermudah proses pemahamannya.



Prof DR. Winarno Soerachmat<sup>6</sup> mengemukakan bahwa masalah adalah setiap kesulitan yang menggerakkan manusia untuk memecahkannya. Masalah ini harus dipandang sebagai suatu rintangan yang mestiharus dilalui dengan jalan mengatasinya. Masalah dimanifestasikan diri sebagai tantangan, oleh karena itu, dapat pula dikatakan bahwa problem atau masalah benar - benar dapat dipermasalahkan, serta adanya unsur yang menggerakkan kita untuk membahasnya.

Dalam penelitian ini, fokus kajian diarahkan pada kinerja atau kualitas mutu layanan pendidikan dasar dan menengah setelah diterapkannya Undang -Undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah di Kabupaten Banjarnegara. Seperti diketahui, implementasi UU tersebut telah membawa dampak, perubahan, dan sekaligus berbagai gugusan persoalan, demikian pula dalam pelaksanaan kewenangan bidang pendidikan. Adapun gugusan persoalan yang berkait dengan penelitian ini diantaranya adalah :

**a. Aspek Konsepsi dan Ketentuan Hukum**

1. Masih banyak PP dari UU No. 22 Tahun 1999 yang belum diterbitkan, mempersulit daerah untuk melaksanakan kewenangannya.
2. Terdapat ketentuan yang bertentangan dan membingungkan. Misalnya Menurut UU No. 22 Tahun 1999 bidang pendidikan tentang penanganan aset-aset kantor pendidikan yang tidak terpakai

---

<sup>6</sup> Winarno Soerachmat, Dasar dan Teknik Research Pengantar Metodologi Ilmiah, CV Tarsito,

masih belum jelas. Masih banyak juklak dan juknis yang belum diterbitkan Misalnya, pedoman kerjasama antar daerah, kerjasama daerah dengan propinsi, maupun kerjasama daerah dengan pusat.

3. Tidak semua daerah mampu menangani kewenangan di luar kewenangan wajib, sehingga ada urusan yang tidak ditangani oleh semua tingkatan pemerintah, misalnya hukum rakyat (pasal 11 ayat 2 UU No. 22 Tahun 1999).

#### **b. Aspek Kelembagaan**

1. PP No. 84 Tahun 2000 tidak mengatur eselon V yang sangat diperlukan di daerah. Hilangnya eselon V dikhawatirkan akan berakibat : (a) mengurangi kualitas pelayanan masyarakat di kecamatan maupun di kelurahan, dan (b) terpangkasnya jabatan dalam jumlah besar.
2. Tidak jelas pendefinisian dan persyaratan suatu lembaga menjadi dinas, badan maupun kantor menurut PP No. 84 Tahun 2000.
3. Pasal 20 PP no. 84 Tahun 2000 tentang kewenangan Kepala Daerah sebagai jabatan politis perlu dipertanyakan, karena pengembangan kanernya sebagai PNS terhenti di daerah, perannya sebagai salah satu perekat bangsa sulit berkembang, dan menumbuhkan arogansi kedaerahan.

4. Banyak instansi pusat dan propinsi di kabupaten yang belum menyerahkan P3D-nya, dengan tujuan agar kegiatan yang dilaksanakan selama ini dapat tetap dipertahankan.
5. Adanya keraguan dan ketidakjelasan dalam penyerahan kewenangan serta keterbatasan dalam penyerahan P3D, sehingga ada kemungkinan keberadaan instansi tersebut belum terwadahi.
6. Penyerahan Kandep dan cabang dinas atas tidak diawali dengan inventarisasi permasalahan dan belum diikuti dengan penyerahan P3D.
7. Masih ada perbedaan pandangan atas perubahan desa menjadi kelurahan secara otomatis diwilayah kota, baik dari segi kewenangan, sosial, budaya dan lain-lain.

**c. Aspek Kepegawaian**

1. Kesulitan melakukan relokasi pegawai karena jumlah pegawai berlebihan dan umumnya berkualifikasi yang hampir sama.
2. Belum seluruh PNS dan Kandep dan cabang dinas Propinsi Jawa Tengah dilimpahkan ke Kabupaten/kota, dan yang telah dilimpahkan SK perubahan status kepegawaiannya banyak yang terjadi kekeliruan dan belum diikuti dengan pengalihan dan/atau penyesuaian status BAKN.

3. Jumlah honorer daerah dan guru wiyata bakti yang berlebihan dan mengabdikan cukup lama, namun tidak mungkin diangkat menjadi PNS.
4. Belum adanya ketentuan tentang kompensasi maupun jabatan fungsional bagi PNS yang kehilangan jabatan struktural, dapat berdampak pada kinerjanya.

**d. Aspek Keuangan Daerah**

1. Masalah-masalah disekitar DAU, antara lain (a) Tidak jelasnya kriteria alokasi DAU Yang digunakan.; (b) Sebagian besar DAU, bahkan seluruhnya saja ada yang kurang, hanya digunakan untuk belanja rutin, khususnya belanja pegawai; (c) Masih ada dinas/ instansi yang gaji dan tunjangannya dibayar propinsi melalui DAU propinsi; (d) Instansi pusat di propinsi dan kabupaten yang belum menyerahkan P3D-nya tetap wajib dibiayai dari DAU; (e) Adanya pembiayaan instansi yang terlikuidasi secara bertahap dari DAU, mempersulit perhitungan dan penyesuaian anggarannya;
2. Masalah disekitar DAK, antara lain (a) Belum ada plafon definitif dana perimbangan dan DAK reboisasi yang jelas sehingga dapat diperhitungkan dalam anggaran daerah; (b) Jangka waktu DAK reboisasi diberikan kepada daerah.
3. Daerah tidak/ belum mendapat keuntungan dari pengelolaan sumber daya daerah yang dikelola BUMN.

4. DPRD dapat menentukan anggaran dan sekwan secara sewenang-wenang ) pasal 19 butir (g) jo Pasal 29 ayat 5 UU no. 22 Tahun 1999 dapat memberikan beban keuangan yang diluar batas kemampuan keuangan daerah.
5. Pajak yang dibagi hasilkan ke daerah adalah jenis pajak yang umumnya kecil bagi daerah, sementara jenis pajak lain yang potensial tidak dibagi hasilkan, misalnya PPN.

**e. Aspek Sarana dan Prasarana**

1. Belum adanya analisis standar kebutuhan sarana/ prasarana di instansi/ unit keda yang dapat digunakan sebagai pedoman pengadaan sarana/ prasarana.
2. Jumlah sarana/p rasarana yang ada belum sebanding dengan jumlah pegawai dan beban kerja.
3. Aset dari instansi pusat dan propinsi belum seluruhnya resmi diserahkan ke daerah, karena, data masih ditangani BPKP, sedangkan aset yang telah diserahkan kepada daerah belum dapat dimanfaatkan secara optimal karena penggunaannya menunggu penataan kelembagaan yang baru.
4. Audit yang dilakukan BPKP tidak mencakup semua inventans yang dimiliki instansi terlikuidasi, sehingga masih ada aset yang tidak diserahkan kepada daerah.

**f. Aspek Keterlibatan Masyarakat**

1. Masih rendahnya perhatian masyarakat untuk mengawasi pelaksanaan kekuasaan legislatif untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
2. Belum berubahnya pandangan masyarakat tentang tanggungjawab pelaksanaan pembangunan. Pembangunan dipandang sebagai tugas pemerintah, dan bukan tugas masyarakat.

Belum seluruh masyarakat siap melaksanakan otonomi bidang pendidikan, karena persepsi mereka bahwa otonomi pendidikan berarti kenaikan biaya pendidikan dan pungutan lain dalam rangka pelaksanaannya. Secara garis besar, berbagai persoalan tersebut di atas dapat disederhanakan dalam rumusan sebagai berikut :

1. Isi atau substansi regulasi dan responsibilitas pelaksana pendidikan yang kurang mendukung terhadap peningkatan kinerja pelayanan pendidikan yang diselenggarakan oleh birokrasi pemerintah (Pemda) di Kabupaten Banjarnegara
2. Bagaimana upaya yang dapat dilakukan dalam rangka memberdayakan atau mengoptimalkan birokrasi pendidikan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam perspektif kebijakan Otonomi Daerah di Kabupaten Banjarnegara.

## 2. PERUMUSAN MASALAH

Berdasar uraian latar belakang dan identifikasi terhadap permasalahan di atas, maka perumusan masalah yang dapat dikemukakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Bagaimanakah pemahaman penyelenggara pendidikan dasar dan menengah di Kabupaten Banjarnegara terhadap substansi regulasi bidang pendidikan dalam hal ini UU Nomor 22 tahun 1999, PP Nomor 25 tahun 2000 dan konsep *School Based Management* atau kebijakan MBS.
- b. Bagaimanakah responsibilitas para penyelenggara pendidikan terhadap pelaksanaan kebijakan baru tersebut.
- c. Bagaimanakah kesiapan organisasi dan manajemen (keuangan, sarana prasarana, SDM dan keterlibatan masyarakat) sehubungan dengan pelaksanaan otonomi pendidikan dasar dan menengah di Kabupaten Banjarnegara.
- d. Bagaimana keterkaitan Pemahaman regulasi, organisasi dan manajemen, dan responsibilitas dengan kualitas kinerja pendidikan?

## C. TUJUAN PENELITIAN

Dalam setiap penelitian, tujuan menjadi sarana pemandu bagi peneliti dalam proses-proses penelitian, dari awal hingga tercapai dan ditemukan

jawaban yang menjadi obyek penelitian. Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Mendeskripsikan pemahaman pelaksana pendidikan dasar dan menengah di Kabupaten Banjarnegara tentang regulasi otonomi pendidikan,
2. Mendeskripsikan tingkat responsibilitas pelaksana pendidikan dalam pelaksanaan tugas pendidikan sehubungan pelaksanaan otonomi pendidikan di Kabupaten Banjarnegara
3. Mendeskripsikan kondisi organisasi dan manajemen atau mutu penyelenggaraan pendidikan dasar menengah di Kabupaten Banjarnegara dalam era otonomi daerah- yang meliputi kualitas sumberdaya manusia, sarana prasarana, keuangan dan kelibatan masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan dasar dan menengah di Kabupaten Banjarnegara
4. Mendeskripsikan kecenderungan kaitan antar variabel pemahaman regulasi, responsibilitas, kondisi organisasi manajemen (mutu penyelenggaraan pendidikan dasar menengah di Kabupaten Banjarnegara.

#### **D. KEGUNAAN PENELITIAN**

Kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut :

a. Kegunaan umum :

1. Sebagai sarana pencerminan terhadap kinerja pelayanan pelaksana pendidikan dasar dan menengah setelah diterapkannya UTJ Nomor



22 tahun 1999, PP nomor 25 Tahun 2000 dan konsep Manajemen Berbasis Sekolah di kabupaten Banjarnegara

2. Adanya pewacanaan publik tentang kinerja pelayanan pendidikan dasar dan menengah setelah diterapkannya UU Nomor 22 tahun 1999, PP Nomor 25 tahun 2000 dan konsep *School Based Management* (Manajemen Berbasis Sekolah) di Kabupaten Banjarnegara.

b. Kegunaan khusus

1. Bagi peneliti

Peneliti diharapkan dapat menambah pengetahuan dan wawasan tentang realitas empirik kinerja birokrasi pendidikan khususnya dasar dan menengah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat setelah diterapkannya, serangkaian kebijakan otonomi pendidikan.

2. Bagi pihak pemerintah

Hasil penelitian ini diharapkan berguna sebagai bahan asupan bagi pemerintah (dalam hal ini Pemerintah Daerah Kabupaten Banjarnegara) terutama dalam hubungannya dengan upaya peningkatan kualitas mutu pendidikan.

### 3. Bagi pihak/ peneliti lain

Hasil penelitian ini diharapkan akan bermanfaat sebagai sumbangan pemikiran bagi pihak lain atau peneliti berikutnya sebagai kajian lebih lanjut.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

Teori pada dasarnya dapat didefinisikan sebagai pernyataan umum yang meringkaskan gerak-gerak nyata atau pengendalian seperangkat variabel, dimana variabel dapat diuraikan menjadi variabel tergantung, bebas dan variabel antara.<sup>7</sup> Sedangkan menurut Bintoro Tjokrowardoyo, teori adalah ungkapan hubungan kausal yang logis antara variabel dalam bidang tertentu sehingga dapat digunakan sebagai kerangka berpikir (*frame of thinking*) dalam memahami permasalahan yang timbul dalam bidang tertentu.<sup>8</sup>

Selanjutnya menurut Koentjaraningrat, yang dimaksud landasan teori adalah dasar berfikir dalam memahami dan memecahkan masalah yang ada. Landasan teori merupakan pengetahuan yang diperoleh dari tulisan-tulisan atau dokumen yang bersangkutan serta pengalaman kita sendiri merupakan landasan bagi pemikiran selanjutnya mengenai masalah yang akan diteliti.

Eksplorasi teoritik ini sangatlah urgen dan mempunyai signifikansi yang tinggi, terutama guna membatasi sekaligus menjadi titik awal analisis yang dikembangkan dalam pembahasan permasalahan yang diajukan dalam makalah. Tanpa ada satu konstruksi teoritik yang jelas, bisa dipastikan bahwa nilai validitas pembahasan masalah menjadi tidak jelas pula.

---

<sup>7 7</sup> Dayid E. Epter, Pengantar Analisa Politik, LP3ES, Jakarta

Rizvi dan Lingard (1992 :33) menyatakan bahwa otonomi sekolah dapat menyertakan masyarakat dalam melaksanakan keputusan-keputusan sekolah. Bagi para penganut otonomi sekolah, otonomi sekolah adalah upaya manajemen sekolah untuk membebaskan pengalokasian sumber daya dari kepentingan yang bersifat administrative ke kepentingan yang lebih bersifat edukatif

## **1. KINERJA PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH**

### **a. Kinerja atau Kualitas Penyelenggaraan Pendidikan**

Dalam tulisan ini ada kata kunci yang menjadi landasan teori dalam menjelaskan gejala sosial yang berkaitan dengan Implementasi Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999, PP 25 tahun 2000 dan penerapan konsep MBS. Kata kunci tersebut adalah kinerja birokrasi dan kualitas layanan. Selanjutnya dua konsep tersebut diintegrasikan dalam satu variabel kualitas kinerja, yang dalam kaitan penelitian ini diartikan sebagai kualitas kinerja lembaga pendidikan dasar dan menengah. Karena ditengarai konsep tersebut berkait dengan beberapa konsep lain maka bahasan dilanjutkan dengan pemaparan beberapa konsep terkait tersebut. Konsep-konsep terkait tersebut adalah Pemahaman regulasi, responsibilitas dan organisasi manajemen sekolah. Konsep-konsep yang kemudian terwujud dala

---

<sup>8</sup> Bintoro Tjokroamidjoyo, Tood dan Praktek, Jakarta, 1992

variabel-variabel tersebut kemudian dikaitkan dengan variabel kinerja kualitas layanan pendidikan menjadi satu kesatuan bahasan.

Untuk membantu proses pemahaman, bahasan dimulai dari konsep kinerja. Secara umum, orang awam sering menyamakan istilah kinerja dengan kerja. Namun sebetulnya secara konseptual, kedua kata tersebut tidak mengandung pengertian yang sama, karena kinerja lebih berarti tampilan (*performance*), bukan semata-mata kedua teknis organisasi.

Lebih jauh, kinerja organisasi dapat ditafsirkan dalam berbagai pengertian. Batasan kinerja yang diberikan Interplan; (1) *performance is the primary criterion for judging organization*; (2) *performance is a total concept, and includes not only all the cost, but also all the side effect of an action on polity, it is not confined to the fulfilment of state goal*; and (3) *performance is the way a development system functions is defining and achieving the state goals*.

Definisi lain tentang kinerja dikemukakan oleh Rue and Byras (dalam Yeremias T. Keban) yang memandang bahwa kinerja adalah tingkat pencapaian tujuan organisasi.<sup>9</sup> Dengan demikian, optimal tidaknya kinerja organisasi, dapat dilihat sejauh mana out put yang dihasilkan oleh organisasi tersebut. Semakin mendekati kondisi ideal, tentunya kinerja organisasi menjadi semakin baik pula.

Sedangkan jika kita tinjau dari ilmu perilaku organisasi, Campbell dan Pritchard mengartikan kinerja sebagai suatu rangkaian perilaku (organisasi) yang diarahkan kepada proses pencapaian tujuan. Dari beberapa definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa kinerja merupakan suatu tampilan organisasi yang menunjukkan tingkat pencapaian tujuan organisasi yang bersangkutan.

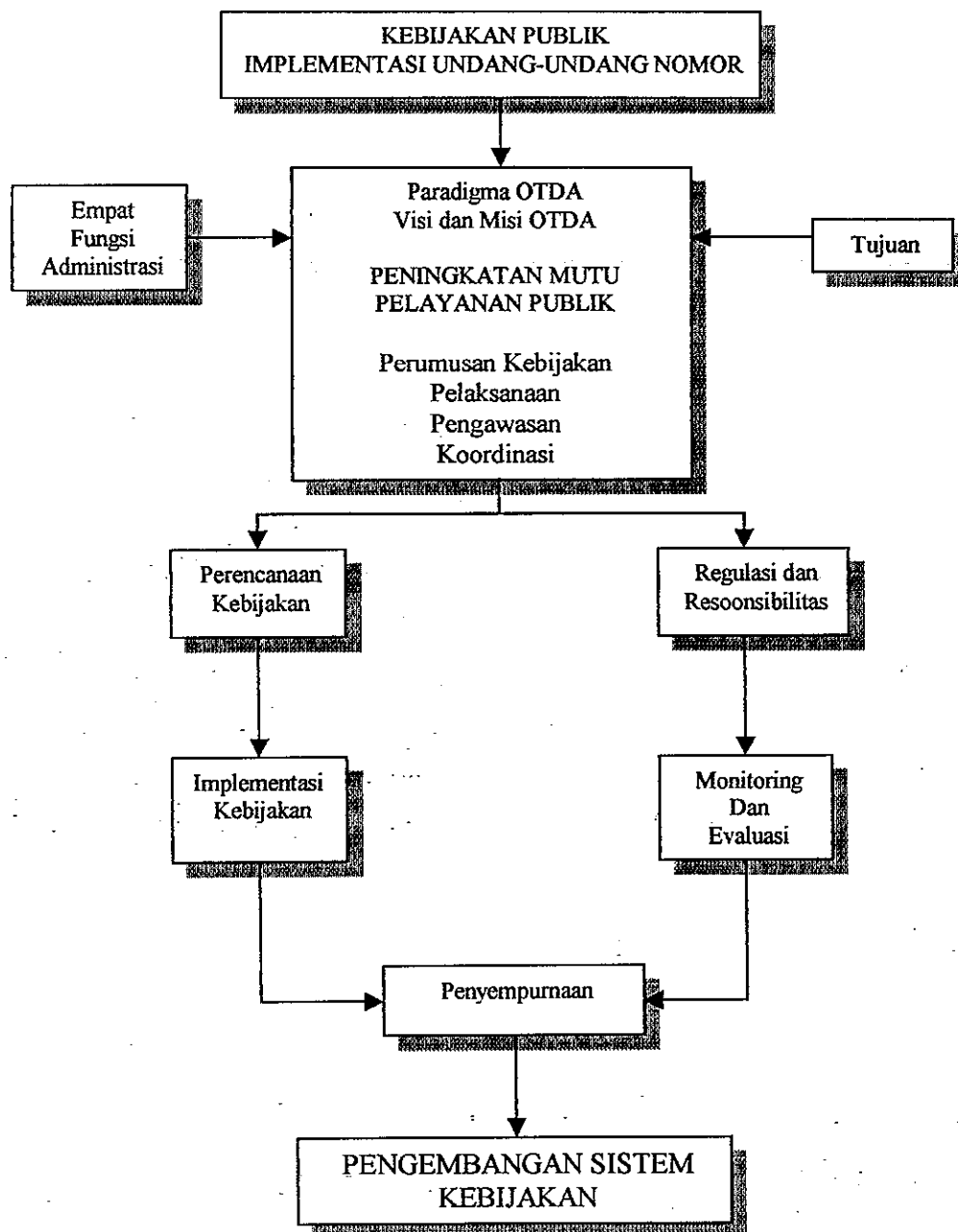
Sementara itu berkenaan dengan standart kinerja yang baik, harus memenuhi beberapa kriteria<sup>10</sup> : (1) dapat dicapai (*attainable*), artinya sesuai dengan usaha yang dilakukan pada kondisi yang akan dihadapi, (2) Menyeluruh (*all - inclusive*) artinya menyangkut sinergi dan keterkaitan aktivitas; (3) dapat dimengerti (*understandable*); (4) dapat diukur atau *measurable*; (5) bersifat ekonomis dengan memaksimalkan perbandingan *cost* dan *output*, (6) seimbang (*equitable*), serta (7) fokus pada pelanggan, artinya sejauhmana organisasi tersebut dapat memberikan pelayanan yang memuaskan kepada segenap elemen *stake holders*. Pengukuran kinerja dapat digambarkan dalam bagan seperti berikut :

---

<sup>9</sup> Yeremias T. Keban, Indikator Kinerja Pemerintah Daerah, Pendekatan Manajemen dan Kebijakan, Fisipol UGM, Yogyakarta, 1999

<sup>10</sup> LAN dan BPKP, Modul Evaluasi Kinerja Instansi Pemerintah, Jakarta, 2000 hal 37 – 38.

**Gambar 02**  
**Pengembangan Sistem, Variabel Pengaruh (UU Nomor 22 Tahun 1999)**  
**dan Penetapan Out Put Organisasi (Mutu Layanan).**



Dari bagan tersebut, dapat kita lihat bahwa implementasi Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999, PP 25 tahun 2000 dan konsistensi penerapan konsep MBS merupakan salah satu bentuk penyempurnaan sistem dari peraturan sebelumnya, yakni Undang-Undang Nomor 5 tahun 1974 dan konsekuensinya di bidang pendidikan. Seperti telah kita eksplorasi di atas, UU tersebut gagal karena telah menjadi alat politik, sehingga menekankan sentralisasi dan menafikkan layanan publik sebagai tema utama pelaksanaannya.

Bahkan jika kita kritisi, dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan orde baru, pelayanan publik sama sekali tidak pernah mendapatkan tempat yang layak dan memadai. Birokrasi akhirnya lebih bersifat sebagai public master, bukan sebagai public service. Rakyat yang seharusnya dilayani oleh pemerintah, akhirnya justru menjadi pelayan bagi pejabat pemerintahan.

Sentralisme, dimana pemerintah pusat menjadi poros dari segala manajemen pemerintahan, tentunya tidak cukup mampu untuk membaca kebutuhan riil masyarakat. Jarak yang terlalu jauh, tentunya memberikan peluang yang sedemikian besar bagi munculnya distorsi dan deviasi, sehingga gagal membaca kebutuhan riil masyarakat.



Kualitas atau mutu layanan pada prinsipnya merupakan suatu konsep yang berkait erat dengan administrasi negara. Birokrasi pada prinsipnya muncul sebagai alat atau instrumen untuk memberikan pelayanan secara maksimal kepada publik, di tengah kompleksitas persoalan masyarakat yang sedemikian besar dan rumit.

Berkaitan dengan persepsi pelanggan dalam menilai kualitas, pelayanan, Morgan dan Murgatroyd (dalam Warella, 1997) menyebutkan 10 kriteria yang biasa dipergunakan,<sup>11</sup> yaitu :

1. Reliability
2. Responsiveness
3. Competence
4. Acces
5. Courtesy
6. Communication
7. Credibility / Responsibility
8. Security
9. Understanding the customer
10. Appearance Presentation

Untuk dikatakan baik dan maksimal, pelayanan itu sendiri harus, memenuhi beberapa kriteria. Menurut Sarwoto, persyaratan pelayanan tersebut haruslah merupakan pelayanan yang :

---

<sup>11</sup> Retno Sunu Astuti, *Studi Kualitas Pelayanan Antenatal di Kecamatan Sayung Wilayah Pantai Kabupaten Demak*, artikel di Majalah Forum, No 85/XXVII/ Oktober-Januari 2000, hal

1. berdaya guna (*effective*), yaitu pelayanan tersebut cocok mutu maupun kegunaannya benar-benar sesuai dengan kegiatan organisasi dalam mencapai tujuan.
2. dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya (*validity service*), yaitu bahwa pelayanan tersebut disusun atas dasar data, fakta, angka dan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.
3. sehat (*sound service*), yaitu pelayanan tersebut disampaikan melewati hierarkhi tata hubungan yang telah ditetapkan dan dalam suasana komunikasi yang baik.
4. memuaskan (*satisfactory service*), bahwa pelayanan tersebut diberikan dengan cepat, tepat pada waktunya.

#### **b. Konsep Pembelajaran dengan PAKEM**

PAKEM adalah sebuah konsep pembelajaran yang mengajak siswa aktif dan menumbuhkan kreatifitas, dengan penciptaan situasi pembelajaran yang demokratis, sehingga proses pembelajaran berjalan secara alamiah dan efektif. Kondisi ideal tersebut dapat diciptakan bila pengajar mampu mengembangkan situasi belajar yang demokratis dengan mengedepankan hak-hak kemanusiaan setiap siswa.

Secara umum dapat dideskripsikan bahwa tentang ciri pembelajaran PAKEM sebagai berikut:

## 1). Dari pihak guru :

kegiatan pembelajaran yang dilakukan guru mencakup unsur A (aktif), K (kreatif), E (efektif) dan M (menyenangkan).

- ◆ Dari unsur **aktif**, guru harus aktif dalam :
  - a. memantau kegiatan belajar siswa,
  - b. memberikan umpan balik
  - c. mengajukan pertanyaan yang menantang, dan
  - d. menanyakan gagasan siswa
- ◆ Dari unsur **kreatif**, guru harus, dapat :
  - a. mengembangkan kegiatan yang beragam,
  - b. membuat alat bantu belajar yang bervariasi & sederhana
- ◆ Dari unsur **efektif**, berarti : guru harus mencari jalan untuk mencapai tujuan yang efektif
- ◆ Sedang dari unsur **menyenangkan** berarti proses pembelajaran harus menciptakan suasana yang menyenangkan sehingga anak memiliki rasa yang bebas untuk belajar dengan terlepas dari rasa takut salah, takut ditertawakan dan takut tidak dihargai.

## 2). Dari pihak siswa :

- a. **Aktif**, berarti siswa berperan aktif dalam : bertanya, mengemukakan gagasan, dan mempertanyakan gagasan orang lain.
- b. **Kreatif**, berarti siswa diharapkan mampu merancang atau membuat sesuatu, menulis atau mengarang dan sebagainya.
- c. **Efektif**, berarti siswa harus dapat menguasai pengetahuan, dan ketrampilan yang diperlukan.
- d. **Menyenangkan** siswa harus berani bertanya, berani mencoba atau berbuat berani mengemukakan pendapat, kesadaran yang disiplin dan senang belajar.

Menurut Warta MBS nomor 3 edisi Maret 2002, ada empat komponen pelaksanaan UBS pada sekolah, yakni :

- a. Kegiatan Belajar Mengajar :
  - 1. Guru tidak hanya menerangkan tapi minta anak menghayati dan mengerjakan pelajaran
  - 2. Guru menggunakan berbagai model dan alat peraga, terutama yang sederhana dan dibuat bersama,
  - 3. Pembelajaran bukan hanya di dalam ruang kelas, tetapi bisa di luar sekolah, halaman, kebun, pasar dsb,
  - 4. Guru bertindak sebagai fasilitator
- b. Pengelolaan Sekolah
- c. Peran Serta Masyarakat
- d. Lingkungan Sekolah.

Dari uraian di atas kemudian dapat ditarik sinergi hubungan antar konsep kinerja kualitas pendidikan dengan konsep-konsep :

1. pemahaman regulasi bidang pendidikan
2. aspek organisasi manajerial sekolah (yang berisi kualitas SDM, keuangan, sarana prasarana dan kelibatan masyarakat), dan
3. responsibilitas penyelenggara pendidikan.

## **2. PEMAHAMAN REGULAR : ISI, SUBSTANSI SERTA IMPLIKASI**

Materi dari peraturan merupakan aspek yang sangat krusial dan strategis dalam pelaksanaan kebijakan. Berdasarkan materi inilah design atau model dari pelaksanaan manajemen organisasi dapat dilaksanakan, sesuai dengan rencana awal yang telah disusun. Undang Undang Nomor 22 tahun 1999, Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2000 dan konsep *Scholl Based Management* (Manajemen Berbasis Sekolah) secara riil jelas mempunyai arti yang sangat strategis, karena menjadi rujukan dasar setiap upaya pengembangan birokrasi pemerintahan di daerah-daerah.

Keberadaan pemerintah daerah sendiri secara yuridis formal diatur dalam pasal 18 Undang-Undang dasar 1945. Hanya saja pasal ini tidak secara jelas merinci bagaimana bentuk dari pemerintah daerah. Sebagai jawabannya, dibentukkan berbagai peraturan organik yang mengatur Pemerintahan Daerah, seperti LTU Nomor I tahun 1945 tentang Parlemen Daerah, LJIJ Nomor 22 tahun 1948, Undang Undang Nomor I tahun 1957, Undang Undang Nomor 5 tahun 1974 sampai dengan yang terbaru,

yakni UU Nomor 22 tahun 1999, PP Nomor 25 tahun 2000 dan konsep *Scholl Based Management tentang Pemerintahan Daerah*.---

Penyelenggaraan Otonomi Daerah sendiri melalui Sidang Istimewa Majelis Permusyawaratan Rakyat 1998 telah ditetapkan dalam Tap WR RI Nomor XV/WR/1998 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah, Pengaturan, Pembagian, dan Pemanfaatan Sumber Daya Nasional yang Berkeadilan. Adapun hal - hal. yang diatur antara lain<sup>12</sup> :

#### 1. Pasal 1

Penyelenggaraan otonomi daerah dengan memberikan kewenangan yang luas, nyata dan bertanggung jawab di daerah secara proporsional diwujudkan dengan pengaturan, pembagian dan pemanfaatan sumberdaya nasional yang berkeadilan<sup>13</sup>, serta pengembangan keuangan antara pusat dan daerah

#### 2. Pasal 2

Penyelenggaraan Otonomi Daerah dilaksanakan dengan prinsip-prinsip demokrasi dan memperhatikan keberagaman atau kebinekaan daerah.

#### 3. Pasal 3

<sup>12</sup> Timur Mahardika, *Tarik Ulur Refasi Pusat dan Daerah - Perkembangan Pengaturan Pemerintah Daerah dan Catatan Kritis*, Penerbit Lapera Pustaka Utama, Yogyakarta, 2000, hal 8-9.

<sup>13</sup> 13 Tentang perimbangan ini diatur secara tersendiri dalam Undang-Undang Nomor 25

- (1). Pengaturan, pembagian dan pemanfaatan sumber daya nasional antara pusat dan daerah dilaksanakan secara adil untuk kemakmuran masyarakat daerah dan bangsa secara keseluruhan
- (2). Pengelolaan sumber daya alam dilakukan secara efektif dan efisien, bertanggungjawab, transparan, terbuka dan dilaksanakan dengan memberikan kesempatan yang luas kepada pengusaha kecil, menengah dan koperasi.
- (3). Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah dilaksanakan dengan memperhatikan potensi daerah, luas daerah, keadaan geografis, jumlah penduduk, dan tingkat pendapatan masyarakat.
- (4). Pemerintah Daerah berwenang mengelola sumber daya nasional dan bertanggung jawab memelihara kelestarian lingkungan.
- (5). Penyelenggaraan Otonomi daerah, pengaturan dan pembagian, pemanfaatan sumber daya nasional yang berkeadilan, dan perimbangan keuangan pusat dan daerah dalam kerangka mempertahankan dan memperkuat NKRI dilaksanakan dengan asas kerakyatan berkesinambungan yang diperkuat dengan pengawasan DPRD dan masyarakat.

Selanjutnya, berkenaan dengan kewenangan Daerah di atur dalam beberapa pasal. Pasal 7 ayat 1 menyatakan bahwa kewenangan Daerah mencakup kewenangan dalam seluruh bidang pemerintahan, kecuali kewenangan dalam bidang politik luar negeri, pertahanan

keamanan, peradilan, moneter dan fiskal, agama serta kewenangan bidang lain.

Sedangkan Pasal 11 ayat 2 mengatur, bahwa bidang pemerintahan yang wajib dilaksanakan oleh Daerah Kabupaten / Kota meliputi pekerjaan umum, kesehatan, pendidikan dan kebudayaan, pertanian, perhubungan, industri dan perdagangan, penanaman modal, lingkungan hidup, pertanahan, koperasi dan tenaga kerja.

Lebih jauh, sebagai aturan khusus guna mendukung UU Nomor 22 tahun 1999, dikeluarkan UU Nomor 25 tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah. Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah. UU ini juga sangat penting, sebagai aturan yang mengatur proporsionalitas keuangan yang dikelola daerah dibanding dengan yang diambil oleh pemerintah pusat, sehingga (14) dihindari eksploitasi seperti jaman orde baru.<sup>14</sup>

Dari beberapa peraturan tersebut, ada beberapa hal yang dapat kita tarik sebagai kesimpulan. *Pertama*, pemberian kewenangan secara luas kepada daerah memungkinkan daerah lebih berapresiasi dalam kebijakan, memahami kehendak masyarakat sehingga sekaligus dapat menjawab kebutuhan mereka.

---

<sup>14</sup> Seperti kita ketahui, pada masa orde baru, pemerintah daerah hanya diberi dana yang sangat sedikit untuk pembangunan. Sebagian dana ditarik oleh pemerintah pusat, sehingga pembangunan daerah tidak dapat dimaksimalkan. Kegagalan pembangunan daerah ini diringi dengan kegagalan dalam membentuk sebuah organisasi pelayanan publik yang maksimal, sehingga birokrasi pun tidak dapat menjalankan fungsi organiknya. Penarikan dana, baik melalui pajak maupun retribusi, hampir 80 % ditarik oleh pemerintah pusat. Ditambah dengan proses korupsi yang dilakukan oleh pemerintah Pusat, lengkap sudah penderitaan yang harus diterima oleh pemerintah daerah pada masa itu.



*Kedua*, pemberian kewenangan dalam berbagai bidang layanan masyarakat, misalnya di bidang kesehatan, pendidikan dan bidang lain, sekaligus akan memunculkan tuntutan kebutuhan aparat yang lebih profesional, yang pada akhirnya juga akan sangat memberikan warna terhadap kualitas layanan yang diberikan.

*Ketiga*, pengaturan perimbangan keuangan jelas menjadi modal bagi daerah untuk lebih dapat membiayai dirinya. Khusus bagi daerah yang minim PAD, pemerintah memberikan subsidi berupa dana Alokasi Umum (DAU) kepada mereka, sehingga mereka pun dapat secara layak menyelenggarakan birokrasi pemerintahan. Kecukupan dana tentunya akan menjadi faktor pendukung bagi penciptaan layanan masyarakat yang lebih berkualitas oleh birokrasi pemerintahan.

Dari paparan di atas, yang dimaksud dengan *regulasi dalam penelitian ini adalah peraturan perundangan, terutama menyangkut aspek isi atau substansi (materi) yang dikandung dalam peraturan tersebut (dalam hal ini UU Nomor 22 tahun 1999, PP Nomor 25 tahun 2000 tentang pemerintahan daerah dan konsep School Based Management).*

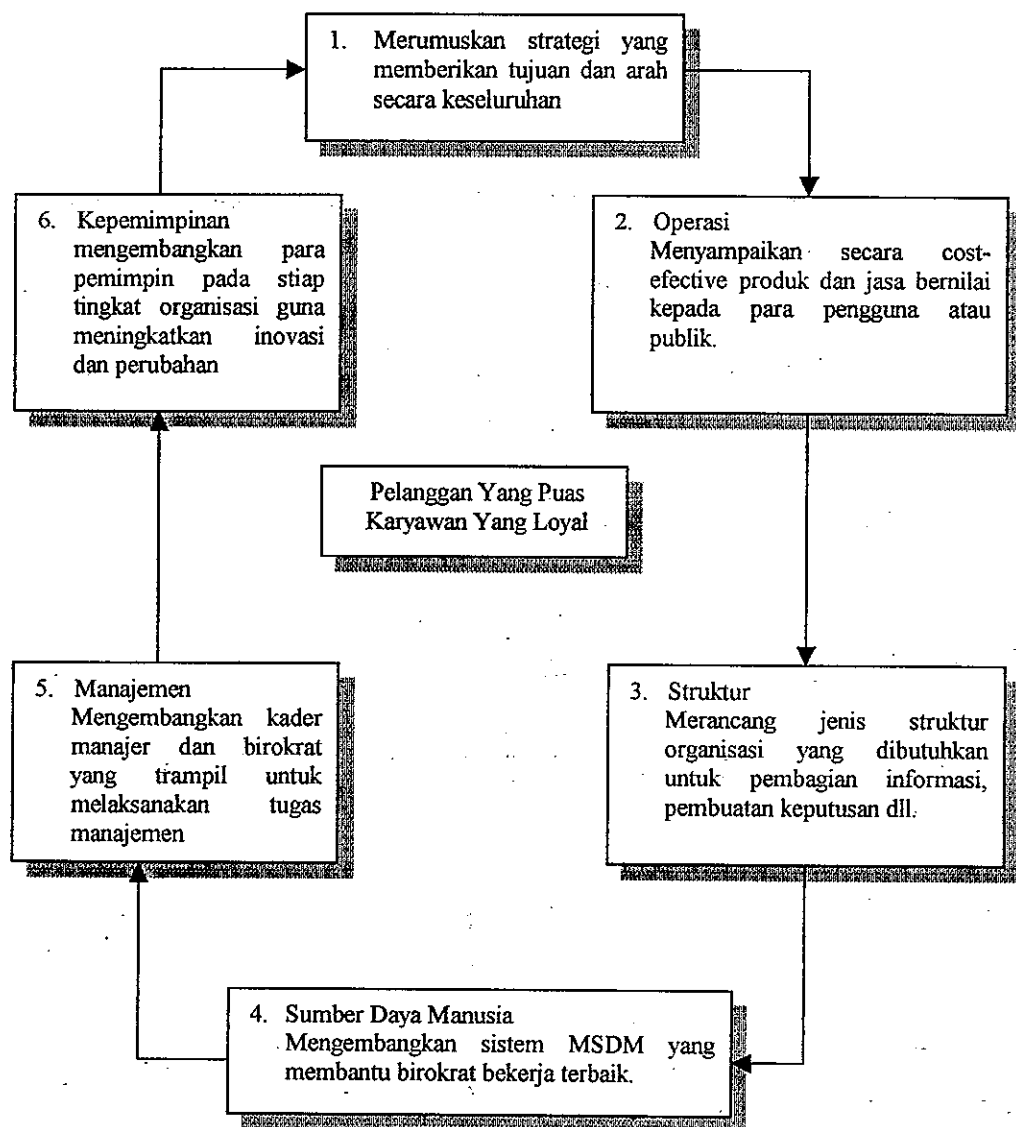
### **3. ORGANISASI DAN MANAJEMEN**

Dalam pelaksanaannya, penyelenggaraan pendidikan untuk memberikan kepuasan kepada para pelanggan (customers), diperlukan

---

pendekatan yang komprehensif baik menyangkut struktur organisasi maupun konsolidasi sumber daya manusianya.

**Gambar 03**  
**Struktur Organisasi, Proses Manajemen**  
**Dan Kepuasan Pelanggan**



Bagan tersebut menggambarkan bahwa pelayanan publik dipengaruhi berbagai faktor, seperti struktur birokrasi, proses kepemimpinan, kualitas dan sumber daya manusia, manajemen dan aspek strategis lainnya.

Implementasi Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 jelas membawa angin segar bagi proses reformasi birokrasi di Indonesia, dihubungkan dengan kinerja pelayanan publik. Perubahan pada aspek materi atau substansi peraturan, dan tuntutan baru dari para pelaksana birokrasi, jelas akan menjadi pengantar bagi proses manajemen birokrasi pemerintahan di Indonesia.

Kaho (1997) menyatakan bahwa untuk dapat melaksanakan tugas otonomi dengan sebaik-baiknya ada beberapa faktor yang perlu mendapat perhatian antara lain : faktor manusia pelaksana, faktor keuangan, faktor peralatan dan faktor organisasi dan manajemen. Pendapat Kaho tersebut kemudian memberikan kejelasan kaitan antara konsep otonomi pendidikan yang terlihat dari kualitas kinerja pendidikan dengan variabel-variabel lain.

#### **4. RESPONSIBILITAS PENYELENGGARA PENDIDIKAN**

Seperti telah disinggung sedikit di atas, perubahan aturan menuntut perubahan karakter atau sikap dari para pelaksana peraturan, dalam hal ini adalah pejabat pemerintahan atau aparat birokrasi. Dilihat dari makna gramatikalnya, responsibilitas berasal dari istilah Inggris

*responsibility* yang mempunyai arti tanggung jawab. Dengan demikian, *responsibilitas* birokrasi dapat diartikan sebagai tanggung jawab birokrasi dalam melaksanakan tugas, diantaranya tugas pelayanan kepada para *stake holders*.

*Responsibilitas* menuntut adanya *akuntabilitas*, atau pertanggungjawaban secara jelas kepada publik. Dalam *akuntabilitas* profesional, para aparat melaksanakan tugas-tugasnya dengan dilandasi oleh norma-norma dan standar profesinya. Mereka diperkenankan untuk menentukan *public interest* sesuai dengan norma-norma dan standar yang dikaitkan dengan kepentingan masyarakat sebagai *stake holders* birokrasi.<sup>15</sup>

Lebih jauh, *responsibilitas* menitikberatkan pertanggungjawaban kepada masyarakat, efisiensi dan penghematan pengguna dana, harta kekayaan, sumber daya manusia, dan sumber-sumber lainnya. Sekaligus menitikberatkan pada peranan manajer atau pengawas, dan mengharapkan agar para pejabat atau pegawai tidak hanya menjawab pertanyaan - pertanymn yang berkait dengan peraturan yang telah ada, tetapi juga untuk menetapkan suatu proses yang berkelanjutan seperti perencanaan dan penganggaran, sehingga memungkinkan mereka memberikan pelayanan publik yang terbaik.

Sebagai sebuah konsep, *responsibilitas* memang sangat dekat dengan *akuntabilitas*. Dalam arti, sejauh mana pertanggungjawaban dapat

diberikan, tentunya harus didasarkan pada kejelasan standar yang ada, kesesuaian dengan perencanaan, proses dan kemudian baru dievaluasi.

Pemerintah yang bertanggung jawab juga dikenal dengan istilah *good governance*. Arti *good* dalam *good governance* sendiri mengandung dua pengertian. Pertama, Nilai - nilai yang menjunjung tinggi keinginan atau kehendak rakyat, kedua, aspek-aspek fungsional dari pemerintahan yang efektif dan efisien dalam melaksanakan tugasnya.<sup>16</sup>

Lebih jauh dijelaskan, bahwa orientasi pertama mengacu pada demokratisasi dengan elemen *legitimacy* (kepercayaan rakyat), *accountability* (akuntabilitas), *securing of human rights*, *authority and devolution of power* dan *assurance of civilian control*.

Sedangkan orientasi kedua pada sejauh mana pemerintahan mempunyai kompetensi, dan sejauh mana struktur serta mekanisme administrasi berfungsi secara efektif dan efisien, optimal dalam bekerja memberikan pelayanan yang memuaskan kepada masyarakat atau publik.

---

<sup>15</sup> Tim Asistensi Pelaporan AKIP, Akuntabilitas Sebagai Suatu Konsep - Tinjauan Historis dan Teoritis, LAN Jakarta, 2000, hal 26

<sup>16</sup> Tim Asistensi Pelaporan AKIP, Good Governance, Lembaga Administrasi Negara, Jakarta, 2000 hal 6.



### **BAB III**

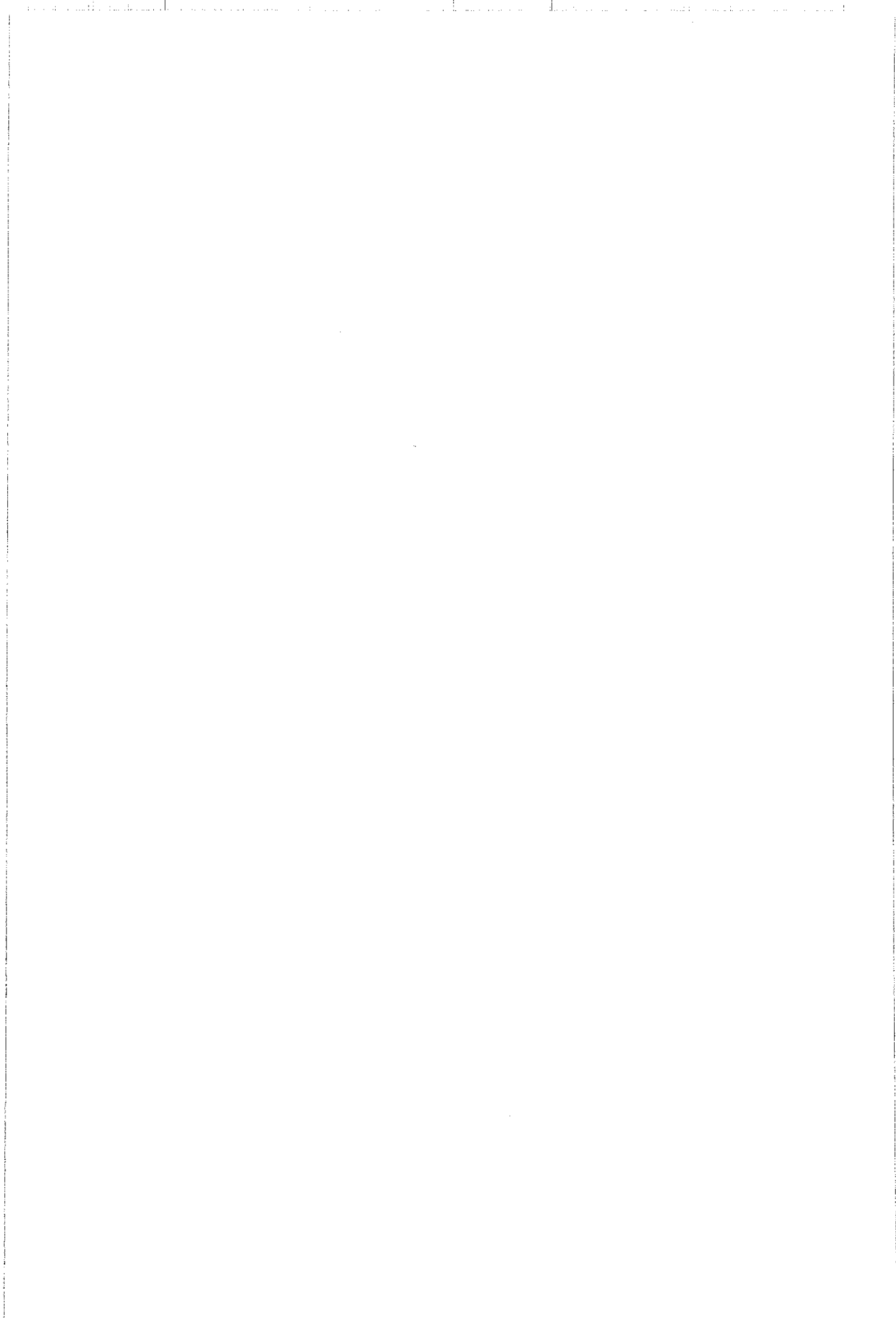
## **METODE PENELITIAN**

#### **A. Rancangan Penelitian / Perspektif Pendekatan Penelitian**

Penelitian ini pada dasarnya adalah penelitian deskriptif kualitatif. Namun demikian penelitian ini juga menggunakan pengkayaan dengan statistik deskriptif untuk hal-hal tertentu yang diperlukan. Langkah awal (*entry point*) penelitian menggunakan alat bantu analisa statistik deskriptif sebagai dasar awal penganalisaan. Dengan demikian analisa tetap diutamakan dengan melihat kecenderungan keterkaitan antar fenomena amatan, setelah pendekatan kuantitatif deskriptif dilakukan melalui penyebaran *questioner* maupun menggunakan data pendukung lainnya. Analisa lebih lanjut dilakukan dengan melihat kecenderungan hubungan antar fenomena yang dilakukan secara kualitatif melalui observasi langsung ke lokasi penelitian dan diskusi kelompok terarah (*focus group discussion*).

#### **B. Ruang Lingkup / Fokus Penelitian**

Ruang lingkup penelitian ini dapat dibagi pada empat hal utama, yakni kualitas kinerja pendidikan, organisasi manajemen, pemahaman regulasi, dan responsibilitas. Secara relasional penelitian ini mencoba menggali wacana yang terkandung dalam UU Nomor 22 tahun 1999, PP Nomor 25 tahun 2000 dan konsep *School Based Management* dalam hubungannya dengan kinerja penyelenggaraan pendidikan dasar menengah oleh





pemerintah yakni Pemda kabupaten Banjarnegara dan instansi terkait bidang pendidikan.

### **C. Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian adalah di lembaga penyelenggara pendidikan dasar dan menengah, yakni SD/IN41, SLTP/Tsanawiah dan SMU / MAN sebagai unit analisa serta instansi terkait dalam penyelenggaraan pendidikan dasar dan menengah di Kabupaten Banjarnegara.

### **D. Variabel Penelitian**

#### **1. KUALITAS KINERJA PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH**

##### **a. Kualitas penyelenggaraan pendidikan**

1. tingkat kelayakan pencapaian tujuan sekolah/ dapat dicapai (attainable), artinya dibandingkan dengan usaha yang dilakukan pada kondisi yang ada;
2. Tingkat kesungguhan penyelenggara dalam pelaksanaan kegiatan berdasarkan visi
3. Tingkat kesungguhan penyelenggara dalam mewujudkan misi
4. tingkat cakupan / tingkat kemenyeluruhan kegiatan (all - inclusive) artinya menyangkut sinergi dan keterkaitan berbagai aktivitas dalam mencapai tujuan;
5. tingkat kejelasan dapat dimengerti tujuan sekolah (understandable);

6. tingkat keterukuran kegiatan/ dapat diukur atau measurable kegiatan;
7. tingkat efisiensi/ bersifat ekonomis dari kegiatan (dengan memaksimalkan perbandingan antara cost dan output),
8. tingkat keseimbangan antar kegiatan (equitable), serta
9. tingkat concernitas / fokus pada pelanggan/ orang tua murid, artinya sejauh mana organisasi penyelenggara pendidikan tersebut dapat memberikan pelayanan pendidikan yang memuaskan kepada segenap elemen stake holders.

**b. Persiapan Pelaksanaan system PAIKEM (Pembelajaran Aktif, Kreatif, Efektif dan Menyenangkan) :**

**1). Dan pihak guru :**

◆ **Dari unsur aktif, guru harus aktif dalam :**

1. Intensitaas guru dalam memantau kegiatan belajar siswa,
2. Intensitaas guru dalam memberikan umpan balik
3. Intensitaas guru dalam mengajukan pertanyaan yang menantang, dan
4. Intensitaas guru dalam menanyakan gagasan siswa

◆ **Dan unsur kreatif, guru harus dapat :**

1. Intensitaas, guru dalam mengembangkan kegiatan yang beragam,

2. Intensitas guru dalam membuat alat bantu belajar yang bervariasi dan sederhana

♦ Dari unsur **efektif**, berarti :

Intensitas guru dalam mencari jalan untuk mencapai tujuan yang efektif

♦ Sedang dari unsur **menyenangkan** berarti :

1. Intensitas guru dalam proses pembelajaran dalam menciptakan suasana yang menyenangkan sehingga anak memiliki rasa yang bebas untuk belajar dengan terlepas dari rasa takut salah, takut ditertawakan dan takut tidak dihargai.

2). Dari pihak siswa :

- a. **Aktif**, berarti intensitas siswa berperan aktif dalam : bertanya, mengemukakan gagasan, dan mempertanyakan gagasan orang lain.
- b. **Kreatif**, berarti intensitas siswa diharapkan mampu merancang atau membuat sesuatu, menulis atau mengarang dan sebagainya.
- c. **Efektif**, berarti intensitas siswa harus dapat menguasai pengetahuan, dan ketrampilan yang diperlukan.

- d. **Menyenangkan** intensitas siswa berani bertanya, berani mencoba atau berbuat beram mengemukakan pendapat, kesadaran yang disiplin dan senang belajar.

3). **Kegiatan Belajar Mengajar:**

1. Intensitas guru untuk tidak hanya menerangkan tapi minta anak menghayati dan mengerjakan pelajaran
2. Intensitas guru dalam menggunakan berbagai model dan alat peraga, terutama yang sederhana dan dibuat bersama,
3. Intensitas pembelajaran yang bukan hanya di dalam ruang kelas, tetapi juga di luar sekolah, halaman, kebun, pasar dan sebagainya,
4. Intensitas guru dalam bertindak sebagai fasilitator

**2. PEMAHAMAN REGULASI, diukur dengan :**

- 1). Tingkat pemahaman pada otonomi daerah (UU no. 22 Tahun 1999),
- 2). Tingkat peniahaman pada otonomi pendidikan (PP no. 25 tahun 2000)
- 3). Pemahaman penyelenggara pendidikan pada visi penyelenggaraan pendidikan
- 4). Pemahaman penyelenggara pendidikan pada misi penyelenggaraan pendidikan
- 5). Pemahaman pada konsep Manajemen Berbasis Sekolah (MBS)

6). Pemahaman pada metode PAKEM

**3. ORGANISASI MANAJEMEN pendidikan, diukur dengan:**

1). SDM pendidikan:

- (1). Ketercukupan jumlah pengajar dibandingkan jumlah kelas
- (2). Tingkat pendidikan lanjut dari tenaga pengajar

2). Ketercukupan sarana dan prasarana kerja:

- (1). Tingkat ketercukupan sarana dan prasarana kerja
- (2). Tingkat kemadaiian kualitas sarana dan prasarana kerja

3). Tingkat dukungan dana :

- (1). Tingkat ketercukupan dana, baik swadaya maupun bantuan dari berbagai pihak

4). Tingkat keterlibatan masyarakat:

- (1). Tingkat keterlibatan masyarakat dalam penentuan rencana pengembangan sekolah
- (2). Tingkat keterlibatan masyarakat dalam pendanaan, pengawasan dan evaluasi serta penyusunan kurikulum. khususnya muatan lokal.

**4. RESPONSIBILITAS, diukur dengan :**

- 1. Sikap penyelenggara pendidikan terhadap perlunya pertanggungjawaban pelaksanaan pendidikan pada, para stake holders

2. Intensitas pemberian penjelasan atau informasi kepada stake holders tentang pelaksanaan pendidikan
3. Ragam media yang digunakan untuk memberikan informasi pelaksanaan pendidikan pada para stake holders.

#### **b. Jenis dan Sumber data**

##### **1. Sumber Data Primer**

Sumber data primer adalah data yang diperoleh langsung dari penelitian baik melalui angket atau quesioner maupun wawancara di lokasi Kantor Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Banjarnegara.

##### **2. Sumber data sekunder**

Data yang diperoleh tidak langsung dari lapangan, tetapi merupakan data yang telah dihimpun oleh pihak lain, yang biasanya oleh instansi atau lembaga tertentu yang terkait topik penelitian. Biasanya berupa data statistik maupun kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah, baik berupa UU maupun PP serta peraturan penunjang. Merupakan data-data pendukung yang berasal dari analisis para ahli yang berkaitan dengan topik pembahasan. Baik ahli tentang administrasi negara (pemerintahan) secara umum

maupun otonomi daerah secara khusus, maupun jurnal serta tulisan yang bisa ada keterkaitan dengan pokok pembahasan.

#### E. Populasi dan Sampel Penelitian

Populasi dari penelitian ini adalah seluruh sekolah lanjutan atas baik SMU maupun MAN di Kabupaten Banjarnegara, tahun 2002. Sampel adalah wakil populasi yang diteliti. Untuk menentukan jumlah sampel, mengikuti pendapat Gay (1976) dalam Sevilla et al. (1993:41) memberikan batasan ukuran minimal sampel pada penelitian deskriptif adalah 10 % dari populasi. Begitu juga Arikunto (1985:94) memberikan ancar-ancar untuk jumlah populasi yang besar dapat diambil antara 10-15% atau 20-25% dari jumlah populasi. Dalam penelitian ini menggunakan sekitar 15 % populasi. Sampel diambil secara "proporsional random sampling".

**Tabel. 2**  
**Pengambilan Sampel**

NO	TINGKAT	JENIS SEKOLAH	POPULAR	SAMPEL (15%)
1	MENENGAH ATAS	SMU	38	6
		MADRASAH ALIIYAH	16	3
		SMK	7	1
2	MENEGAH PERTAMA	SLTP	42	6
		MADRASAH TSANAWIYAH	26	4
3	DASAR	SD	445	67
		MADRASAH IBTIDAIYAH	124	19
	JUMLAH		698	106

## **F. Metode Pengumpulan Data**

### **1. Cara Pengumpulan Data**

Penelitian ini menggunakan beberapa alat untuk mengumpulkan data yang beragam. Alat yang digunakan adalah sebagai berikut:

#### **a. Wawancara**

Metode ini digunakan dengan mewawancarai responden dengan menggunakan acuan daftar pertanyaan. Metode ini merupakan metode utama pengumpulan data.

#### **b. Wawancara mendalam dan diskusi kelompok**

Metode ini digunakan untuk memperkaya informasi yang telah dikumpulkan dengan kuesioner.

#### **c. Dokumentasi**

Metode dokumentasi adalah cara pengumpulan data dengan mempergunakan dokumen-dokumen sebagai sumber data (Dewa Ketut S, 1985 : 177). Metode ini digunakan untuk memperoleh data tentang otonomi daerah dan kinerja layanan institusi pemerintah.

Pengumpulan data dalam penelitian ini yang menggunakan kuesioner yang terdiri dari empat jenis variabel. Setiap variabel memiliki beberapa item (pertanyaan) yang dikelompokkan secara terpisah dengan variabel lainnya.

Variabel kinerja pendidikan (Y) dalam penelitian ini diungkap dengan menggunakan kuesioner tertutup. Kuesioner ini memiliki 34 item



yang dibagi menjadi 3 sub variabel penyelenggaraan pendidikan, pelaksanaan PAKEM oleh Guru, Siswa dalam pelaksanaan PAKEM. Instrumen ini setiap item memiliki 4 alternatif jawaban (option) yang dapat dipilih bebas oleh responden dengan skor setiap alternatif jawaban adalah : a) Jawaban a diberi skor 4; b) Jawaban b diberi skor 3; c) Jawaban c diberi skor 2; d) Jawaban d diberi skor 1.

Variabel Pemahaman Regulasi (X1) dalam penelitian ini diungkap dengan menggunakan kuesioner tertutup. Kuesioner ini memiliki 10 item yang masing-masing item memiliki 4 alternatif jawaban (option) yang dapat dipilih bebas oleh responden dengan pemberian skor setiap alternatif jawaban adalah : a) Jawaban a diberi skor 4; b) Jawaban b diberi skor 3; c) Jawaban c diberi skor 2; d) Jawaban d diberi skor 1.

Variabel Organisasi dan Manajemen (X2) dalam penelitian ini diungkap dengan menggunakan kuesioner tertutup. Kuesioner ini memiliki 10 item yang masing-masing item memiliki 4 alternatif jawaban (option) yang dapat dipilih bebas oleh responden dengan pemberian skor setiap alternatif jawaban adalah : a) Jawaban a diberi skor 4; b) Jawaban b diberi skor 3; c) Jawaban c diberi skor 2; d) Jawaban d diberi skor 1.

Variabel Responsibilitas (X3) dalam penelitian ini diungkap dengan menggunakan kuesioner tertutup. Kuesioner ini memiliki 10 item yang masing-masing item memiliki 4 alternatif jawaban (option) yang dapat dipilih bebas oleh responden dengan pemberian skor setiap

alternatif jawaban adalah : a) Jawaban a diberi skor 4; b) Jawaban b diberi skor 3; c) Jawaban c diberi skor 2; d) Jawaban d diberi skor 1.

## 2. Penetapan kualitas instrumen

Instrumen penelitian sebelum digunakan untuk mengumpulkan data yang sesungguhnya, perlu dilakukan ujicoba terlebih dahulu. Proses ini untuk melakukan pengujian tingkat validitas (kesahihan) dan reliabilitas instrumen.

### a. Uji validitas instrumen

Pengujian validitas instrumen dilakukan dengan menguji muatan faktor-faktor yang ada pada setiap item instrumen. Pengujian ini dilakukan dengan menggunakan analisis faktor yang terdapat dalam program SPSS. Analisis faktor ini digunakan karena merupakan teknik analisis statistik yang mampu menggambarkan hubungan antar item yang terdapat dalam setiap variabel.

Penggunaan analisis faktor harus memenuhi persyaratan indeks KMO (*Kaiser Meyer Olkin Measure of Sampling Adequacy*) yang ada dalam instrumen sebagai berikut ; (1) indeks KMO mendekati 1,00 dikategorikan baik sekali atau sangat baik, (2) indeks KMO mendekati 0,8 dikategorikan baik, (3) indeks KMO mendekati 0,7 dikategorikan cukup, (4) indeks KMO mendekati 0,6 dikategorikan sedang, dan (5) indeks KMO kurang dari 0,5 dikategorikan buruk.

Selain itu persyaratan yang harus dipenuhi adalah taraf signifikansi indeks *Barlett Test of Sphericity* tidak lebih dari 0,05. Sedangkan kriteria

penentuan item memiliki validitas yang baik apabila muatan faktor lebih dari 0,71 termasuk dalam kategori sangat baik, muatan faktor lebih dari 0,63 termasuk kategori baik, muatan faktor lebih dari 0,55 tergolong cukup, dan muatan faktor lebih dari 0,45 tergolong sedang, serta muatan faktor kurang dari 0,32 tergolong kurang baik (Kaiser dalam Setiadi, 1992 : 259).

Memperhatikan ketentuan analisis kualitas validitas instrumen penelitian tersebut di atas, maka penafsiran hasil analisis validitas setiap instrumen adalah sebagai berikut ini:

Memperhatikan ketentuan analisis kualitas validitas instrumen penelitian tersebut di atas, maka penafsiran hasil analisis validitas setiap instrumen adalah sebagai berikut ini:

#### 1). Pengujian Validitas Instrumen Kinerja Pendidikan (Y)

Instrumen variabel Y dalam penelitian ini mengungkap kinerja pendidikan yang terdiri 3 sub variabel yaitu penyelenggaraan pendidikan terdiri 10 item, pelaksanaan PAKEM oleh guru sebanyak 10 item, dan pelaksanaan PAKEM oleh Siswa menggunakan 14 item. Instrumen ini akan digunakan untuk mengukur kinerja pendidikan.

Setelah dilakukan pengujian dengan analisis faktor menggunakan Program *SPSS versi 11 for windows* diperoleh hasil masing-masing sub variabel sebagai berikut:

- a). Indeks *Kaiser Meyer Olkins Measure of Sampling Adequacy* sub variabel penyelenggaraan pendidikan sebesar 0,682, sub variabel

pelaksanaan PAKEM oleh guru sebesar 0,847, dan sub variabel pelaksanaan Pakem oleh siswa sebesar 0,805.

Hasil ini memberikan memberikan gambaran bahwa hasil sebaran skor ujicoba instrumen variabel kinerja pendidikan ini memenuhi persyaratan untuk dianalisis menggunakan analisis faktor, oleh karena itu perlu diuji persyaratan validitas instrumen ini dengan menggunakan kriteria selanjutnya.

- b). Hasil analisis faktor instrumen variabel kinerja menggambarkan *communality* (muatan faktor) setiap butir yang ada dalam instrumen. Muatan faktor (*communality*) yang dimiliki oleh setiap butir dalam suatu instrumen menunjukkan validitas yang terdapat pada butir yang bersangkutan. Hasil analisis faktor instrumen variabel kinerja masing-masing sub variabel penyelenggaraan pendidikan, pelaksanaan PAKEM oleh guru, dan pelaksanaan PAKEM oleh siswa dapat diperhatikan pada bagian berikut ini :

Tabel. 3  
Kualitas Instrumen Penyelenggaraan Pendidikan Kinerja

No	Item	Muatan Faktor	Kualitas Validitas
1.	I1	0,808	Sangat baik
2.	I2	0,662	Baik
3.	I3	0,873	Sangat Baik
4.	I4	0,798	Baik
5.	I5	0,806	Sangat Baik
6.	I6	0,860	Sangat Baik
7.	I7	0,637	Baik
8.	I8	0,685	Baik
9.	I9	0,890	Sangat Baik
10.	I10	0,884	Sangat Baik

Sumber: Data Ujicoba Instrumen Penelitian

Berdasarkan tabel di atas dapat dipahami bahwa semua item dalam instrumen sub variabel penyelenggaraan pendidikan validitas yang baik dan memenuhi persyaratan sebagai bagian instrumen yang layak untuk digunakan pengambilan data dalam proses penelitian.

Pengujian validitas dengan analisis faktor dilakukan juga untuk instrumen sub variabel pelaksanaan PAKEM oleh guru yang merupakan bagian dari kinerja dalam bidang pendidikan. Sub variabel ini diungkap dengan menggunakan instrumen yang terdiri dari 10 item. Setelah diuji dengan menggunakan analisis faktor diperoleh hasil yang dapat diperhatikan dalam bagian berikut ini:

Tabel. 4  
Kualitas Instrumen Pelaksanaan PAKEM Oleh Guru

No	Item	Muatan Faktor	Kualitas Validitas
1.	I1	0,903	Sangat baik
2.	I2	0,777	Sangat Baik
3.	I3	0,896	Sangat Baik
4.	I4	0,865	Sangat Baik
5.	I5	0,759	Sangat Baik
6.	I6	0,806	Sangat Baik
7.	I7	0,925	Sangat Baik
8.	I8	0,877	Sangat Baik
9.	I9	0,728	Sangat Baik
10.	I10	0,885	Sangat Baik

Sumber: Data Ujicoba Instrumen Penelitian

Hasil analisis validitas tersebut di atas dapat memberikan gambaran tentang kualitas instrumen sub variabel pelaksanaan

PAKEM oleh guru yang terdiri dari 10 item memiliki muatan faktor yang berbeda, namun apabila kita lihat dari kategori kualitas setiap item semua tergolong sangat baik. Hal ini dapat diartikan bahwa kualitas instrumen sub variabel ini sangat baik untuk mengumpulkan data penelitian.

Sub variabel yang ketiga dalam variabel kinerja pendidikan yaitu pelaksanaan PAKEM dari aspek siswa. Sub variabel ini diukur dengan menggunakan 13 item yang terdiri dari 4 option. Hasil analisis faktor yang digunakan mengukur kualitas instrumen dari sisi validitas dapat diperhatikan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel. 5  
Kualitas Instrumen Pelaksanaan PAKEM dari Aspek Siswa

No	Item	Muatan Faktor	Kualitas Validitas
1.	I1	0,719	Sangat baik
2.	I2	0,792	Sangat Baik
3.	I3	0,676	Baik
4.	I4	0,763	Sangat Baik
5.	I5	0,823	Sangat Baik
6.	I6	0,776	Sangat Baik
7.	I7	0,616	Baik
8.	I8	0,881	Sangat Baik
9.	I9	0,795	Sangat Baik
10.	I10	0,865	Sangat Baik
11.	I11	0,799	Sangat Baik
12.	I12	0,745	Sangat Baik
13.	I13	0,830	Sangat Baik

Sumber: Data Ujicoba Instrumen Penelitian

Hasil analisis validitas tersebut di atas dapat memberikan gambaran tentang kualitas instrumen sub variabel pelaksanaan PAKEM dari aspek siswa yang terdiri dari 13 item memiliki muatan faktor yang berbeda, namun apabila kita lihat dari kategori kualitas setiap item 11 tergolong sangat baik, dan 2 item memiliki muatan faktor baik. Hal ini dapat diartikan bahwa kualitas instrumen sub variabel ini sangat baik untuk mengumpulkan data penelitian.

## 2). Pengujian Validitas Instrumen Pemahaman Regulasi (X1)

Instrumen variabel X1 dalam penelitian ini mengungkap pemahaman regulasi yang terdiri 10 item dengan 4 option.

Setelah dilakukan pengujian dengan analisis faktor menggunakan Program *SPSS versi 11 for windows* diperoleh hasil masing-masing sub variabel sebagai berikut:

### a). Indeks *Kaiser Meyer Olkins Measure of Sampling Adequacy*

variabel pemahaman regulasi sebesar 0,801.

Hasil ini memberikan gambaran bahwa hasil sebaran skor ujicoba instrumen variabel pemahaman regulasi ini memenuhi persyaratan untuk dianalisis menggunakan analisis faktor, oleh karena itu perlu diuji persyaratan validitas instrumen ini dengan menggunakan kriteria selanjutnya.

### b). Hasil analisis faktor instrumen variabel kinerja menggambarkan *communality* (muatan faktor) setiap butir yang ada dalam

instrumen. Hasil analisis faktor instrumen variabel pemahaman regulasi dapat diperhatikan dalam tabel berikut ini :

Tabel. 7  
Kualitas Instrumen Pemahaman Regulasi

No	Item	Muatan Faktor	Kualitas Validitas
1.	I1	0,768	Sangat baik
2.	I2	0,727	Sangat Baik
3.	I3	0,645	Baik
4.	I4	0,786	Sangat Baik
5.	I5	0,800	Sangat Baik
6.	I6	0,852	Sangat Baik
7.	I7	0,899	Sangat Baik
8.	I8	0,916	Sangat Baik
9.	I9	0,931	Sangat Baik
10.	I10	0,867	Sangat Baik

Sumber: Data Ujicoba Instrumen Penelitian

Tabel di atas dapat dijelaskan bahwa semua item dalam instrumen variabel pemahaman regulasi pendidikan validitas yang sangat baik dan memenuhi persyaratan sebagai instrumen yang layak untuk digunakan pengambilan data dalam proses penelitian.

### 3). Pengujian Validitas Instrumen Manajemen Organisasi (X2)

Instrumen variabel X2 dalam penelitian ini mengungkap manajemen organisasi yang terdiri 17 item dengan 4 option.

Setelah dilakukan pengujian dengan analisis faktor menggunakan Program *SPSS versi 11 for windows* diperoleh hasil masing-masing sub variabel sebagai berikut:

- a). Indeks *Kaiser Meyer Olkins Measure of Sampling Adequacy* variabel pemahaman regulasi sebesar 0,836.



Hasil ini memberikan gambaran bahwa hasil sebaran skor ujicoba instrumen variabel pemahaman regulasi ini memenuhi persyaratan untuk dianalisis menggunakan analisis faktor, oleh karena itu perlu diuji persyaratan validitas instrumen ini dengan menggunakan kriteria selanjutnya.

- b). Hasil analisis faktor instrumen variabel manajemen organisasi menggambarkan *communality* (muatan faktor) setiap butir yang ada dalam instrumen. Hasil analisis faktor instrumen variabel manajemen organisasi muatan faktor masing-masing item dapat diperhatikan dalam tabel berikut ini :

Tabel. 8  
Kualitas Instrumen Manejemen Organisasi

No	Item	Muatan Faktor	Kualitas Validitas
1.	I1	0,739	Sangat baik
2.	I2	0,862	Sangat Baik
3.	I3	0,727	Sangat Baik
4.	I4	0,777	Sangat Baik
5.	I5	0,828	Sangat Baik
6.	I6	0,838	Sangat Baik
7.	I7	0,740	Sangat Baik
8.	I8	0,926	Sangat Baik
9.	I9	0,893	Sangat Baik
10.	I10	0,880	Sangat Baik
11.	I11	0,680	Baik
12.	I12	0,667	Baik
13.	I13	0,867	Sangat Baik
14.	I14	0,664	Baik
15.	I15	0,686	Baik
16.	I16	0,865	Sangat Baik
17.	I17	0,793	Sangat Baik

Sumber: Data Ujicoba Instrumen Penelitian

Tabel di atas dapat dijelaskan bahwa semua item dalam instrumen variabel manajemen organisasi validitas yang baik dan sangat baik serta memenuhi persyaratan sebagai instrumen yang layak untuk digunakan pengambilan data dalam proses penelitian.

#### 4). Pengujian Validitas Instrumen Responsibilitas (X3)

Instrumen variabel X3 dalam penelitian ini mengungkap responsibilitas yang terdiri 10 item dengan 4 option.

Setelah dilakukan pengujian dengan analisis faktor menggunakan Program *SPSS versi 11 for windows* diperoleh hasil masing-masing sub variabel sebagai berikut:

- a). Indeks *Kaiser Meyer Olkins Measure of Sampling Adequacy* variabel pemahaman regulasi sebesar 0,801.

Hasil ini memberikan gambaran bahwa hasil sebaran skor ujicoba instrumen variabel pemahaman regulasi ini memenuhi persyaratan untuk dianalisis menggunakan analisis faktor, oleh karena itu perlu diuji persyaratan validitas instrumen ini dengan menggunakan kriteria selanjutnya.

- b). Hasil analisis faktor instrumen variabel manajemen organisasi menggambarkan *communality* (muatan faktor) setiap butir yang ada dalam instrumen. Hasil analisis faktor instrumen variabel manajemen organisasi muatan faktor masing-masing item dapat diperhatikan dalam tabel berikut ini :

**Tabel. 9**  
**Kualitas Instrumen Resposibilitas**

No	Item	Muatan Faktor	Kualitas Validitas
1.	I1	0,756	Sangat baik
2.	I2	0,742	Sangat Baik
3.	I3	0,714	Sangat Baik
4.	I4	0,721	Sangat Baik
5.	I5	0,821	Sangat Baik
6.	I6	0,678	Baik
7.	I7	0,820	Sangat Baik
8.	I8	0,868	Sangat Baik
9.	I9	0,799	Sangat Baik
10.	I10	0,386	Sedang

Sumber: Data Ujicoba Instrumen Penelitian

Tabel di atas dapat dijelaskan bahwa semua item dalam instrumen variabel manajemen organisasi validitas yang sedang, baik dan sangat baik serta memenuhi persyaratan sebagai instrumen yang layak untuk digunakan pengambilan data dalam proses penelitian.

#### b. Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas instrumen dalam suatu penelitian sangat perlu dilakukan karena reliabilitas berkaitan dengan taraf “keajegan” dan taraf kepercayaan terhadap instrumen tersebut. Menguji reliabilitas alat ukur sama dengan menguji konsistensi.

Instrumen dalam penelitian ini masing-masing memiliki lebih dari dua alternatif jawaban yang berjenjang, maka pengujian reliabilitas instrumen dapat digunakan dengan proses SPSS.

Penentuan tingkat reliabilitas instrumen menurut Fernandes dalam Saifudin Azwar (1995 : 29) dinyatakan bahwa reliabilitas instrumen dapat diterima apabila memiliki koefisien reliabilitas minimal 0,5. Hal ini mengandung pengertian bahwa suatu instrumen dapat digunakan sebagai pengumpul data yang handal, apabila memiliki koefisien reliabilitas dapat dipergunakan kategori reliabilitas dengan rentangan sebagai berikut :

Koefisien 0,81 – 1,00 tergolong sangat tinggi

Koefisien 0,61 – 0,80 tergolong tinggi

Koefisien 0,41 – 0,60 tergolong cukup

Koefisien 0,21 – 0,40 tergolong rendah

Koefisien 0,00 – 0,20 tergolong sangat rendah.

(Suharsimi, 1997 : 123).

Mengacu pada kriteria di atas, maka dapat dilakukan uji reliabilitas instrumen penelitian sebagai berikut:

#### 1). Pengujian Reliabilitas Instrumen Kinerja Pendidikan (Y)

Instrumen variabel Y dalam penelitian ini mengungkap kinerja pendidikan yang memiliki tiga sub variabel yaitu sub variabel penyelenggaraan pendidikan, sub variabel pelaksanaan PAKEM oleh guru, dan sub variabel pelaksanaan PAKEM oleh siswa. Ketiga sub variabel ini masing-masing diungkap dengan menggunakan 10 item, 10 item, dan 13 item. Instrumen ini akan digunakan untuk mengukur kinerja pendidikan yang diuji reliabilitasnya menggunakan program

SPSS dengan formula Koefisien Alpha. Hal ini karena instrumen ini memiliki jawaban yang berjenjang dengan option lebih dari 2.

Hasil analisis reliabilitas sub variabel penyelenggaraan pendidikan diperoleh koefisien Alpha sebesar 0,9421, sub variabel pelaksanaan PAKEM oleh guru diperoleh koefisien Alpha sebesar 0,7990, dan sub variabel pelaksanaan PAKEM oleh siswa sebesar 0,8388 yang berarti masuk pada kategori memiliki reliabilitas sangat tinggi, sehingga layak digunakan untuk mengumpulkan data.

## 2). Pengujian Reliabilitas Instrumen Pemahaman Regulasi (X1)

Instrumen variabel X1 dalam penelitian ini mengungkap pemahaman regulasi yang memiliki 10 item. Instrumen ini yang diuji reliabilitasnya menggunakan program SPSS dengan formula Koefisien Alpha. Hal ini karena instrumen ini memiliki jawaban yang berjenjang dengan option lebih dari 2.

Hasil analisis reliabilitas diperoleh koefisien Alpha sebesar 0,8050 yang berarti masuk pada kategori memiliki reliabilitas sangat tinggi, sehingga layak digunakan untuk mengumpulkan data.

## 3). Pengujian Reliabilitas Instrumen Manajemen Organisasi (X2)

Instrumen variabel X2 dalam penelitian ini mengungkap pemahaman regulasi yang memiliki 17 item. Instrumen ini yang diuji reliabilitasnya menggunakan program SPSS dengan formula Koefisien Alpha. Hal ini karena instrumen ini memiliki jawaban yang berjenjang dengan option lebih dari 2.

Hasil analisis reliabilitas diperoleh koefisien Alpha sebesar 0,8251 yang berarti masuk pada kategori memiliki reliabilitas sangat tinggi, sehingga layak digunakan untuk mengumpulkan data.

#### 4). Pengujian Reliabilitas Instrumen Responsibilitas (X3)

Instrumen variabel X3 dalam penelitian ini mengungkap pemahaman regulasi yang memiliki 10 item. Instrumen ini yang diuji reliabilitasnya menggunakan program SPSS dengan formula Koefisien Alpha. Hal ini karena instrumen ini memiliki jawaban yang berjenjang dengan option lebih dari 2.

Hasil analisis reliabilitas diperoleh koefisien Alpha sebesar 0,8992 yang berarti masuk pada kategori memiliki reliabilitas sangat tinggi, sehingga layak digunakan untuk mengumpulkan data.

### G. Teknik Analisa Data

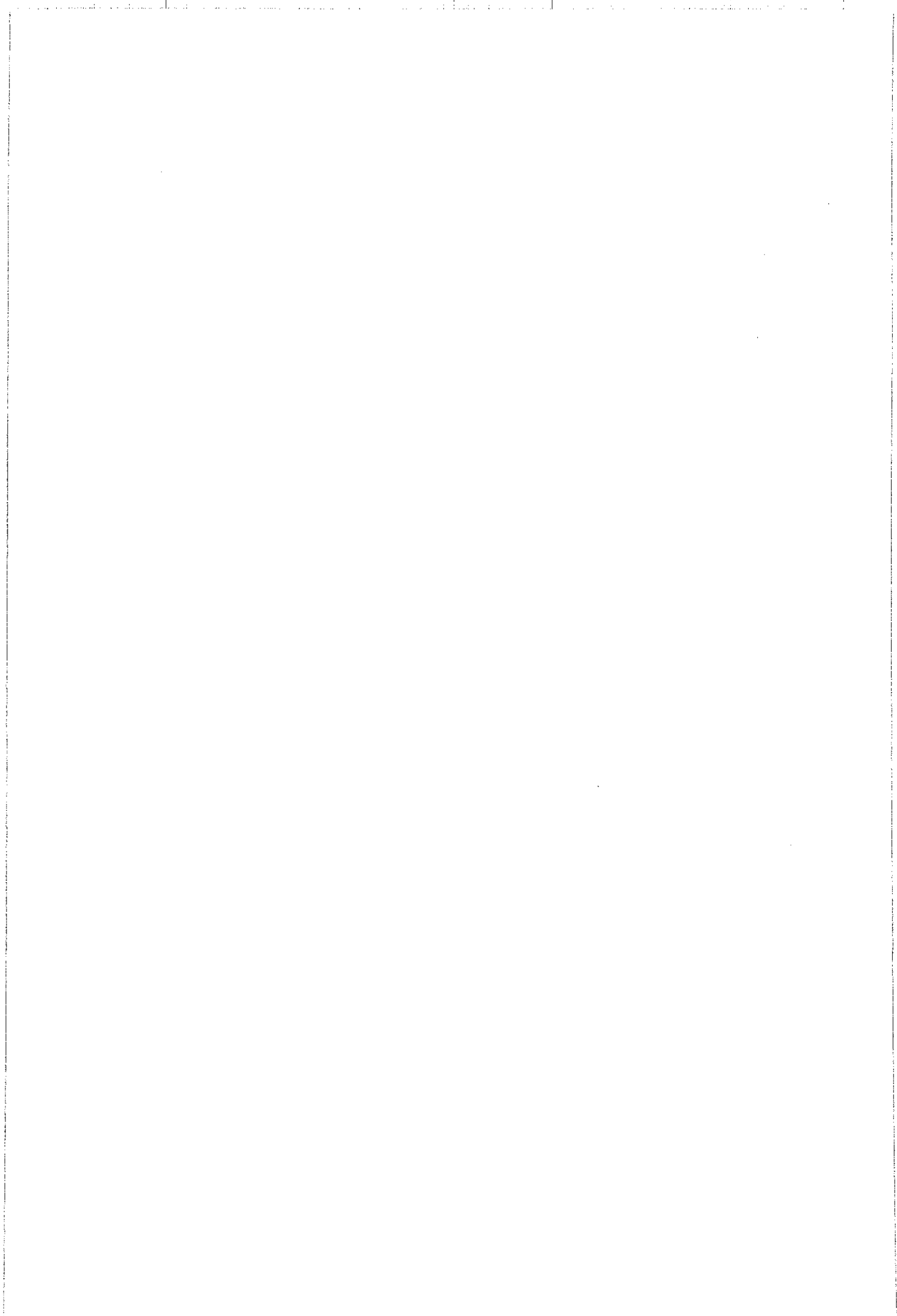
Metode analisa data dalam penulisan ini adalah :

- a. Analisa data kuantitatif, yaitu menggunakan analisa tabel silang yang dilengkapi statistik deskriptif bila diperlukan.
- b. Analisis data kualitatif, yaitu teknik penelaahan dalam bentuk uraian atau penggambaran untuk mengumpulkan data yang bersifat kualitatif, terutama untuk menganalisa data yang bukan berbentuk angka. Analisa tersebut terdiri dari :
  1. Diskriptif kualitatif yaitu metode yang digunakan untuk menyajikan data-data yang berupa konsep dari kedua sumber data tersebut.

2. Deduktif, yaitu metode yang bertitik tolak dan suatu pengamatan terhadap persoalan yang bersifat umum kemudian ditarik ketentuan yang bersifat khusus untuk kesimpulan tertentu
3. Induktif, yaitu metode yang bertitik tolak dari suatu pengamatan terhadap persoalan yang bersifat khusus kemudian ditarik suatu ketentuan yang bersifat lebih umum.
4. Logis sistemik, yaitu dalam menyampaikan diskripsi tersebut dengan menggerakakan prinsip-prinsip logika dan melihat masalah tersebut secara keseluruhan yang terdin dari komponen-komponen yang saling berhubungan dan saling mempengaruhi dalam kaitannya dengan tujuan-tujuan tertentu.<sup>17</sup> Dalam hal ini, peraturan, dan variabel- variabel lainnya.

---

<sup>17</sup> Sutrisno Hadi, *Metodologi Research Jilid 1*, Yayasan Penerbitan Fakultas Psikologi, UGM, Yogyakarta, 1987. him. 23





## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Deskripsi Lokasi Penelitian**

Deskripsi masalah pendidikan dapat dilakukan dengan melihat pendidikan sebagai suatu sistem. Sebagai suatu sistem, pendidikan memiliki komponen tujuan, guru, siswa, dan sarana prasarana. Komponen-komponen yang ada dalam sistem pendidikan ini memiliki kaitan satu dengan lainnya. Keunggulan yang ada pada salah satu komponen akan memberikan kontribusi yang positif terhadap komponen-komponen lainnya, begitu juga sebaliknya kelemahan yang ada dalam suatu komponen akan memiliki pengaruh terhadap komponen lainnya.

Dalam sistem pendidikan di Indonesia, pendidikan memiliki jenjang yang berkelanjutan yaitu pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi. Jenjang pendidikan dasar akan memberikan landasan untuk pendidikan menengah, sedangkan pendidikan menengah akan menjadi dasar untuk menempuh pendidikan tinggi. Sehingga kualitas pendidikan dasar akan menentukan kelancaran dalam pencapaian tujuan pendidikan menengah, dan selanjutnya akan menentukan pencapaian misi pendidikan tinggi.

Berdasarkan kerangka pemikiran di atas, maka pada bagian ini akan disajikan deskripsi kondisi pendidikan di Kabupaten Banjarnegara.



## 1. Keadaan Sekolah Dasar

Kualitas penyelenggaraan sekolah dasar dipengaruhi oleh faktor pendidikan terutama adalah jumlah dan sebaran sekolah dasar, jumlah guru, dan sarana prasana pendidikan. Sebagai gambaran kualitas pendidikan dasar yang ada di lokasi penelitian secara berurutan di sajikan dalam bagian berikut:

### a. Keadaan Jumlah Sekolah Dasar

Jumlah sekolah yang terdapat suatu daerah akan memberikan gambaran tentang ketersediaan fasilitas penyelenggaraan pendidikan yang merupakan salah satu ukuran tentang kualitas penyelenggaraan pendidikan. Hal ini dapat dipahami bahwa dengan tersedia gedung-gedung penyelenggaraan pendidikan yang dekat dengan tempat tinggal siswa akan memberikan dampak yang positif untuk meningkatkan partisipasi pendidikan pada anak-anak usia sekolah. Berikut ini disajikan gambaran jumlah sekolah dasar di Kabupaten Banjarnegara.

Tabel: 10  
Jumlah Sekolah Dasar dan Madrasah Ibtidaiyah

No	Jenis Pendidikan	Negeri		Swasta		Jumlah
		Pagi	Sore	Pagi	Sore	
1.	S D	422	7	16	-	445
2	M I	36	-	22	66	124
Jumlah		498	7	38	66	698

Sumber : Dokumen Depdiknas Kab. Banjarnegara, 2002

b. Jumlah Kelas Sekolah Dasar dan Madrasah Ibtidaiyah

Jumlah kelas yang ada pada sekolah memberikan gambaran tentang daya tampung yang dimiliki oleh lembaga pendidikan, semakin besar jumlah kelas yang dimiliki oleh suatu lembaga pendidikan menunjukkan daya tampung cukup besar, sebaliknya jumlah kelas yang kecil memberikan petunjuk daya tampung yang dimiliki sedikit. Berikut ini gambaran jumlah kelas untuk sekolah dasar dan madrasah Ibtidaiyah:

Tabel: 11  
Jumlah Kelas Sekolah Dasar dan Madrasah Ibtidaiyah

No	Jenis Pendidikan	Negeri		Swasta		Jumlah
		Pagi	Sore	Pagi	Sore	
1.	SD	2423	40	128	-	2591
2	MI	204	-	126	394	724
Jumlah		2623	40	154	394	3317

Sumber : Dokumen Depdiknas Kab. Banjarnegara, 2002

Tabel di atas memberikan gambaran bahwa jumlah kelas yang tersedia untuk sekolah dasar sebesar 3317 kelas, apabila dibandingkan dengan jumlah sekolah sebesar 698 sekolah. Apabila dicermati jumlah kelas untuk SD negeri sebesar 429 dengan jumlah kelas 2823, maka dapat diperhitungkan jumlah rata-rata kelas riil yang ada di sekolah dasar negeri sebesar 6,58 kelas. Hal berarti setiap sekolah dasar negeri rata-rata memiliki 6,58 kelas. Sedangkan sekolah dasar swasta yang terdiri 16 dengan jumlah kelas 128 berarti memiliki rata-rata jumlah kelas riil sebesar 8 kelas setiap sekolah.

Madrasah Ibtidaiyah dengan jumlah sekolah 124 dengan memiliki jumlah kelas 724, apabila dihitung rata-rata jumlah kelas setiap sekolah adalah 5,84 kelas. Hal ini mengandung pengertian bahwa tidak setiap Madrasah Ibtidaiyah memiliki kelas yang utuh mulai kelas I sampai dengan kelas VI.

c. Keadaan Jumlah Guru

Guru adalah salah satu komponen yang sangat penting dalam proses pembelajaran yang sampai saat ini kedudukannya tidak dapat digantikan dengan media lain. Oleh karena itu jumlah guru yang dibutuhkan di mestinya minimal sama dengan jumlah kelas yang ada di sekolah. Berikut ini disajikan gambaran jumlah guru di sekolah dasar dan madrasah ibtidaiyah:

Tabel: 12  
Jumlah Guru Sekolah Dasar dan Madrasah Ibtidaiyah

No	Jenis Pendidikan	Negeri		Swasta		Jumlah
		Pagi	Sore	Pagi	Sore	
1.	SD	2449	42	135	-	2606
2	MI	196	-	111	277	584
Jumlah		2645	42	226	277	3190

Sumber : Dokumen Depdiknas Kab. Banjarnegara, 2002

Tabel di atas memberikan gambaran tentang jumlah guru yang dimiliki oleh sekolah dasar negeri 2491 dengan jumlah kelas 2823. Hal ini menunjukkan bahwa secara keseluruhan di Kabupaten Banjarnegara

jumlah guru sekolah dasar masih mengalami kekurangan 332 guru. Sedangkan untuk sekolah dasar swasta dengan jumlah kelas 128 memiliki guru sejumlah 135, hal ini menunjukkan sekolah swasta jumlah gurunya sudah memenuhi syarat.

Sedangkan untuk Madrasah Ibtidaiyah negeri dengan jumlah sekolah 204 yang memiliki guru 196 berarti juga mengalami kekurangan 8 guru. Madrasah Ibtidaiyah swasta dengan jumlah kelas sebesar 520 memiliki guru sebesar 388, keadaan ini menunjukkan madrasah ibtidaiyah swasta masih mengalami kekurangan yang cukup yaitu 132 orang.

## 2. Keadaan Sekolah Menengah Lanjutan Pertama

Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama atau SLTP merupakan jenjang pendidikan yang merupakan kelanjutan dari sekolah dasar maupun madrasah ibtidaiyah. Sekolah ini akan melayani lulusan sekolah dasar maupun madrasah ibtidaiyah untuk dapat melanjutkan pendidikan. Berikut ini gambaran keadaan SLTP dan Madrasah Ibtidaiyah:

Tabel: 13  
Jumlah SLTP dan Madrasah Tsanawiyah

No	Jenis Pendidikan	Negeri		Swasta		Jumlah
		Pagi	Sore	Pagi	Sore	
1.	S LTP	38	-	18	-	56
2	M Ts	7	-	12	7	26
Jumlah		45	-	30	7	82

Sumber : Dokumen Depdiknas Kab. Banjarnegara, 2002

Tabel di atas memberikan gambaran tentang jumlah sekolah menengah tingkat pertama yang meliputi SLTP Dan Madrasah Tsanawiyah. Jumlah SLTP dan Madrasah Tsanawiyah di Kabupaten Banjarnegara sebanyak 82 sekolah. Hal ini kalau kita hitung ratio jumlah sekolah dasar yang meliputi SD dan Madrasah Ibtidaiyah sebesar 698, maka perbandingannya adalah 1 dibanding 8,51. Sehingga untuk menampung semua lulusan yang berasal dari sekolah dasar dan madrasah ibtidaiyah minimal setiap SMTP yang meliputi SLTP dan madrasah tsanawiyah menyediakan kelas rata-rata 8,51 kelas.

Sebagai bahan kajian berikut ini disajikan gambaran jumlah kelas yang ada di SLTP dan Madrasah Tsanawiyah:

Tabel: 14  
Jumlah Kelas SLTP dan Madrasah Tsanawiyah

No	Jenis Pendidikan	Negeri		Swasta		Jumlah
		Pagi	Sore	Pagi	Sore	
1.	S D	586		162	-	748
2	M I	58	-	98	301	457
Jumlah		644		160	301	1205

Sumber : Dokumen Depdiknas Kab. Banjarnegara, 2002

Jumlah kelas yang ada berdasarkan tabel di atas dapat diperhatikan sebesar 1205 kelas yang meliputi tingkat I, II, dan tingkat III. Sehingga kalau diperhatikan jumlah kelas yang ada ini jumlah seluruh tingkat, sedangkan apabila akan mengkaji daya tampun setiap tahun mestinya secara kasar harus dihitung dengan membagi tiga jumlah kelas yang ada. Apabila dibagi 3

jumlah kelas yang merupakan gambaran daya tampung adalah sebesar 401,67 kelas.

Jumlah ini jika dibandingkan dengan jumlah SD dan Madrasah Ibtidaiyah yang setiap tahun diasumsikan meluluskan 1 kelas jumlah lulusan sebesar 698, maka jumlah lulusan SD dan Madrasah yang tidak tertampung di SLTP dan Madrasah Tsanawiyah sebesar 296,33 kelas atau sebesar 42,45%.

## **B. Deskripsi Variabel Penelitian**

Penelitian ini mencakup empat variabel utama yaitu Kinerja pendidikan, pemahaman regulasi, organisasi manajemen, dan responsibilitas. Pada bagian ini akan disajikan hasil-hasil penelitian untuk setiap variabel penelitian.

### **1. Deskripsi Variabel Kinerja Pendidikan**

Variabel kinerja pendidikan dalam penelitian ini dikaji dari tiga sub variabel yaitu sub variabel penyelenggaraan pendidikan, aktivitas guru dalam pelaksanaan PAKEM, dan aktivitas siswa dalam pelaksanaan PAKEM.

Masing-masing sub variabel ini akan dideskripsikan secara berurutan dalam bagian-bagian berikut ini:

#### **a. Penyelenggaraan Pendidikan**

Penyelenggaraan pendidikan dalam penelitian ini diungkap dengan menggunakan 10 item yang masing-masing menggunakan 4 option.



Berdasarkan instrumen ini dapat dideskripsikan masing-masing item sebagai berikut:

1). Usaha Sekolah dalam Pencapaian Visi dan Misi

Setiap sekolah memiliki visi yang merupakan acuan untuk menyusun program jangka panjang oleh sekolah dan misi adalah merupakan penjabaran dari visi yang lebih operasional sebagai acuan penyusunan tujuan jangka pendek yang ada pada sekolah. Selain itu visi dan misi yang dimiliki sekolah juga dijadikan sebagai barometer terhadap kualitas pendidikan yang telah dicapai oleh sekolah. Pada umumnya setiap sekolah memiliki upaya yang berbeda dalam pencapaian visi dan misi yang dirumuskan.

Hasil penelitian yang dilaksanakan di wilayah Kabupaten Banjarnegara terhadap upaya yang dilakukan sekolah dalam mencapai visi dan misi dapat dideskripsikan sebagai berikut:

Tabel: 15  
Deskripsi Upaya Sekolah Dalam Pencapaian Visi dan Misi

No	Kategori	Frekuensi	Prosentase
1.	Sama Sekali	72	67,9%
2.	Baru sedikit	31	29,3%
3.	Sebagian besar	3	2,8%
4.	Sudah sepenuhnya	0	0%
Total		106	100%

Sumber: Instrumen Penyelenggaraan Pendidikan Item 1-4

Tabel di atas dapat ditafsirkan bahwa upaya yang dilakukan oleh sekolah-sekolah yang ada di Kabupaten Banjarnegara dalam upaya mencapai visi dan misi yang telah dicanangkan, sebagaimana yang tertuang dalam instrumen penelitian item 1 sampai dengan 4 dapat dilihat bahwa 67,9% masih masuk dalam kategori belum memiliki upaya sama sekali untuk mewujudkan visi dan misi sekolah, 29,3% dalam kategori memiliki sedikit upaya untuk mencapai visi dan misi sekolah, dan hanya 2,8% yang masuk dalam kategori memiliki sebagian besar aktivitas sekolah diarahkan untuk mencapai visi dan misi sekolah, serta tidak ada yang aktivitas sekolahnya sepenuhnya untuk mencapai visi dan misi sekolah.

Hasil di atas menunjukkan bahwa sekolah yang ada di Kabupaten Banjarnegara baik tingkat sekolah dasar, sekolah lanjutan tingkat pertama, maupun sekolah lanjutan tingkat atas masih perlu meningkatkan upaya dalam meningkatkan pencapaian visi dan misi sekolah.

## 2). Deskripsi Sinergi Kegiatan Komponen Sekolah

Sekolah adalah salah satu bentuk organisasi yang memiliki komponen-komponen kepala sekolah, guru, siswa, sarana prasarana, tujuan, dan lingkungan sekolah. Komponen-komponen yang ada di sekolah ini harus memiliki aktivitas yang memiliki peran saling

Tabel yang disajikan di atas memberikan gambaran tentang perumusan tujuan yang dilakukan sekolah di Kabupaten Banjarnegara 27,4% sama sekali belum operasional, 51,9% tujuan yang dirumuskan baru sedikit yang operasional, 19,8% sebagian besar tujuan sekolah telah dirumuskan secara operasional, dan hanya 0,9% sekolah telah sepenuhnya mampu merumuskan tujuan secara operasional, sehingga kegiatan yang dilakukan sekolah dapat mengacu pada tujuan yang ada, selain itu tujuan yang dirumuskan secara operasional akan lebih mudah proses pengukuran keberhasilan atau tingkat pencapaiannya.

Keadaan di atas menunjukkan bahwa sebagian besar sekolah yang ada di Kabupaten Banjarnegara hampir 80% belum merumuskan tujuan secara operasional agar dapat diukur secara tepat, realita ini memberikan gambaran bahwa tujuan yang digunakan oleh guru masih belum jelas sehingga pencapaian tujuan yang telah dirumuskan sulit untuk diukur.

##### 5). Deskripsi Keseimbangan Kegiatan Sekolah.

Kegiatan yang dilaksanakan mencakup berbagai jenis kegiatan yang terdiri dari kegiatan intrakurikuler, kokurikuler, dan ekstra kurikuler pada prinsip diarahkan untuk mencapai tujuan yang telah dirumuskan. Berbagai macam kegiatan yang telah direncanakan harus dilaksanakan secara seimbang. Keseimbangan kegiatan yang dirumuskan akan

50,9% sekolah yang ada di Kabupaten Banjarnegara pemahaman guru dan penyelenggaranya terhadap tujuan berada pada kategori sedikit memahami, sedangkan komponen sekolah yang memiliki pemahaman sebagian besar tujuan sekolah di Kabupaten Banjarnegara sebesar 22,6%, serta unsur sekolah yang memahami sepenuhnya tujuan sekolah tidak ada.

#### 4). Deskripsi Operasionalisasi Tujuan Sekolah

Tujuan yang dirumuskan oleh sekolah pada dasarnya sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan yang ada di sekolah. Oleh karena itu setiap tujuan yang dirumuskan sekolah harus disusun secara operasional, agar dapat lebih mudah dilaksanakan dan lebih mudah untuk diukur tingkat pencapaiannya. Sekolah yang merumuskan tujuan secara operasional akan memberikan kemudahan terhadap semua komponen sekolah untuk menjabarkan dalam kegiatan yang sifatnya lebih operasional. Selain itu proses pengukuran keberhasilan yang dilakukan oleh pimpinan yang ada di sekolah dapat dilaksanakan secara tepat. Berdasarkan instrumen penelitian dapat dideskripsikan sebagai berikut:

Tabel: 18  
Deskripsi Operasionalisasi Tujuan Sekolah

No	Kategori	Frekuensi	Prosentase
1.	Sama Sekali	29	27,4%
2.	Baru sedikit	55	51,9%
3.	Sebagian besar	21	19,8%
4.	Sudah sepenuhnya	1	0,9%
Total		106	100%

Sumber: Instrumen Penyelenggaraan Pendidikan Item 7

Tujuan atau misi yang dimiliki suatu sekolah merupakan bagian yang sangat strategis, karena tujuan yang sudah dirancang akan merupakan acuan dari setiap kegiatan yang dilakukan oleh semua komponen sekolah. Pemahaman terhadap tujuan yang dicanangkan oleh sekolah mempengaruhi arah dan jenis serta kualitas kegiatan yang dilaksanakan setiap komponen. Oleh karena itu sosialisasi tujuan yang dilakukan oleh sekolah terhadap semua komponen baik penyelenggara maupun guru serta siswa ini sangat penting. Bagian ini disajikan deskripsi pemahaman komponen sekolah terhadap tujuan yang dicanangkan sekolah.

Tabel: 17  
Deskripsi Sosialisasi Tujuan Sekolah

No	Kategori	Frekuensi	Prosentase
1.	Sama Sekali	28	26,4%
2.	Baru sedikit	54	50,9%
3.	Sebagian besar	24	2,8%
4.	Sudah sepenuhnya	0	0%
Total		106	100%

Sumber: Instrumen Penyelenggaraan Pendidikan Item 6

Sajian hasil analisis data di atas menunjukkan bahwa proses sosialisasi tujuan yang dimiliki sekolah terhadap semua komponen sekolah belum memenuhi sasaran yang optimal. Hal ini didasarkan pada deskripsi data yang menunjukkan 26,4% sekolah memberikan informasi bahwa komponen sama sekali belum memahami tujuan yang dimiliki sekolah,

mendukung dalam rangka pencapaian visi dan misi sekolah. Berikut ini dapat di deskripsikan tentang sinergi komponen yang ada di sekolah.

Tabel: 16  
Deskripsi Sinergi Komponen Sekolah

No	Kategori	Frekuensi	Prosentase
1.	Sama Sekali	31	29,2%
2.	Baru sedikit	55	51,9%
3.	Sebagian besar	18	17,0%
4.	Sudah sepenuhnya	2	1,9%
Total		106	100%

Sumber: Instrumen Penyelenggaraan Pendidikan Item 5

Hasil analisis data penelitian di atas memberikan gambaran bahwa sinergi komponen yang ada di sekolah di Kabupaten Banjarnegara baru 1,9% sekolah yang komponennya sudah sepenuhnya memiliki sinergi, sekolah yang komponennya sebagian besar memiliki sinergi aktivitas baru sebesar 17%, sedangkan sekolah yang sebagian kecil komponennya memiliki sinergi sebesar 51,9%, serta 29,2% sekolah yang komponennya sama sekali tidak memiliki sinergi dalam melakukan aktivitas untuk mencapai visi dan misi sekolah.

Fakta di atas memberikan informasi bahwa sinergi aktivitas yang dilakukan sekolah yang ada di Kabupaten Banjarnegara apabila dicermati masih dalam kategori yang memprihatinkan karena kurang lebih 80% sekolah yang ada masih memiliki sinergi yang sangat rendah.

### 3). Deskripsi Sosialisasi Misi Sekolah

memberikan hasil optimal dalam pencapaian visi dan misi yang dimiliki sekolah.

Tabel: 19  
Deskripsi Keseimbangan Kegiatan Sekolah

No	Kategori	Frekuensi	Prosentase
1.	Sama Sekali	35	33,0%
2.	Baru sedikit	55	51,9%
3.	Sebagian besar	14	13,2%
4.	Sudah sepenuhnya	2	1,9%
Total		106	100%

Sumber: Instrumen Penyelenggaraan Pendidikan Item 9

Hasil analisis yang disajikan dalam tabel di atas dapat diinformasikan bahwa keseimbangan pelaksanaan kegiatan pendidikan yang ada di sekolah Kabupaten Banjarnegara 33% berada pada kategori sama sekali tidak seimbang, 51,9% termasuk pada kategori sedikit seimbang, 13,2% menyatakan hampir seimbang, dan 1,9% sudah seimbang sepenuhnya.

#### 6. Deskripsi Efisiensi Kegiatan Program Sekolah.

Sekolah yang merupakan organisasi selalu dituntut adanya efisiensi untuk melaksanakan semua kegiatan. Dana dan sumber daya yang dimiliki oleh sekolah harus dimanfaatkan secara efisien, baik yang mencakup kegiatan intra kurikuler, ko-kurikuler, maupun kegiatan extra kurikuler. Selain itu dana yang dimiliki sekolah selain berasal dari bantuan pemerintah untuk sekolah negeri maupun dana yang dimiliki oleh sekolah

swasta yang berasal dari masyarakat. Hasil penelitian tentang efisiensi ini dapat diperhatikan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel: 20  
Deskripsi Tingkat Efisiensi Sekolah

No	Kategori	Frekuensi	Prosentase
1.	Sama Sekali	23	21,7%
2.	Baru sedikit	64	60,4%
3.	Sebagian besar	18	17,0%
4.	Sudah sepenuhnya	1	0,9%
Total		106	100%

Sumber: Instrumen Penyelenggaraan Pendidikan Item 8

Tabel di atas memberikan gambaran tentang tingkat efisiensi dan efektivitas sekolah dalam melaksanakan program kegiatan yang ada di sekolah 21,7% sama sekali tidak efisien, 60,4% responden memberikan informasi bahwa menyatakan baru sedikit yang efisien, 17% sekolah dalam melaksanakan kegiatan sebagian besar sudah efisien, dan 0,9% sekolah yang melaksanakan kegiatan sepenuhnya sudah efisien.

#### 7). Deskripsi Relevansi Kegiatan Dengan Tuntutan Masyarakat

Sekolah sebagai lembaga pendidikan yang berada dalam masyarakat sebagai lembaga yang mestinya memberikan pelayanan dan memberikan pertanggungjawaban pada masyarakat, karena masyarakat adalah sebagai pemakai dan pemilik sekolah. Sehingga keberhasilan yang optimal sekolah itu dapat diukur dari rasa puas masyarakat pemakai



sekolah terhadap hasil proses pendidikan yang dilaksanakan sekolah. Oleh karena itu sekolah harus mampu melaksanakan kegiatan sesuai dengan tuntutan masyarakat. Berikut ini disajikan hasil analisis data dari responden penelitian:

Tabel: 21  
Deskripsi Relevansi Kegiatan Sekolah  
Dengan Tuntutan Masyarakat

No	Kategori	Frekuensi	Prosentase
1.	Sama Sekali	31	29,2%
2.	Baru sedikit	47	44,4%
3.	Sebagian besar	28	24,5%
4.	Sudah sepenuhnya	2	1,9%
Total		106	100%

Sumber: Instrumen Penyelenggaraan Pendidikan Item 10

Tabel yang tersaji di atas menggambarkan bahwa relevansi pelaksanaan kegiatan sekolah dengan tuntutan masyarakat yang berada pada kategori belum sama sekali 29,2% sekolah, yang berada pada kategori baru sedikit yang sesuai dengan tuntutan masyarakat sebesar 44,4% sekolah, yang berada pada kategori sebagian besar sudah sesuai dengan tuntutan masyarakat sebesar 24,5%, sedangkan yang sepenuhnya sesuai dengan tuntutan masyarakat hanya 1,9% sekolah. Keadaan ini memberikan pengertian bahwa sebagian besar sekolah yang ada di Kabupaten Banjarnegara masih belum dapat memberikan kepuasan masyarakat dalam melaksanakan kegiatan.

Deskripsi data setiap item yang ada di atas memberikan gambaran setiap unsur yang ada dalam penyelenggaraan pendidikan dalam rangka melaksanakan kegiatan pembelajaran dengan model MBS. Bagian berikut ini akan disajikan hasil analisis pada seluruh indikator penyelenggaraan pendidikan dengan model MBS.

Instrumen penelitian yang terdiri 10 item dengan option yang berjumlah 4 buah. Maka berdasarkan instrumen ini dapat ditentukan skor maksimal ideal ( $S_{maks}$ ) sebesar 40, skor minimal ideal ( $S_{min}$ ) sebesar 10, Rentangan ( $R$ ) sebesar 30, dan Interval 10.

Mengacu hasil perhitungan di atas, maka dapat dibuat kriteria analisis deskripsi sub variabel penyelenggaraan pendidikan adalah sebagai berikut:

Tabel: 22  
Kriteria analisis Sub Variabel Penyelenggaraan Pendidikan

No	Kategori	Interval
1.	Rendah	Kurang dari 21
2.	Cukup	21 - 30
3.	Tinggi	31 keatas

Sumber: Instrumen Penelitian Item 1-10

Kriteria analisis di atas dijadikan landasan untuk menganalisis data yang dikumpulkan dalam penelitian ini, sehingga sub variabel penyelenggaraan pendidikan dapat dideskripsikan sebagai berikut:

Tabel: 23  
Deskripsi Sub Variabel Penyelenggaraan Pendidikan

No	Kategori	Interval	Frekuensi	Prosentase
1.	Rendah	Kurang dari 21	56	52,8
2.	Cukup	21 - 30	44	41,5
3.	Baik	31 keatas	6	5,7
Jumlah			106	100

Sumber: Instrumen Penelitian Item 1-10

Tabel hasil analisis yang disajikan di atas memberikan informasi bahwa kualitas penyelenggaraan pendidikan di Kabupaten Banjarnegara pabila dikaji berdasarkan konsep Manajemen Berbasis Sekolah sebagian besar masih berada pada tingkat rendah sebesar 52,8%, dan sebesar 41,5% memiliki kualitas cukup, serta hanya 5,7% yang memiliki kualitas penyelenggaraan pendidikan yang baik.

Fakta ini memang memberikan informasi yang cukup berarti bagi kalangan penyelenggara pendidikan maupun para pihak yang berwenang di bidang pendidikan terutama Pemerintah Daerah Kabupaten Banjarnegara.

Informasi ini didukung oleh hasil wawancara dengan pihak terkait terutama para penyelenggara pendidikan sebagai berikut:

Menurut Sltu yang memberikan informasi berkaitan dengan kualitas penyelenggaraan pendidikan sebagai berikut:

“ Kualitas penyelenggaraan pendidikan di sekolah ini, apabila diukur dari konsep baru tentang MBS .... Ya masih sangat

kurang Pak!, Apalagi konsep itu masih baru disosialisasikan pada sekolah tertentu. Sehingga disini akan menerapkan konsep itu ... masih harus berjuang keras dengan berbagai pertimbangan. Saya kira masalah ini masih sangat umum bagi sekolah-sekolah yang ada di Kabupaten Banjarnegara” (Hasil salah satu penyelenggara MTs Swasta).

Hasil wawancara ini memberikan gambaran bahwa masalah kualitas penyelenggaraan yang diukur dari konsep MBS untuk sekolah yang ada di Kabupaten Banjarnegara memang masih banyak sekolah yang masih dibawah standar yang ditetapkan. Hal ini sebagian besar disebabkan oleh kondisi objektif yang dimiliki oleh sekolah masing-masing. Sesuai dengan hasil wawancara terhadap beberapa pihak di berbagai sekolah yang menyatakan sebagai berikut:

“Pelaksanaan konsep MBS sebagai ukuran kualitas penyelenggaraan pendidikan, saya yakin sulit untuk dilakukan apabila kondisi objektif yang ada di sekolah-sekolah masih seperti sekarang ini. Terutama masalah kurikulum dan pengukuran prestasi belajar masih ditekankan pada aspek kognitif semata. Karena guru khususnya sekolah pada umumnya memiliki beban target untuk mencapai standar nilai yang harus dapat bersaing dengan sekolah lain. Mana mungkin sekolah berani meninggalkan target ini, dengan membuat terobosan metode yang kreatif “. (Hasil wawancara dengan Bd. B, yang didukung Hrn, Bmb H, dan Ed)

Pendapat yang disampaikan oleh beberapa orang di atas, memberikan informasi yang semakin jelas mereka menyadari bahwa penyelenggaraan pendidikan yang ada di sekolah tempat mereka berkarya masih belum memenuhi kriteria dalam pelaksanaan MBS karena kendala-

kendala kurikulum, target sekolah dan pendidikan, serta kebijakan-kebijakan yang ada di sekolah. Terutama sekolah pada tingkat dasar dan sekolah swasta yang berada di daerah. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara yang pada umumnya menyatakan:

“Kami yang berada di sekolah dasar ini tidak semudah mengubah suatu kegiatan pembelajaran yang ada pada tingkat yang lebih tinggi. Keadaan fasilitas yang kami miliki juga belum memadai, siswa yang masih kecil-kecil ini juga menjadi kendala yang tak mudah mengatasinya”. (Hasil wawancara dengan SKN)

Hasil wawancara ini didukung oleh hasil wawancara dengan Id yang menyatakan sebagai berikut:

“Sekolah kami ini ada di pelosok seperti ini untuk memenuhi target yang dengan model lama saja kami belum mampu memenuhi harapan sepenuhnya. Apalagi dengan model MBS yang sangat tinggi tuntutan. Bapak dapat melihat kondisi masyarakat di sini dengan keadaan ekonomi seperti ini anak masuk sekolah rutin saja masih sulitnya bukan main”.

#### b. Pelaksanaan PAKEM Oleh Guru.

Pelaksanaan PAKEM Oleh Guru dalam penelitian ini diungkap dengan menggunakan 10 item yang masing-masing menggunakan 4 option. Sub variabel ini dapat dirinci menjadi menjadi beberapa unsur yaitu aktivitas guru dalam pembelajaran, kreativitas guru dalam pembelajaran, efektivitas guru dalam pembelajaran, dan pengembangan proses pembelajaran yang menyenangkan. Berdasarkan penjelasan ini, maka pada bagian berikut ini disajikan deskripsi masing-masing unsur:

### 1). Deskripsi Aktivitas Guru Dalam Pembelajaran

Aktivitas guru dalam proses pembelajaran akan sangat menentukan keberhasilan pembelajaran. Aktivitas ini mencakup intensitas guru dalam menyampaikan materi pembelajaran, intensitas guru dalam memantau proses pembelajaran, kemampuan guru dalam menyampaikan pertanyaan yang dapat merangsang siswa, serta kemampuan guru untuk memancing menyampaikan gagasan-gagasan. Unsur-unsur aktivitas guru ini diungkap dengan menggunakan instrumen penelitian sejumlah 5 item dengan menggunakan 4 option.

Mengacu pada instrumen penelitian ini, maka dapat ditentukan skor maksimal ideal sebesar 20, skor minimal ideal sebesar 5, Range 15, dan deviasi standar sebesar 2,5. Berdasarkan perhitungan ini dapat dibuat kriteria analisis sebagai berikut:

Tabel: 24  
Kriteria analisis Sub Variabel Penyelenggaraan Pendidikan

No	Kategori	Interval
1.	Sama sekali	Kurang dari 8,75
2.	Baru sebagian kecil	8,75 – 12,5
3	Sebagian besar	12,5 – 16,25
4.	Sudah sepenuhnya	16,26 keatas

Sumber: Instrumen Penelitian Pakem Guru Item 1-5

Data yang dikumpulkan melalui penelitian dengan menggunakan kriteria analisis di atas dapat dideskripsikan seperti pada bagian berikut ini:

Tabel: 25  
Deskripsi Indikator Aktivitas Guru Pelaksanaan PAKEM

No	Kategori	Interval	Frekuensi	Prosen
1.	Sama Sekali belum	Kurang dari 8,75	72	67,9
2.	Baru sebagian	8,75 – 12,5	31	29,2
3.	Sebagian besar sudah	12,5 – 16,25	3	2,9
4.	Sudah Sepenuhnya	16,26 keatas	0	0
Jumlah			106	100

Sumber: Data Penelitian Instrumen Pelaksanaan PAKEM Oleh Guru Item 1-10

Tabel yang disajikan di atas memberikan informasi bahwa kualitas aktivitas guru apabila dikaji dari standar MBS dapat ditafsirkan bahwa aktivitas guru untuk melaksanakan proses pembelajaran yang sama sekali belum sesuai dengan standar MBS 67,9%, yang baru sebagian kecil unsur sesuai dengan 29,2%, sedangkan aktivitas guru yang sebagian besar sesuai dengan standar MBS hanya sebesar 2,9% dan yang sepenuhnya sesuai dengan standar MBS tidak ada.

Memperhatikan hasil analisis di atas dapat dijelaskan bahwa sebagian besar guru sekolah di Kabupaten Banjarnegara aktivitas yang dijalankan belum sesuai standar MBS.

## 2). Deskripsi Kreativitas Guru Dalam Pembelajaran

Pembelajaran yang dikembangkan guru diharapkan dapat menarik perhatian siswa, sehingga siswa dapat belajar dengan penuh. Hal ini dapat dilakukan guru dengan mengembangkan pembelajaran secara kreatif dalam bentuk pengembangan pembelajaran dan alat peraga yang beragam.

Hasil penelitian menunjukkan kreativitas guru dalam mengembangkan pembelajaran yang menarik dapat diperhatikan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel.26  
Deskripsi Relevansi Kegiatan Sekolah  
Dengan Tuntutan Masyarakat

No	Kategori	Frekuensi	Prosentase
1.	Sama Sekali	46	43,4%
2.	Baru sedikit	54	50,9%
3.	Sebagian besar	6	5,7%
4.	Sudah sepenuhnya	0	0%
Total		106	100%

Sumber: Instrumen Pelaksanaan Pakem Oleh Guru Item 10

Tabel di atas menunjukkan bahwa realita kreativitas guru dalam mengelola proses pembelajaran di sekolah masing-masing yang sama sekali belum sesuai dengan kriteria MBS sebesar 43,4%, yang sebagian kecil memiliki kreativitas yang sesuai dengan MBS 50,9%, dan yang memiliki kreativitas sebagian besar sesuai dengan kriteria MBS sebesar 5,7%, sedang yang kreativitasnya sepenuhnya sesuai dengan kriteria MBS tidak ada sama sekali.

Hasil penelitian ini dapat diartikan bahwa dalam proses pembelajaran yang dikembangkan guru masih belum sepenuhnya mendasarkan pada aspek kreativitas, sehingga pembelajaran menjadi kurang menarik minat siswa.



### 3). Deskripsi Efektivitas Guru Dalam Pembelajaran

Pengembangan kegiatan pembelajaran dengan berbagai upaya yang dilakukan oleh guru pada dasarnya adalah untuk meningkatkan efektivitas pembelajaran. Efektivitas pembelajaran yang dikembangkan guru dalam kelas ukuran yang sebenarnya adalah tercapainya tujuan yang dirancang serta yang dicanangkan dalam kurikulum yang telah disusun. Secara keseluruhan belajar yang efektif dapat dicapai apabila anak telah menguasai semua kemampuan baik dari sisi pengetahuan, sikap, maupun keterampilan yang sudah ditentukan.

Hasil penelitian efektivitas proses pembelajaran yang dikembangkan guru di Kabupaten Banjarnegara adalah sebagai berikut:

Tabel: 27  
Deskripsi Efektivitas Kegiatan Pembelajaran

No	Kategori	Frekuensi	Prosentase
1.	Sama Sekali	53	50,00%
2.	Baru sedikit	45	42,5%
3.	Sebagian besar	8	7,5%
4.	Sudah sepenuhnya	0	0%
Total		106	100%

Sumber: Instrumen Pelaksanaan Pakem Oleh Guru

Hasil analisis yang tersaji di atas memberikan informasi kepada kita bahwa efektivitas pembelajaran yang dikembangkan oleh guru dalam mencapai tujuan yang telah ditentukan dalam kurikulum. Sebaran

frekuensi dari data hasil penelitian bahwa 53% guru sama sekali belum mampu menciptakan pembelajaran yang efektif, sedangkan 42,5% sekolah proses pembelajaran yang dikembangkan baru sebagian kecil mencapai sasaran, dan 7,5% sudah sebagian besar mampu mengembangkan proses pembelajaran yang efektif, serta yang seratus persen efektif tidak ada sama sekali.

#### 4). Deskripsi Pengembangan Pembelajaran Menyenangkan

Pembelajaran yang berhasil harus dilakukan dengan mampu menciptakan suasana psikologis anak yang menyenangkan. Dengan suasana hati yang menyenangkan anak akan memberikan peluang yang besar untuk memaknai materi pembelajaran yang disajikan oleh guru. Oleh karena kualitas pembelajaran salah satunya dapat diukur dengan kemampuan guru menciptakan suasana psikologis anak yang bebas, tidak tertekan, senang untuk belajar.

Berikut ini disajikan hasil analisis data yang didasarkan data penelitian.

Tabel: 28  
Deskripsi Upaya Guru Untuk Menciptakan  
Pembelajaran Yang Menyenangkan

No	Kategori	Frekuensi	Prosentase
1.	Sama Sekali	28	26,4%
2.	Baru sedikit	61	57,5%
3.	Sebagian besar	17	16%
4.	Sudah sepenuhnya	0	0%
Total		106	100%

Sumber: Instrumen Pelaksanaan Pakem Oleh Guru Item 10

Sajian data hasil analisis di atas memberikan gambaran bahwa guru yang sama sekali belum dapat menciptakan proses pembelajaran yang menyenangkan sebesar 26,4%, yang baru sebagian kecil proses pembelajaran yang menyenangkan sebesar 57,5%, dan 16% guru yang mampu menciptakan sebagian besar kegiatan dikembangkan menyenangkan, sedangkan guru yang mampu sepenuhnya mengembangkan pembelajaran menyenangkan belum ada sama sekali.

Setelah dianalisis setiap sub indikator dan setiap item, maka berikut ini disajikan hasil analisis keseluruhan indikator.

Berdasarkan instrumen ini yang terdiri 10 item dengan 4 option, maka dapat ditentukan skor maksimal ideal ( $S_{maksI}$ ) sebesar 40, skor minimal ideal ( $S_{minI}$ ) sebesar 10, Rentangan ( $R$ ) sebesar 30, dan Interval 10.

Mengacu hasil perhitungan di atas, maka dapat dibuat kriteria analisis deskripsi sub variabel pelaksanaan PAKEM oleh guru adalah sebagai berikut:

Tabel: 29  
Kriteria analisis Sub Variabel Pelaksanaan PAKEM Oleh Guru

No	Kategori	Interval
1.	Rendah	Kurang dari 21
2.	Cukup	21 - 30
3.	Tinggi	31 keatas

Sumber: Instrumen Pelaksanaan PAKEM Oleh Guru Item 1-10

Kriteria analisis di atas dijadikan landasan untuk menganalisis data yang dikumpulkan dalam penelitian ini, sehingga sub variabel pelaksanaan PAKEM oleh guru dapat dideskripsikan sebagai berikut:

Tabel: 30  
Deskripsi Sub Variabel Pelaksanaan PAKEM Oleh Guru

No	Kategori	Interval	Frekuensi	Prosentase
1.	Rendah	Kurang dari 21	54	50,9
2.	Cukup	21 - 30	42	39,6
3.	Tinggi	31 keatas	10	9,5
Jumlah			106	100

Sumber: Data Penelitian Instrumen Pelaksanaan PAKEM Oleh Guru Item 1-10

Tabel hasil analisis di atas memberikan informasi bahwa kualitas kegiatan guru dalam melaksanakan PAKEM yang termasuk pada kategori rendah sebesar 50,9%, sedangkan yang memiliki kualitas cukup sebesar

39,6%, dan yang memiliki kualitas dalam melaksanakan kegiatan sesuai dengan pembelajaran PAKEM sebesar 9,5%. Hal ini dapat ditafsirkan bahwa sebagian besar guru belum dapat mengembangkan proses pembelajaran yang sesuai dengan konsep pembelajaran PAKEM, hanya sebagian kecil yang mampu menciptakan proses pembelajaran yang sesuai dengan konsep PAKEM.

Proses pembelajaran aktif, kreatif, dan menyenangkan (PAKEM) adalah proses pembelajaran yang menumbuhkan sikap aktif dengan mengedepankan aspek-aspek manusiawi yang dilandasi dengan sikap dan suasana yang demokratis. Suasana ini dapat tercipta apabila guru mampu mewujudkan suasana pembelajaran dengan yang menantang dengan menggunakan alat bantu yang beragam. Selain itu guru harus mampu menciptakan suasana yang menyenangkan sehingga anak berani menyampaikan gagasan-gagasan yang mereka inginkan, tanpa dihindangi rasa takut salah, dan takut tidak dihargai. Proses pembelajaran ini akan membuat anak belajar dengan lepas dari tekanan lingkungan mereka.

Suasana yang demikian ini memang di sebagian besar sekolah di Kabupaten Banjarnegara belum terwujud, karena beberapa faktor sebagaimana pengakuan dari para sumber data sebagai berikut:

Menurut Dsrn yang menyatakan "Sebenarnya guru tidak keberatan untuk membuat situasi pembelajaran yang bebas, sehingga anak dapat belajar secara bebas sesuai dengan yang mereka kehendaki, bebas mengemukakan gagasan, tetapi guru

sekarang ini tidak mungkin melaksanakan proses seperti itu karena tuntutan pencapaian materi pembelajaran yang begitu padat”

Pendapat di atas memberikan petunjuk bahwa kebijakan tentang pelaksanaan pembelajaran dengan konsep belajar PAKEM, masih ada kendala masalah kurikulum yang ada di sekolah. Hal ini didukung informasi yang disampaikan oleh sumber lain sebagai berikut :

“ ....Mana mungkin seorang guru mengubah kurikulum dan materi pembelajaran yang masih resmi dipakai di sekolah-sekolah, karena evaluasi yang dilakukan masih mengacu materi yang ada dalam kurikulum tersebut. Apalagi ukuran keberhasilan pembelajaran masih mengacu pencapaian skor yang didominasi aspek kognitif” (Hasil wawancara dengan St. Zlk)

Informasi lain yang menjadi kendala tentang upaya guru untuk menciptakan proses pembelajaran sesuai dengan konsep PAKEM, adalah faktor alam yang berbeda antara lokasi yang ada memiliki implikasi yang sangat besar terhadap guru. Hal ini sesuai dengan pendapat beberapa sumber yang menyatakan:

“... Guru yang ada sekarang ini sebagian besar masih muda-muda sebenarnya sangat potensial untuk diarahkan melaksanakan pembelajaran model PAKEM yang membutuhkan perhatian yang tinggi terhadap profesi sebagai guru. Mereka harus secara intens menyiapkan, melaksanakan, sampai mengevaluasi pembelajaran. Hal ini membutuhkan konsentrasi yang penuh tanpa terganggu oleh aktivitas maupun pikiran lain” (Hasil Wawancara dengan Ka. Kadiknas Banjarnegara)

Hasil wawancara ini dikuatkan oleh pendapat beberapa guru yang menyatakan:

“... Pembelajaran dengan model PAKEM memang sangat bagus, namun tuntutananya terhadap aktivitas yang harus dilakukan oleh guru memang luar biasa. Hal ini dapat saja kami lakukan asal kebutuhan yang menjadi tanggung jawab kami terhadap keluarga sudah tercukupi. Yaa... kalau kami sekarang ini harus melakukan pembelajaran model PAKEM secara utuh tidak mungkin, karena kami harus masih berpikir mencari penghasilan tambahan untuk mencukupi kebutuhan keluarga” (Hasil Wawancara Hrtn, yang didukung beberapa guru)

Hasil wawancara lain yang memperkaya pendapat beberapa guru menyatakan:

“...Sebagaimana hasil penataran yang saya ikuti salah satu kunci suksesnya pelaksanaan MBS adalah partisipasi masyarakat terhadap pelaksanaan pendidikan di suatu sekolah. Lha mungkin salah satu pemecahan untuk meningkatkan pendapatan guru agar dapat melaksanakan pembelajaran Model PAKEM dengan menggali dana dari masyarakat. Ini mungkin dilakukan untuk sekolah yang ada di kota-kota....”(Hasil wawancara dengan Bdyn)

#### c. Pelaksanaan PAKEM Oleh Siswa

Pembelajaran dengan model PAKEM memiliki implikasi terhadap kegiatan pembelajaran yang dilakukan dan dialami oleh siswa. Pembelajaran ini harus memenuhi beberapa unsur yaitu proses pembelajaran ini harus mengaktifkan siswa dari aspek fisik, emosi, dan pikiran. Selain itu pembelajaran ini mampu menciptakan suasana kreativitas, dan suasana menyenangkan, serta dapat mencapai tujuan yang

sudah dirumuskan. Berdasarkan kerangka pemikiran seperti ini, maka dalam dalam bagian berikut ini dipaparkan hasil penelitian keadaan pelaksanaan PAKEM ditinjau dari aspek siswa.

#### 1). Keaktifan Siswa Dalam Proses Pembelajaran.

Pembelajaran yang dituntut dalam MBS dengan model Pakem harus mampu menciptakan situasi pembelajaran yang aktif. Keaktifan ini tidak hanya keaktifan dari aspek fisik semata, tetapi juga mencakup keaktifan dari aspek pikiran dan emosional yang dimiliki oleh anak. Bentuk keaktifan ini dapat ditunjukkan dari fakta pembelajaran yang dipraktekkan di setiap sekolah kemauan dan keberanian siswa menanyakan kesulitan belajar yang dialami, keberanian dan kemauan siswa untuk mengemukakan pendapat maupun tanggapan terhadap materi pembelajaran, kebiasaan siswa untuk bersikap demokratis dalam pembelajaran. Keadaan yang terjadi di lapangan dapat diperhatikan hasil analisis dalam tabel sebagai berikut:

Tabel: 31  
Deskripsi Aktivitas Pembelajaran Siswa

No	Kategori	Frekuensi	Prosentase
1.	Sama Sekali	42	39,6%
2.	Baru sedikit	60	56,6%
3.	Sebagian besar	4	3,8%
4.	Sudah sepenuhnya	0	0%
Total		106	100%

Sumber: Instrumen Pelaksanaan Pakem Oleh Siswa Item 1-5



Memperhatikan sebaran data yang sudah dianalisis dapat ditafsirkan bahawa aktivitas pembelajaran anak ayang ada di sekolah Kabupaten Banjarnegara apabila diukur dari kriteria pembelajaran Pakem 39,6% proses pembelajaran sama sekali siswa belum aktif, 56,6% proses pembelajaran yang dilaksanakan di sekolah siswa sebagian kecil aktif, dan 3,8% proses pembelajaran di sekolah sebagian besar siswa aktif, sedangkan sekolah yang menyelenggarakan proses pembelajaran dengan siswa sepenuhnya aktif belum ada (0%).

Berdasarkan deskripsi di atas dapat disimpulkan bahwa sebagian besar sekolah di Kabupaten Banjarnegara aktivitas siswa dalam pembelajaran yang mencakup keberanian dan kemauan bertanya, memberikan tanggapan, serta menyampaikan pendapat masih dalam kategori rendah.

## 2). Kreativitas Siswa Dalam Pembelajaran.

Kreativitas adalah salah satu kriteria dalam pembelajaran dengan model Pakem. Kreativitas ini selain dituntut dimiliki oleh guru, juga harus dimiliki oleh siswa. Kreativitas dalam pembelajaran yang dilakukan oleh siswa paling tidak mencakup aspek kemampuan menghasilkan gagasan yang lebih luas dari materi yang disampaikan guru dan mampu merancang hasil kerja yang merupakan pengembangan materi yang disampaikan guru.

Kreativitas siswa yang dapat teramati berdasarkan data penelitian di lapangan dapat disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel: 32  
Deskripsi Kreativitas Pembelajaran Siswa

No	Kategori	Frekuensi	Prosentase
1.	Sama Sekali	76	71,7%
2.	Baru sedikit	30	28,3%
3.	Sebagian besar	0	0%
4.	Sudah sepenuhnya	0	0%
Total		106	100%

Sumber: Instrumen Pelaksanaan Pakem Oleh Siswa Item 29-30

Tabel di atas memberikan informasi bahwa kreativitas siswa dalam proses pembelajaran yang dilaksanakan sekolah-sekolah Kabupaten Banjarnegara 71,7% sama sekali siswa belum memiliki kreativitas, 28,3% siswa yang ada di sekolah Kabupaten Banjarnegara baru sebagian kecil yang memiliki kreativitas, sedangkan yang sebagian besar pembelajaran yang dikembangkan mampu menciptakan kreativitas anak belum ada (0%), apalagi yang sepenuhnya mampu menciptakan kreativitas anak dalam proses pembelajaran belum ada sama sekali (0%).

### 3). Suasana Pembelajaran Yang Menyenangkan.

Pembelajaran dengan model Pakem memberikan persyaratan bahwa pelaksanaan pembelajaran siswa dalam suasana yang menyenangkan. Suasana ini akan tercermin dengan keadaan siswa mulai

berangkat sekolah sampai pulang sekolah terlihat memiliki semangat yang secara faktual dapat teramati siswa masuk sekolah tidak pernah terlambat, siswa belajar dalam kompetisi yang positif, dan siswa ada kemauan untuk menyelesaikan tugas di rumah. Kegiatan ini dilaksanakan secara sukarela tanpa ada beban yang ada dalam perasaan siswa.

Berdasarkan data yang diperoleh di lapangan setelah dianalisis dapat disajikan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel: 33  
Deskripsi Pembelajaran Siswa Yang Menyenangkan

No	Kategori	Frekuensi	Prosentase
1.	Sama Sekali	64	60,4%
2.	Baru sedikit	42	39,6%
3.	Sebagian besar	0	0%
4.	Sudah sepenuhnya	0	0%
Total		106	100%

Sumber: Instrumen Pelaksanaan Pakem Oleh Siswa Item 31-34

Memperhatikan hasil analisis yang berada pada tabel di atas dapat dijelaskan bahwa suasana pembelajaran yang menyenangkan bagi siswa pada sekolah-sekolah secara keseluruhan di Kabupaten Banjarnegara 60,4% sama sekali belum mencerminkan suasana yang menyenangkan, 39,6% pembelajaran yang dilaksanakan baru sedikit mampu menciptakan suasana menyenangkan anak, sedangkan tingkat sebagian besar dan sepenuhnya pembelajaran menyenangkan anak belum ada sama sekali (0%).

#### 4). Efektivitas Pembelajaran Siswa.

Manajemen Berbasis Sekolah dengan ciri khas pembelajaran dengan model Pakem mensyaratkan pembelajaran harus dapat mencapai tujuan secara keseluruhan dalam pembelajaran. Tujuan pembelajaran ini mencakup aspek peningkatan pengetahuan siswa, peningkatan sikap siswa, serta peningkatan ketrampilan. Apabila pembelajaran yang dilaksanakan sudah mampu menciptakan hasil sesuai dengan kawasan 3 domain (aspek) pembelajaran ini, maka pembelajaran dapat dikategorikan memiliki efektivitas yang optimal. Data hasil penelitian setelah dianalisis dapat disajikan sebagai berikut:

Tabel: 34  
Deskripsi Efektivitas Pembelajaran Siswa

No	Kategori	Frekuensi	Prosentase
1.	Sama Sekali	64	60,4%%
2.	Baru sedikit	42	39,6%
3.	Sebagian besar	0	0%
4.	Sudah sepenuhnya	0	0%
Total		106	100%

Sumber: Instrumen Pelaksanaan Pakem Oleh Siswa Item 26-28

Tabel yang tersajikan di atas memberikan gambaran bahwa efektivitas pembelajaran yang dilaksanakan di sekolah Kabupaten Banjarnegara 60,4% sama sekali belum efektif, 39,6% baru sebagian kecil pembelajaran dilaksanakan efektif, dan tidak ada yang mencapai pada

kategori sebagian besar dan sepenuhnya memiliki proses pembelajaran yang efektif. Kedaaan ini dapat dijelaskan bahwa sebagaian besar sekolah-sekolah di Kabupaten Banjarnegara belum dapat mencapai hasil belajar yang mencerinkan semua aspek pengetahuan, sikap, dan ketrampilan. Bahkan salah satu aspek yang masih menjadi ukuran pembelajaran sekarang ini, yaitu aspek pengetahuan saja belum sepenuhnya tercapai.

5). Deskripsi Keseluruhan Sub Variabel Pelaksanaan Pakem Siswa.

Pelaksanaan PAKEM oleh siswa dalam penelitian ini diungkap dengan menggunakan 13 item yang masing-masing menggunakan 4 option. Berdasarkan instrumen ini dapat ditentukan skor maksimal ideal (Smaksi) sebesar 52, skor minimal ideal (SminI) sebesar 13, Rentangan (R) sebesar 39, dan Interval 13.

Mengacu hasil perhitungan di atas, maka dapat dibuat kriteria analisis deskripsi sub variabel pelaksanaan PAKEM oleh siswa adalah sebagai berikut:

Tabel: 35  
Kriteria analisis  
Sub Variabel Pelaksanaan PAKEM Oleh Siswa

No	Kategori	Interval
1.	Rendah	Kurang dari 26
2.	Cukup	26 - 45
3.	Tinggi	46 keatas

Sumber: Instrumen Pelaksanaan PAKEM Oleh Siswa Item 1-13

Kriteria analisis di atas dijadikan landasan untuk menganalisis data yang dikumpulkan dalam penelitian ini, sehingga sub variabel pelaksanaan belajar siswa berdasarkan PAKEM dapat dideskripsikan sebagai berikut:

Tabel: 36  
Deskripsi Sub Variabel Pelaksanaan PAKEM Oleh Siswa

No	Kategori	Interval	Frekuensi	Prosentase
1.	Rendah	Kurang dari 26	62	57,5
2.	Cukup	26 - 45	40	37,7
3.	Tinggi	46 keatas	4	3,8
Jumlah			106	100

Sumber: Data Penelitian Instrumen Pelaksanaan PAKEM Oleh Siswa Item 1-10

Pelaksanaan pembelajaran siswa berdasarkan konsep PAKEM dapat dijelaskan berdasarkan hasil analisis deskriptif yang memiliki kualitas rendah sebesar 57,5%, sedangkan yang memiliki kualitas cukup sebesar 37,7%, dan 3,8% pelaksanaan pembelajaran siswa berada pada kategori cukup.

Hasil analisis data secara deskriptif di atas didukung oleh beberapa hasil wawancara sebagai berikut:

“.... Suasana yang ada di desa seperti ini sulit bagi kami untuk mengajak anak belajar secara aktif, kreatif, dan menyenangkan. Karena anak memang sudah dididik dalam keluarga yang tidak demokratis, anak selalu dituntut harus menurut terhadap orangtua mereka, berbeda dengan anak-anak yang ada di kota ....” (Hasil Wawancara dengan Spd, yang didukung oleh Dsk, Bhn)

Hasil wawancara ini sejalan dengan pendapat yang disampaikan oleh sumber lain yang mengatakan:

“ Untuk saat ini kami masih sulit untuk mengajak anak SD berani berpendapat, ... disuruh menjawab pertanyaan saja sulitnya bukan main, apalagi disuruh mengeluarkan gagasan-gagasan mereka sendiri. Memang di daerah ini anak harus dituntun untuk belajar. Kalau memang mau menerapkan ini ya harus didukung oleh semua kalangan termasuk keluarga” (Hasil Wawancara dengan Dsrn dan Gyrn).

#### c. Deskripsi Variabel Pemahaman Regulasi

Pemahaman regulasi dalam penelitian ini yang dimaksud adalah pemahaman para penyelenggara pendidikan terhadap kebijakan-kebijakan yang berkaitan dengan otonomi daerah, otonomi di bidang pendidikan, pemahaman tentang visi dan misi yang terdapat pada sekolah, dan pemahaman terhadap Mana jemen Berbasis Sekolah. Hasil penelitian di lokasi penelitian dapat disajikan informasi-informasi penting dalam bagian sebagai berikut:

##### 1). Deskripsi Persepsi Otonomi Daerah terhadap Pengembangan Sekolah.

Otonomi Daerah yang diberlakukan mendasarkan pada Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 memiliki implikasi terhadap dunia pendidikan. Masalah pendidikan menjadi bagian yang diserahkan kepada daerah, oleh karena itu sekolah yang merupakan lembaga penyelenggara pendidikan dipastikan menerima dampak kebijakan ini. Dampak yang

dapat ditimbulkan mencakup semua aspek yang ada dalam lingkup sekolah. Salah satu hal penting yaitu berkaitan dengan pengembangan sekolah.

Data hasil penelitian tentang persepsi terhadap dampak terhadap pengembangan sekolah dapat disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel: 37  
Deskripsi Persepsi Dampak Otda terhadap Pengembangan Sekolah

No	Kategori	Frekuensi	Prosentase
1.	Sangat setuju	48	45,3%
2.	Setuju	47	44,4%
3.	Ragu	10	9,4%
4.	Tidak setuju	1	0,9%
Total		106	100%

Sumber: Instrumen Pemahaman Regulasi Item 1-2

Hasil analisis data yang ditampilkan dalam data di atas memberikan gambaran bahwa dengan kebijakan otonomi daerah, pihak sekolah memiliki persepsi bahwa dengan berlakunya otonomi daerah akan memberikan dampak positif terhadap pengembangan sekolah yang menyatakan sangat setuju 45,3%, sedangkan yang setuju 44,4%, yang menyatakan ragu-ragu sebesar 9,4%, dan yang menyatakan tidak setuju sebesar 0,9%.

Fakta di atas memberikan pengertian bahwa sebagian besar sekolah memiliki persepsi dengan pelaksanaan otonomi di bidang pendidikan akan memiliki dampak terhadap kebijakan pengembangan



sekolah sesuai dengan keadaan, kebutuhan yang ada di sekolah daerah masing-masing.

## 2). Deskripsi Persepsi Dampak Otonomi Daerah Terhadap Kepegawaian

Otonomi Daerah memiliki dampak yang nyata terhadap masalah status dan urusan lain yang berkaitan dengan kepegawaian. Dampak yang timbul terhadap masalah kepegawaian ini dapat berupa keadaan yang lebih positif atau yang bersifat negatif. Dampak ini dapat dilihat dari urusan kenaikan pangkat seorang pegawai tidak lagi harus melalui birokrasi yang panjang sampai ke pusat, tetapi cukup ditangani daerah. Hasil penelitian tentang persepsi pihak sekolah dampak otonomi daerah terhadap kepegawaian dapat disajikan sebagai berikut:

Tabel: 38  
Deskripsi Persepsi Dampak Otda  
Terhadap Penanganan Masalah Kepegawaian

No	Kategori	Frekuensi	Prosentase
1.	Sangat setuju	44	41,5%
2.	Setuju	46	43,4%
3.	Ragu	14	13,2%
4.	Tidak setuju	2	1,9%
Total		106	100%

Sumber: Instrumen Pemahaman Regulasi Item 3-5

Data yang disajikan di atas dapat memberikan informasi bahwa persepsi pihak sekolah terhadap dampak otonomi daerah terhadap

penanganan masalah kepegawaian akan berjalan secara baik 41,5% menyatakan sangat setuju, yang menyatakan setuju sebesar 43,4%, sedangkan yang masih ragu bahwa otonomi daerah memiliki dampak penanganan masalah kepegawaian sebesar 13,2%, sedangkan yang tidak setuju sebesar 1,9%.

### 3). Deskripsi Persepsi Dampak Otda Terhadap Standar Pendidikan.

Otonomi daerah memberikan kebijakan menyerahkan masalah pendidikan kepada daerah, namun bukan berarti semua kewenangan masalah pendidikan sepenuhnya ada di daerah. Ada beberapa hal penting yang masih dalam pengendalian kewenangan pemerintah pusat seperti penentuan standar pendidikan, penetapan syarat gelar akademik, penetapan standar kompetensi belajar siswa dan sebagainya. Keadaan ini tentunya memberikan pengertian bahwa dengan otonomi di bidang pendidikan masih ada pengendalian standar pendidikan, sehingga tidak akan terjadi perbedaan standar kualitas pendidikan. Berdasarkan data hasil penelitian dapat disajikan sebagai berikut:

Tabel: 39  
Deskripsi Persepsi Dampak Otda terhadap Standar Pendidikan

No	Kategori	Frekuensi	Prosentase
1.	Sangat setuju	35	33%
2.	Setuju	53	50%
3.	Ragu	18	17%
4.	Tidak setuju	0	0%
Total		106	100%

Sumber: Instrumen Pemahaman Regulasi Item 6-8

Tabel yang tersaji di atas memberikan informasi bahwa persepsi pihak sekolah terhadap dampak pemberlakuan otonomi daerah pada masalah standar pendidikan yang memberikan pendapat 33% menyatakan sangat setuju bahwa otonomi daerah memiliki dampak terjadinya perbedaan standar pendidikan, yang menyatakan setuju sebesar 50%, dan yang menyatakan ragu-ragu sebesar 17%, sedangkan yang tidak setuju sebesar 0%.

Realita ini menunjukkan bahwa persepsi sebagian besar pihak sekolah masih keliru tentang otonomi di bidang pendidikan setelah diberlakukannya otonomi daerah, karena otonomi bidang pendidikan hanya sebagian saja kewenangan yang diserahkan ke daerah.

#### 4). Deskripsi Pemahaman Regulasi Secara Keseluruhan Item.

Variabel ini diungkap dengan menggunakan 10 item yang setiap item memiliki 4 option (alternatif jawaban). Berdasarkan instrumen ini dapat ditentukan Skor maksimal ideal ( $S_{maksI}$ ) sebesar 40, skor minimal ideal ( $S_{minI}$ ) sebesar 10, Rentangan ( $R$ ) sebesar 30, dan Interval 10.

Mengacu pada hasil perhitungan tersebut di atas, maka dapat dibuat kriteria analisis untuk variabel pemahaman regulasi sebagai berikut:

Tabel: 40

## Kriteria Variabel Pemahaman Regulasi

No	Kategori	Interval
1.	Rendah	Kurang dari 21
2.	Cukup	21 - 30.
3.	Tinggi	31 keatas

Sumber: Data Penelitian Instrumen Pemahaman Regulasi Item 1-10

Kriteria analisis di atas dijadikan landasan untuk menganalisis data yang dikumpulkan dalam penelitian ini, sehingga variabel pemahaman regulasi dapat dideskripsikan sebagai berikut:

Tabel: 41

## Deskripsi Variabel Pemahaman Regulasi

No	Kategori	Interval	Frekuensi	Prosentase
1.	Rendah	Kurang dari 21	61	57,5
2.	Cukup	21 - 30	41	38,7
3.	Tinggi	31 keatas	4	3,8
Jumlah			106	100

Sumber: Data Penelitian Instrumen Pemahaman Regulasi Item 1-10

Tabel deskripsi memberikan gambaran bahwa pemahaman regulasi terhadap kebijakan-kebijakan yang berkaitan dengan pelaksanaan Manajemen Berbasis Sekolah bagi para penyelenggara pendidikan yang ada di Kabupaten Banjarnegara yang masuk pada kategori rendah sebesar 57,5%, yang pemahamannya pada kategori cukup 38,7%, dan yang memiliki kategori tinggi sebesar 3,8%. Hasil analisis menunjukkan bahwa sebagian besar para penyelenggara pendidikan belum memahami

regulasi kebijakan yang berkaitan dengan otonomi di bidang pendidikan khususnya yang menyangkut masalah MBS.

Uraian di atas didukung hasil analisis data kualitatif yang dikumpulkan melalui wawancara terhadap beberapa informan yang pada intinya sebagai berikut:

“Sebagian guru yang ada di Kabupaten Banjarnegara ini memang belum mengikuti penataran atau yang sejenisnya berkaitan kebijakan tentang MBS, sehingga kalau kita cermati memang pemahaman tentang regulasi yang berkaitan dengan otonomi pendidikan khususnya tentang MBS saya kira masih kurang pas..” (Hasil Wawancara dengan salah satu Kasi Diknas)

Pandangan tentang pemahaman terhadap regulasi oleh guru yang dinyatakan oleh sumber tersebut di atas memang secara faktual benar adanya. Baru sebagian kecil guru yang mengikuti penataran maupun pelatihan tentang MBS. Fakta ini didukung oleh pernyataan yang disampaikan oleh beberapa sumber data yang sejenis.

“Dengan adanya otonomi ini kami serba ragu tentang pelaksanaan pembelajaran, apalagi kebijakan-kebijakan baru yang berkaitan dengan kepegawaian, kebijakan tentang model-model pembelajaran yang tidak didukung oleh faktor peningkatan kesejahteraan yang memadai” (Wawancara dengan Beberapa guru)

Selain pendapat ada pendapat yang lebih menggembirakan yang menggunakan sudut pandang yang berbeda yang menyatakan sebagai berikut:

“Dengan adanya otonomi ini akan memberikan kebebasan kepada daerah untuk melaksanakan pendidikan secara mandiri termasuk proses pembelajarannya semakin bervariasi. Keadaan ini semakin memacu persaingan kreasi dari masing-masing penyelenggara pendidikan baik lembaga maupun guru-guru yang menjadi motor utama dalam pendidikan”.

Dari berbagai data hasil wawancara ini menunjukkan bahwa pemahaman terhadap regulasi kebijakan-kebijakan otonomi pendidikan masih sangat beragam yang sebagian besar masih pada tingkat rendah.

#### d. Deskripsi Variabel Organisasi dan Manajemen Sekolah

Organisasi manajemen pendidikan adalah variabel penelitian yang mencakup kualitas dan kuantitas sumber daya manusia, kualitas sarana dan prasarana pendidikan, tingkat dukungan dana, dan keterlibatan masyarakat. Variabel ini diukur dengan menggunakan 17 item yang memiliki 4 option setiap item. Berdasarkan instrumen ini dapat dihitung Skor maksimal ideal (SmaksI) sebesar 68, skor minimal ideal (SminI) sebesar 17, Rentangan (R) sebesar 51, dan Interval 17.

Mengacu pada hasil perhitungan tersebut di atas, maka dapat dibuat kriteria analisis untuk variabel organisasi manajemen pendidikan sebagai berikut:

Tabel: 42  
Kriteria analisis Variabel Organisasi Manajemen Pendidikan

No	Kategori	Interval
1.	Rendah	Kurang dari 21
2.	Cukup	21 - 30
3.	Tinggi	31 keatas

Sumber: Data Penelitian Instrumen Organisasi dan Manajemen Item 1-10

Kriteria analisis di atas dijadikan landasan untuk menganalisis data yang dikumpulkan dalam penelitian ini, sehingga variabel organisasi manajemen pendidikan dapat dideskripsikan sebagai berikut:

Tabel: 43  
Deskripsi Variabel Organisasi Manajemen Pendidikan

No	Kategori	Interval	Frekuensi	Prosentase
1.	Rendah	Kurang dari 34	60	56,6
2.	Cukup	35 - 51	40	37,7
3.	Tinggi	52 keatas	6	5,7
Jumlah			106	100

Sumber: Data Penelitian Instrumen Organisasi dan Manajemen Item 1-10

Organisasi manajemen pendidikan yang mencakup masalah sumber daya manusia, sarana dan prasarana, serta pendanaan dan keterlibatan masyarakat di Kabupaten Banjarnegara hasil analisis menunjukkan yang berada pada kategori rendah sebesar 56,6%, yang memiliki kategori cukup sebesar 37,7%, sedangkan yang memiliki kategori tinggi sebesar 5,7%.

Berdasarkan hasil analisis ini dapat ditafsirkan bahwa organisasi manajemen pendidikan sebagian besar sekolah yang ada di Kabupaten Banjarnegara masih sangat memprihatinkan terutama yang berkaitan dengan

masalah sumber daya manusia, sarana dan prasarana, maupun yang berkaitan dengan keterlibatan masyarakat, hanya sebagian kecil yang berada pada kategori baik.

Apabila dicermati setiap sub variabel, maka dapat diperhatikan hasil analisis sebagai berikut:

#### 1). Deskripsi Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia dalam penelitian ini diungkap dengan menggunakan dengan menggunakan 5 item yang memiliki 4 option setiap item. Berdasarkan instrumen ini dapat dihitung Skor maksimal ideal ( $S_{maks}$ ) sebesar 20, skor minimal ideal ( $S_{min}$ ) sebesar 5, Rentangan ( $R$ ) sebesar 15, dan Interval 5.

Mengacu pada hasil perhitungan tersebut di atas, maka dapat dibuat kriteria analisis untuk variabel organisasi manajemen pendidikan sebagai berikut:

Tabel: 44  
Kriteria analisis Variabel

No	Kategori	Interval
1.	Rendah	Kurang dari 10
2.	Cukup	10 - 15
3.	Tinggi	16 keatas

Sumber: Data Penelitian Instrumen Kualitas SDM Item 1-5

Kriteria analisis di atas dijadikan landasan untuk menganalisis data yang dikumpulkan dalam penelitian ini, sehingga sub variabel sumber daya manusia dapat dideskripsikan sebagai berikut:



Tabel: 45  
Deskripsi Variabel Kualitas SDM

No	Kategori	Interval	Frekuensi	Prosentase
1.	Rendah	Kurang dari 10	23	21,7
2.	Cukup	10 - 15	78	73,6
3.	Tinggi	16 keatas	5	4,7
Jumlah			106	100

Sumber: Data Penelitian Instrumen Kualitas SDM tem 1-5

Berdasarkan tabel hasil analisis di atas dapat dijelaskan bahwa kualitas sumber daya manusia di bidang pendidikan Kabupaten Banjarnegara yang berada pada kategori rendah sebesar 21,7%, yang memiliki kualitas cukup sebesar 73,6%, sedangkan yang memiliki kualitas tinggi sebesar 4,7%.

## 2). Deskripsi Sarana dan Prasarana

Sub Variabel sarana dan prasarana dalam penelitian ini diungkap dengan menggunakan dengan menggunakan 8 item yang memiliki 4 option setiap item. Berdasarkan instrumen ini dapat dihitung Skor maksimal ideal ( $S_{maksI}$ ) sebesar 32, skor minimal ideal ( $S_{minI}$ ) sebesar 8, Rentangan ( $R$ ) sebesar 24, dan Interval 8.

Mengacu pada hasil perhitungan tersebut di atas, maka dapat dibuat kriteria analisis untuk variabel organisasi manajemen pendidikan sebagai berikut:

Tabel: 46  
Kriteria analisis Variabel Sarana Prasarana

No	Kategori	Interval
1.	Rendah	Kurang dari 17
2.	Cukup	16 - 23
3.	Tinggi	24 keatas

Sumber: Data Penelitian Instrumen Sarana Prasarana Item 1-8

Kriteria analisis di atas dijadikan landasan untuk menganalisis data yang dikumpulkan dalam penelitian ini, sehingga sub variabel sarana dan prasarana dapat dideskripsikan sebagai berikut:

Tabel: 47  
Deskripsi Variabel Sarana Prasarana

No	Kategori	Interval	Frekuensi	Prosentase
1.	Rendah	Kurang dari 10	65	61,3
2.	Cukup	10 - 15	37	34,9
3.	Tinggi	16 keatas	4	3,8
Jumlah			106	100

Sumber: Data Penelitian Instrumen Sarana Prasarana Item 1-8

Berdasarkan tabel hasil analisis di atas dapat dijelaskan bahwa kualitas sarana prasarana di bidang pendidikan Kabupaten Banjarnegara yang berada pada kategori rendah sebesar 61,3%, yang memiliki kualitas cukup sebesar 34,9%, sedangkan yang memiliki kualitas tinggi sebesar 3,8%.

## 2). Deskripsi Sarana dan Prasarana

Sub Variabel sarana dan prasarana dalam penelitian ini diungkap dengan menggunakan dengan menggunakan 4 item yang memiliki 4 option setiap item. Berdasarkan instrumen ini dapat dihitung Skor maksimal ideal ( $S_{maksI}$ ) sebesar 16, skor minimal ideal ( $S_{minI}$ ) sebesar 4, Rentangan ( $R$ ) sebesar 12, dan Interval 4.

Mengacu pada hasil perhitungan tersebut di atas, maka dapat dibuat kriteria analisis untuk sub variabel sarana prasarana sebagai berikut:

Tabel: 48  
Kriteria analisis  
Variabel Pendanaan Dan Keterlibatan Masyarakat

No	Kategori	Interval
1.	Rendah	Kurang dari 9
2.	Cukup	9 - 12
3.	Tinggi	13 keatas

Sumber: Instrumen Pendanaan Dan Keterlibatan Masyarakat Item 1-4

Kriteria analisis di atas dijadikan landasan untuk menganalisis data yang dikumpulkan dalam penelitian ini, sehingga sub variabel sarana dan prasarana dapat dideskripsikan sebagai berikut:

Tabel: 49  
Deskripsi Variabel Pendanaan dan Keterlibatan Masyarakat

No	Kategori	Interval	Frekuensi	Prosentase
1.	Rendah	Kurang dari 9	52	49,1
2.	Cukup	9 - 12	51	48,1
3.	Tinggi	13 keatas	3	2,8
Jumlah			106	100

Sumber: Data Penelitian Instrumen Pendanaan dan Keterlibatan Masyarakat Item 1-4

Berdasarkan tabel hasil analisis di atas dapat dijelaskan bahwa kualitas pendanaan dan keterlibatan masyarakat di bidang pendidikan Kabupaten Banjarnegara yang berada pada kategori rendah sebesar 49,1%, yang memiliki kualitas cukup sebesar 48,1%, sedangkan yang memiliki kualitas tinggi sebesar 2,8%.

#### e. Deskripsi Variabel Responsibilitas

Variabel responsibilitas dalam penelitian ini diungkap dengan menggunakan dengan menggunakan 10 item yang memiliki 4 option setiap item. Berdasarkan instrumen ini dapat dihitung Skor maksimal ideal ( $S_{maksI}$ ) sebesar 40, skor minimal ideal ( $S_{minI}$ ) sebesar 10, Rentangan ( $R$ ) sebesar 30, dan Interval 10.

Mengacu pada hasil perhitungan tersebut di atas, maka dapat dibuat kriteria analisis untuk variabel pemahaman regulasi sebagai berikut:

Tabel: 50  
Kriteria Analisis Variabel Responsibilitas

No	Kategori	Interval
1.	Rendah	Kurang dari 21
2.	Cukup	21 - 30
3.	Tinggi	31 keatas

Sumber: Data Penelitian Instrumen Responsibilitas Item 1-10

Kriteria analisis di atas dijadikan landasan untuk menganalisis data, sehingga variabel responsibilitas dapat dideskripsikan sebagai berikut:

Tabel: 51  
Deskripsi Variabel Responsibilitas

No	Kategori	Interval	Frekuensi	Prosentase
1.	Rendah	Kurang dari 21	71	67,0
2.	Cukup	21 - 30	32	30,2
3.	Tinggi	31 keatas	3	2,8
Jumlah			106	100

Sumber: Data Penelitian Instrumen Responsibilitas Item 1-10

Responsibilitas dunia pendidikan terhadap masyarakat di Kabupaten Banjarnegara sebagian besar berada pada kategori rendah yaitu sebesar 67%, sedangkan yang memiliki responsibilitas pada kategori cukup sebesar 30,2%, dan yang memiliki responsibilitas tinggi hanya 2,8%.

### C. Kaitan Setiap Variabel Penelitian

Penelitian ini sesuai dengan rancangan yang sudah dibuat akan menguji keterkaitan antara variabel kinerja pendidikan (Y) dengan variabel pemahaman

regulasi (X1), organisasi manajemen pendidikan (X2), dan responsibilitas. Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan dengan menggunakan fasilitas komputer dengan SPSS Versi 11 yang menggunakan tabel silang diperoleh hasil sebagai berikut:

#### 1. Kaitan Variabel Pemahaman Regulasi Dengan Kinerja Pendidikan

Keterkaitan antara variabel pemahaman regulasi dengan Kinerja dalam bidang pendidikan setelah berlakunya otonomi daerah berdasarkan hasil analisis yang disajikan pada tabel sebagai berikut:

Tabel: 52  
Hasil analisis Silang Pemahaman Regulasi Dengan Kinerja Pendidikan

		Pemahaman Regulasi			Total
		Rendah	Cukup	Tinggi	
Kualitas Kinerja Pendidikan	Rendah	39 (36,8%)	17 (16%)	0 (0%)	56 (52,8%)
	Cukup	20 (18,9%)	21 (19,8%)	3 (2,8%)	44 (41,5%)
	Tinggi	2 (1,9%)	3 (2,8%)	1 (0,9%)	6 (5,7%)
Total		61 (57,5%)	41 (38,7%)	4 (3,8%)	106 (100%)

Tabel di atas dapat memberikan informasi memberikan informasi bahwa pemahaman regulasi ini memiliki hubungan dengan kinerja pendidikan. Hal ini dapat diperhatikan kecenderungan bahwa apabila sekolah yang memiliki pemahaman yang rendah memiliki kecenderungan kinerja yang rendah, realita ini dari frekuensi pemahaman regulasi yang rendah sebesar 61

(57,5%) responden yang memiliki kinerja rendah sebesar 39 (36,8%) responden dan hanya 2 (1,9%) responden yang memiliki kinerja tinggi.

Apabila diperhatikan koefisien korelasi yang terdapat dalam tabel yang disajikan di atas, maka dapat ditafsirkan koefisien korelasi sebesar 0,289 yang bernilai positif ini memiliki pengertian bahwa variabel pemahaman regulasi yang dimiliki oleh para penyelenggara pendidikan memiliki hubungan yang positif dengan kinerja bidang pendidikan yang terdapat pada sekolah-sekolah yang ada di Kabupaten Banjarnegara. Hal ini dapat dijelaskan bahwa semakin baik pemahaman regulasi yang dimiliki oleh para penyelenggara pendidikan, maka semakin baik pula kinerja bidang pendidikan yang terdapat pada sekolah-sekolah yang ada di Kabupaten Banjarnegara. Sebaliknya semakin kurang pemahaman regulasi yang dimiliki oleh para penyelenggara pendidikan, maka semakin jelek pula kinerja bidang pendidikan yang terdapat pada sekolah-sekolah yang ada di Kabupaten Banjarnegara.

## 2. Kaitan Variabel Organisasi Manajemen Pendidikan Dengan Kinerja Pendidikan

Variabel organisasi manajemen pendidikan apabila dikaji kaitannya dengan variabel kinerja dalam bidang pendidikan setelah berlakunya otonomi daerah, maka dapat diperhatikan hasil analisis pada tabel sebagai berikut:

Tabel: 53  
Hasil analisis Silang Organisasi Manajemen Dengan Kinerja Pendidikan

		Manajemen Organisasi			Total
		Rendah	Cukup	Tinggi	
Kualitas	Rendah	37 (34,9%)	19 (17,9%)	0 (0%)	56 (52,8%)
Kinerja	Cukup	22 (20,8%)	18 (17%)	4 (3,8)	44 (41,5%)
Pendidikan	Tinggi	1 (0,9%)	3 (2,8%)	2 (1,9%)	6 (5,7%)
Total		60 (56,6%)	40 (37,7%)	6 (5,7%)	100 (100%)

Tabel yang tersaji di atas memberikan gambaran bahwa organisasi dan manajemen memiliki hubungan dengan kualitas kinerja pendidikan. Hal ini dapat ditafsirkan dari sebaran frekuensi data penelitian. Sebaran frekuensi organisasi dan manajemen yang memiliki kualitas rendah sebesar 60 responden (sekolah) yang berada pada kategori kualitas kinerja pendidikan rendah sebesar 37 responden (sekolah) atau 34,9%, sedangkan organisasi dan manajemen rendah 60 responden yang memiliki kualitas penyelenggaraan pendidikan tinggi tidak ada sama sekali.

Apabila diperhatikan koefisien korelasi yang terdapat dalam tabel yang disajikan di atas, maka dapat ditafsirkan koefisien korelasi sebesar 0,326 yang bernilai positif ini memiliki pengertian bahwa variabel organisasi manajemen pendidikan memiliki kaitan yang positif dengan kinerja bidang pendidikan yang terdapat pada sekolah-sekolah yang ada di Kabupaten Banjarnegara. Hal ini dapat dijelaskan bahwa semakin baik organisasi manajemen pendidikan,



maka semakin baik pula kinerja bidang pendidikan yang terdapat pada sekolah-sekolah yang ada di Kabupaten Banjarnegara. Sebaliknya semakin kurang organisasi manajemen pendidikan, maka semakin jelek pula kinerja bidang pendidikan yang terdapat pada sekolah-sekolah yang ada di Kabupaten Banjarnegara.

### 3. Kaitan Variabel Responsibilitas Dengan Kinerja Pendidikan

Variabel responsibilitas apabila dikaji kaitannya dengan variabel kinerja dalam bidang pendidikan setelah berlakunya otonomi daerah, maka dapat diperhatikan hasil analisis pada tabel berikut ini:

Tabel: 54  
Hasil analisis Silang Responsibilitas Dengan Kinerja Pendidikan

		Responsibilitas			Total
		Rendah	Cukup	Tinggi	
Kualitas Kinerja Pendidikan	Rendah	52 (49,1%)	4 (3,8%)	0 (0%)	56 (52,8%)
	Cukup	17 (16%)	27 (25,5%)	0 (0%)	44 (41,5%)
	Tinggi	2 (1,9%)	1 (0,9%)	3 (2,8%)	6 (5,7%)
Total		71 (67,0%)	32 (30,2%)	3 (2,8%)	100 (100%)

Tabel yang tersaji di atas memberikan gambaran bahwa responsibilitas memiliki hubungan dengan kualitas kinerja pendidikan. Hal ini dapat ditafsirkan dari sebaran frekuensi data penelitian. Sebaran frekuensi responsibilitas yang memiliki kualitas rendah sebesar 56 responden (sekolah)

yang berada pada kategori kualitas kinerja pendidikan rendah sebesar 52 responden (sekolah) atau 49,1%, sedangkan responsibilitas rendah 56 responden yang memiliki kualitas penyelenggaraan pendidikan tinggi tidak ada sama sekali.

Apabila diperhatikan koefisien korelasi yang terdapat dalam tabel yang disajikan di atas, maka dapat ditafsirkan koefisien korelasi sebesar 0,592 yang bernilai positif ini memiliki pengertian bahwa variabel responsibilitas memiliki kaitan yang positif dengan kinerja bidang pendidikan yang terdapat pada sekolah-sekolah yang ada di Kabupaten Banjarnegara. Hal ini dapat dijelaskan bahwa semakin baik responsibilitas lembaga pendidikan terhadap masyarakat, maka semakin baik pula kinerja bidang pendidikan yang terdapat pada sekolah-sekolah yang ada di Kabupaten Banjarnegara. Sebaliknya semakin kurang responsibilitas terhadap masyarakat, maka semakin jelek pula kinerja bidang pendidikan yang terdapat pada sekolah-sekolah yang ada di Kabupaten Banjarnegara

#### **D. Diskusi**

Kualitas kinerja pendidikan dasar menengah yang mencakup aspek kualitas penyelenggaraan pendidikan, kualitas aktivitas guru dalam melaksanakan pembelajaran model PAKEM, dan kualitas aktivitas siswa dalam pembelajaran

model PAKEM. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kualitas kinerja bidang pendidikan dasar menengah pada sub variabel kulaitas penyelenggaraan pendidikan di Kabupaten Banjarnegara apabila dikaji berdasarkan konsep Manajemen Berbasis Sekolah sebagian besar masih berada pada tingkat rendah sebesar 52,8%, dan sebesar 41,5% memiliki kualitas cukup.

Hasil ini dapat dijelaskan bahwa kualitas penyelenggaraan pendidikan yang mencakup perencanaan yang jelas, dan pelaksanaan yang efisien dan efektif, serta mampu memberikan pelayanan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat belum dapat dicapai oleh lembaga pendidikan gdasar dan menengah di Kabupaten Banjarnegara.

Selain itu kualitas kinerja pendidikan dapat dikaji dari kulaitas aktivitas guru dalam melaksanakan pembelajaran PAKEM, kualitas kegiatan guru dalam melaksanakan PAKEM yang termasuk pada kategori rendah sebesar 50,9%, sedangkan yang memiliki kualitas cukup sebesar 39,6%, dan yang memiliki kualitas dalam melaksanakan kegiatan sesuai dengan pembelajaran PAKEM sebesar 9,5%. Hal ini dapat ditafsirkan bahwa sebagian besar guru belum dapat mengembangkan proses pembelajaran yang sesuai dengan konsep pembelajaran PAKEM, hanya sebagian kecil yang mampu menciptakan proses pembelajaran yang sesuai dengan konsep PAKEM.

Proses pembelajaran aktif, kreatif, dan menyenangkan (PAKEM) adalah proses pembelajaran yang menumbuhkan sikap aktif dengan mengedepankan

aspek-aspek manusiawi yang dilandasi dengan sikap dan suasana yang demokratis. Suasana ini dapat tercipta apabila guru mampu mewujudkan suasana pembelajaran dengan yang menantang dengan menggunakan alat bantu yang beragam. Selain itu guru harus mampu menciptakan suasana yang menyenangkan sehingga anak berani menyampaikan gagasan-gagasan yang mereka inginkan, tanpa dihindari rasa takut salah, dan takut tidak dihargai. Proses pembelajaran ini akan membuat anak belajar dengan lepas dari tekanan lingkungan mereka.

Hal lain yang penting ditemukan dalam mengkaji kualitas kinerja pendidikan di Kabupaten Banjarnegara yaitu tentang kualitas aktivitas siswa dalam pembelajaran Model PAKEM yang memiliki kualitas rendah sebesar 57,5%, sedangkan yang memiliki kualitas cukup sebesar 37,7%, dan 3,8% pelaksanaan pembelajaran siswa berada pada kategori cukup. Hasil ini menggambarkan bahwa sebagian besar proses pembelajaran yang dilakukan oleh siswa belum diciptakan suasana belajar yang aktif, kreatif, dan menyenangkan.

Deskripsi tentang pemahaman regulasi terhadap kebijakan-kebijakan yang berkaitan dengan pelaksanaan Manajemen Berbasis Sekolah bagi para penyelenggara pendidikan yang ada di Kabupaten Banjarnegara yang masuk pada kategori rendah sebesar 57,5%, yang pemahamannya pada kategori cukup 38,7%, dan yang memiliki kategori tinggi sebesar 3,8%. Hasil analisis menunjukkan bahwa sebagian besar para penyelenggara pendidikan belum memahami regulasi kebijakan yang berkaitan dengan otonomi di bidang pendidikan khususnya yang

menyangkut pemahaman terhadap visi dan misi penyelenggaraan pendidikan, pemahaman terhadap konsep MBS, serta pemahaman pada konsep PAKEM.

Organisasi manajemen pendidikan adalah variabel penelitian yang mencakup kualitas dan kuantitas sumber daya manusia, kualitas sarana dan prasarana pendidikan, tingkat dukungan dana, dan keterlibatan masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan yang berada pada kategori rendah sebesar 56,6%, yang memiliki kategori cukup sebesar 37,7%, sedangkan yang memiliki kategori cukup sebesar 5,7%. Berdasarkan hasil analisis ini dapat ditafsirkan bahwa organisasi manajemen pendidikan sebagian besar sekolah yang ada di Kabupaten Banjarnegara masih sangat memprihatinkan terutama yang berkaitan dengan masalah sumber daya manusia, sarana dan prasarana, maupun yang berkaitan dengan keterlibatan masyarakat, hanya sebagian kecil memiliki kategori baik.

Apabila dicermati setiap sub variabel, maka dapat diperhatikan hasil analisis dijelaskan bahwa kualitas sumber daya manusia di bidang pendidikan Kabupaten Banjarnegara yang berada pada kategori rendah sebesar 21,7%, yang kualitas cukup sebesar 73,6%, sedangkan yang berkualitas tinggi sebesar 4,7%.

Sedangkan kualitas sarana prasarana di bidang pendidikan Kabupaten Banjarnegara yang berada pada kategori rendah sebesar 61,3%, yang memiliki kualitas cukup sebesar 34,9%, dan yang memiliki kualitas tinggi sebesar 3,8%.

Sub variabel pendanaan dan keterlibatan masyarakat di bidang pendidikan Kabupaten Banjarnegara yang berada pada kategori rendah sebesar 49,1%, yang berkualitas cukup sebesar 48,1%, sedangkan yang berkualitas tinggi 2,8%.

Responsibilitas dunia pendidikan terhadap masyarakat di Kabupaten Banjarnegara sebagian besar berada pada kategori rendah yaitu sebesar 67%, sedangkan yang memiliki responsibilitas pada kategori cukup sebesar 30,2%, dan yang memiliki responsibilitas tinggi hanya 2,8%.

Hasil analisis dengan tabel silang memberikan gambaran bahwa kecenderungan keterkaitan antara variabel pemahaman regulasi dengan Kinerja dalam bidang pendidikan setelah berlakunya otonomi daerah menunjukkan bahwa pemahaman regulasi yang rendah sebanyak 57,5% responden yang memiliki kinerja pendidikan rendah sebesar 36,8% dan yang memiliki kinerja dalam dunia pendidikan yang tinggi hanya 1,9%. Sedangkan responden yang memiliki pemahaman regulasi yang tinggi sebesar 3,8% tidak ada yang memiliki kinerja dalam dunia pendidikan dalam kategori rendah. Hal ini dapat dijelaskan bahwa semakin tinggi pemahaman regulasi dalam dunia pendidikan memiliki kecenderungan kinerja dalam dunia pendidikan yang tinggi, sebaliknya pemahaman regulasi yang rendah memiliki kecenderungan kinerja dalam dunia pendidikan yang rendah.

Variabel organisasi manajemen pendidikan apabila dikaji kaitannya dengan variabel kinerja dalam bidang pendidikan setelah berlakunya otonomi

daerah dengan memperhatikan hasil analisis tabel silang, maka dapat diartikan menunjukkan kecenderungan sekolah yang memiliki organisasi manajemen pada kategori rendah sebanyak 56,6% hanya 0,9% yang memiliki kinerja dalam bidang pendidikan yang tinggi, sebagian besar memiliki kinerja yang rendah yaitu sebesar 34,9%. Sebaliknya sekolah yang memiliki organisasi manajemen yang berada pada kategori tinggi sebesar 6,57% tidak ada yang memiliki kinerja rendah. Hasil penelitian ini memberikan dukungan terhadap teori-teori yang telah dipercaya, bahwa semakin baik organisasi dan manajemen dari suatu lembaga akan memberikan sumbanganterhadap peningkatan kinerjanya.

Variabel responsibilitas apabila dikaji kaitannya dengan variabel kinerja dalam bidang pendidikan setelah berlakunya otonomi daerah dengan memperhatikan hasil analisis tabel silang sebaran frekuensinya menunjukkan kecenderungan kualitas responsibilitas yang rendah sebanyak 67% sebagian besar memiliki kinerja yang rendah sebesar 49,1% dan hanya 1,9% yang memiliki kinerja tinggi. Sedangkan sekolah yang memiliki responsibilitas yang berada pada kategori tinggi sebesar 2,8% semua memiliki kualitas kinerja dalam bidang pendidikan yang tinggi pula. Hasil penelitian ini memberikan gambaran bahwa kualitas responsibilitas memiliki kecenderungan yang sejalan dengan kualirtas kinerja sekolah.





## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. Kesimpulan

Kualitas kinerja pendidikan dasar menengah yang mencakup aspek kualitas penyelenggaraan pendidikan, kualitas aktivitas guru dalam melaksanakan pembelajaran model PAKEM, dan kualitas aktivitas siswa dalam pembelajaran model PAKEM. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kualitas kinerja bidang pendidikan dasar menengah pada sub variabel kulaitas penyelenggaraan pendidikan di Kabupaten Banjarnegara apabila dikaji berdasarkan konsep Manajemen Berbasis Sekolah sebagian besar masih berada pada tingkat rendah .

Selain itu kualitas kinerja pendidikan dapat dikaji kualitas kegiatan guru dalam melaksanakan PAKEM yang termasuk pada kategori rendah sebesar 50,9%. Hal ini dapat ditafsirkan bahwa sebagian besar guru belum dapat mengembangkan proses pembelajaran yang sesuai dengan konsep pembelajaran PAKEM, hanya sebagian kecil yang mampu menciptakan proses pembelajaran yang sesuai dengan konsep PAKEM.

Hal lain yang penting diketemukan dalam mengkaji kualitas kinerja pendidikan di Kabupaten Banjarnegara yaitu tentang kualitas aktivitas siswa dalam pembelajaran Model PAKEM yang memiliki kualitas rendah sebesar 57,5%.

Deskripsi tentang pemahaman regulasi terhadap kebijakan-kebijakan yang berkaitan dengan pelaksanaan Manajemen Berbasis Sekolah bagi para



penyelenggara pendidikan yang ada di Kabupaten Banjarnegara yang masuk pada kategori rendah sebesar 57,5%. Hasil analisis menunjukkan bahwa sebagian besar para penyelenggara pendidikan belum memahami regulasi kebijakan yang berkaitan dengan otonomi di bidang pendidikan khususnya yang menyangkut pemahaman terhadap visi dan misi penyelenggaraan pendidikan, pemahaman terhadap konsep MBS, serta pemahaman pada konsep PAKEM.

Organisasi manajemen pendidikan adalah variabel penelitian yang mencakup kualitas dan kuantitas sumber daya manusia, kualitas sarana dan prasarana pendidikan, tingkat dukungan dana, dan keterlibatan masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan sebagian besar berada pada kategori rendah sebesar 56,6%.

Apabila dicermati setiap sub variabel, maka dapat diperhatikan hasil analisis dijelaskan bahwa kualitas sumber daya manusia di bidang pendidikan Kabupaten Banjarnegara yang berada pada kategori rendah sebesar 21,7%, yang memiliki kualitas cukup sebesar 73,6%. Sedangkan kualitas sarana prasarana di bidang pendidikan Kabupaten Banjarnegara sebagian besar berada pada kategori rendah sebesar 61,3%. Sub variabel pendanaan dan keterlibatan masyarakat di bidang pendidikan Kabupaten Banjarnegara sebagian besar berada pada kategori rendah sebesar 49,1%.

Responsibilitas dunia pendidikan terhadap masyarakat di Kabupaten Banjarnegara sebagian besar berada pada kategori rendah yaitu sebesar 67%.

Kecenderungan kaitan variabel pemahaman regulasi yang dimiliki oleh para penyelenggara pendidikan dengan kinerja bidang pendidikan yang terdapat pada sekolah-sekolah yang ada di Kabupaten Banjarnegara sebagian besar berada pada kategori rendah yang memiliki kinerja yang rendah. Semakin baik pemahaman regulasi yang dimiliki oleh para penyelenggara pendidikan, maka semakin baik pula kinerja bidang pendidikan yang terdapat pada sekolah-sekolah yang ada di Kabupaten Banjarnegara. Sebaliknya semakin kurang pemahaman regulasi yang dimiliki oleh para penyelenggara pendidikan, maka semakin jelek pula kinerja bidang pendidikan yang terdapat pada sekolah-sekolah yang ada di Kabupaten Banjarnegara.

Variabel organisasi manajemen pendidikan yang terdapat dalam lembaga pendidikan memiliki kecenderungan yang sejajar dan searah dengan kinerja bidang pendidikan yang terdapat pada sekolah-sekolah yang ada di Kabupaten Banjarnegara. Semakin baik organisasi manajemen pendidikan, maka semakin baik pula kinerja bidang pendidikan yang terdapat pada sekolah-sekolah yang ada di Kabupaten Banjarnegara. Sebaliknya semakin kurang organisasi manajemen pendidikan, maka semakin jelek pula kinerja bidang pendidikan yang terdapat pada sekolah-sekolah yang ada di Kabupaten Banjarnegara.

Variabel responsibilitas yang terdapat dalam lembaga pendidikan sebagian besar memiliki kualitas yang rendah dan memiliki kecenderungan yang searah dengan kinerja bidang pendidikan yang terdapat pada sekolah-sekolah yang ada di Kabupaten Banjarnegara. Semakin baik responsibilitas lembaga pendidikan

terhadap masyarakat, maka semakin baik pula kinerja bidang pendidikan yang terdapat pada sekolah-sekolah yang ada di Kabupaten Banjarnegara. Sebaliknya semakin kurang responsibilitas terhadap masyarakat, maka semakin jelek pula kinerja bidang pendidikan yang terdapat pada sekolah-sekolah yang ada di Kabupaten Banjarnegara.

#### B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh, maka dalam penelitian ini disampaikan sara-saran sebagai berikut:

1. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kualitas kinerja pendidikan berada pada kategori terutama yang berkaitan dengan aktivitas guru dalam melaksanakan model PAKEM berada pada kategori rendah yang disebabkan oleh kendala kurikulum yang diberlakukan, maka perlu segera diadakan perubahan kurikulum yang dapat menunjang peningkatan kinerja pendidikan terutama dalam penerapan Manajemen Berbasis Sekolah.
2. Hasil penelitian ini juga menemukan bahwa aktivitas siswa dalam pelaksanaan model pembelajaran PAKEM berada kategori rendah yang menurut hasil penelitian lebih disebabkan oleh kebiasaan anak didik supaya menjadi penurut, maka perlu kerjasama dan penyuluhan kepada orangtua murid mengenai proses pendidikan anak yang demokratis, agar dapat menunjang pelaksanaan pembelajaran model PAKEM.

3. Hasil penelitian lain yang diperoleh dalam penelitian adalah tentang pemahaman regulasi para penyelenggara pendidikan dan guru-guru berada pada kategori rendah, maka diperlukan adanya sosialisasi tentang kebijakan-kebijakan baru tentang otonomi pendidikan dengan menyelenggarakan pelatihan-pelatihan atau penataran-penataran yang berkaitan dengan Manajemen Berbasis Sekolah dan hal-hal lain yang berkaitan dengan otonomi di bidang pendidikan.
4. Organisasi manajemen pendidikan yang terdiri dari sumber daya manusia, sarana dan prasarana, serta pendanaan dan keterlibatan masyarakat yang masih berada pada kategori rendah, maka perlu adanya peningkatan sarana dan prasarana, serta perlu ada penyuluhan pada masyarakat mengenai peran masyarakat dalam peningkatan kualitas pendidikan.